ZAHIR publishing

STUDI PENGEMBANGAN SAPI POTONG WILAYAH KERJASAMA UTARA-UTARA SULAWESI

Penulis :
Dr. Fachrudin Z. Olilingo, SE. M.Si.
Ivan Rahmad Santoso, SEi, MSi
Fahrul Ilham, S.Pt, M.Si

STUDI PENGEMBANGAN SAPI POTONG
WILAYAH KERJASAMA UTARA-UTARA SULAWESI

Penulis :
Dr. Fachrudin Z. Olilingo, SE. M.Si.
Ivan Rahmad Santoso, SEi, M.Si.
Fahrul Ilham, S.Pt., M.Si.

ZAHIR publishing

Studi Pengembangan Sapi Potong Wilayah Kerjasama Utara-Utara Sulawesi
Yogyakarta: Zahir Publishing, September 2018

ISBN: 978-602-5541-34-6

Penulis : Dr. Fachrudin Z. Olilingo, SE. M.Si.
Ivan Rahmad Santoso, SEi, M.Si.
Fahrul Ilham, S.Pt., M.Si.
Editor : Dr. Abdul Rahmat, M.Pd.
Tata letak : Ismi Aziz
Design cover : Ityan Jauhar

Diterbitkan oleh:
ZAHIR PUBLISHING
Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571
0857 2589 4940 E: zahirpublishing@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Kerjasama utara-utara selain dilandaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 juga didasarkan pada kesepakatan 3 Gubernur yaitu Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2014 yang pada dasarnya menghendaki agar kawasan utara Sulawesi menjadi kawasan strategis nasional bidang perbatasan negara. Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah ingin mengisi sasaran kawasan strategis nasional perbatasan negara dengan kegiatan pemberdayaan, pengembangan produk dan industri dalam rangka mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan dan energy. Pada tahun 2017 kerjasama utara-utara dari sisi kelembagaan semakin kuat setelah masuknya Kabupaten Bone Bolango menjadi anggota baru dan berubahnya nomenklatur kerjasama utara-utara dari sebelumnya Sekretariat Bersama menjadi Badan Kerjasama Utara-Utara (BKSU) sesuai kesepakatan Den Hag Belanda tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani 4 Bupati yaitu Bupati Gorontalo Utara, Bupati Buol, Bupati Bolaang Mongondow Utara dan Bupati Bone Bolango dan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan disajikan dalam bentuk deskriptif teoritis dan analisis serta berguna bagi pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan semua stake holder yang terkait dengan kerjasama utara-utara terutama tentang kebijakan dalam percepatan pengembangan peternakan sapi potong di kawasan kerjasama utara-utara. Dalam Kesempatan ini tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu sehingga terbitnya buku ini.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Gorontalo, 17 Agustus 2018

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar vii

Bab I Pendahuluan 1
A. Pembangunan Wilayah Perdesaan 1
B. Dimensi Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Kawasan 2
C. Kerjasama Antar Daerah 4

Bab II Tinjauan Pustaka Ekonomi Wilayah 9
A. Konsep Wilayah Sebagai Representase Ruang 9
B. Teori Ekonomi Basis Dan Perubahan Struktural 13
C. Teori Perubahan Struktural 14

Bab III Sekilas Tentang Kerjasama Utara-Utara 21
A. Latar Belakang Kerjasama Utara-Utara 21
B. Tinjauan Ekonomi Wilayah dan Kondisi Geografis Kerjasama Utara-Utara 24
C. Kondisi Demografis 29
D. Potensi Kabupaten Dalam Badan Kerjasama Utara-Utara 34
E. Analisis Location Quotient 54
F. Deskripsi Hasil Analisis Location Quotient 55
G. Analisis Shift Share 58

Bab IV Studi Kelayakan Pengembangan Sapi Potong 61
A. Latar Belakang Masalah 61
B. Metode Penelitian 63
C. Metode Analisis 69
D. Pengembangan Kawasan Peternakan 72
E. Kesimpulan Dan Saran 93

Bab V Pembuatan Mini Ranch Pengembangan Sapi Potong Kawasan Kerjasama Utara-Utara 95

Bab VI Tinjauan Kebijakan Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi 117

Daftar Pustaka 129

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Makro Ekonomi 4 daerah Kerjasama Utara-Utara 23

Tabel 2. Distribusi Kependudukan pada Kabupaten dalam Badan Kerja Sama Utara Utara (BKSU) 30

Tabel 3. Potensi Tanaman Pangan pada Kabupaten dalam Badan Kerja Sama Utara Utara (BKSU) 35

Tabel 4. Potensi Perkebunan pada Kabupaten dalam Badan Kerja Sama Utara Utara (BKSU) 40

Tabel 5. Potensi Peternakan pada Kabupaten dalam Badan Kerja Sama Utara Utara (BKSU) 46

Tabel 6. Potensi Perikanan pada Kabupaten dalam Badan Kerja Sama Utara Utara (BKSU) 50

Tabel 7. Nilai LQ Rata-Rata Sektor Ekonomi Wilayah Kerjasama Utara-Utara Tahun 2010-2015 56

Tabel 8. Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi Wilayah Kerjasama Utara-Utara tahun 2010-2105 59

Tabel 9. Kriteria Status Daya Dukung Hijauan Berdasarkan Indeks Daya Dukung 66

Tabel 10. Daya Dukung Makanan dan Prediksi Sapi Potong BKSU 76

Tabel 11. Proyeksi Jumlah Ternak Sapi Potong BKSU 2028-2028 Pola Peternakan Rakyat 78

Tabel 12. Proyeksi Jumlah Ternak Sapi Potong BKSU 2028-2028 Pola Peternakan Intensif 78

Tabel 13. Jumlah Kelompok dan Peternak Sapi di Kawasam Kerjasama Utara-Utara 89

Daftar Gambar

Gambar 1. Model Fei-Ranis Tentang Transfer Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Industri 17

Gambar 2. Mini Ranch Pengembangan Sapi Potong Kab. Buol 100

Gambar 3. Peta Arahan Mini Ranch Kawasan Pertanian Terpadu Bone Bolango 104

Gambar 4.Peta Tata Letak Mini Ranch Kawasan Arahan Pertanian Terpadu 105

Gambar 5. Peta Tata Letak Kawasan Arahan Pertanian Terpadu..... 106

Gambar 6. Lokasi Ranch Pengembangan Sapi Potong Kabupaten Gorontalo Utara 112

Gambar 7. Lokasi Mini Ranch Pengembangan Sapi Potong Bolaang Mongondow Utara 113

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pembangunan Wilayah Perdesaan

Membangun dari pinggiran menjadi wacana terpenting dalam pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla terutama setelah dimasukkannya konsep ini dalam Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program perioritas tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan meingkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan.

Perhatian pemerintah tentang pentingnya membangun perdesaan menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memperbaiki ketimpangan pembangunan Secara kasat mata masih terlihat ketimpangan pembangunan di masyarakat, antara suatu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, antara desa dan kota, bahkan antara kawasan yaitu Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia belum terselesaikan.

Atas dasar hal tersebut, maka Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang pembangunan kawasan perdesaan merupakan bagian dari upaya mendekatkan ketimpangan pembangunan yang relatif besar antara desa dan kota. Dalam kaitan ini pembangunan kawasan merupakan jawaban atas kegagalan pembangunan pusat pertumbuhan yang diharapkan menetes ke bawah (*tricle down effect*). Dalam beberapa dekade pembangunan yang terjadi adalah

pembangunan pusat-pusat pertumbuhan hanya memperbesar jurang antara pusat pertumbuhan dengan *hinter land*nya (daerah penyanggah). Paling tidak ada gejala pusat pertumbuhan semakin maju dengan segala fasilitasnya sedangkan daerah penyanggah menikmati bagian sedikit dari berkah pembangunan di pusat pertumbuhan. Gejala ini menuju pada pelestarian pusat pertumbuhan selalu lebih unggul dari daerah penyanggah termasuk fasilitas infrastruktur yang dimiliki. Kondisi ini lebih diperparah dengan uporia dari negara bila masuk dalam kancah persaingan internasional. Kita bisa menyaksikan kota-kota metropolitan semakin diperkaya infrastruktur penunjang juga pelayanan publik demi bersaing dengan negara lain sementara wilayah sekitarnya dibiarkan perkembangannya tertatih-tatih.

Dalam menciptakan negara nasional yang kuat, maka pembangunan yang seimbang antara kota dan desa sangat dibutuhkan dalam memperkuat ketahanan nasional. Apabila kedua kawasan ini maju bersama dan saling menunjang, maka dapat menangkal isu-isu politis yang bertendensi memecah belah persatuan dan kesatuan, dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara desa dan kota, dapat mengurangi angka kemiskinan serta dapat menciptakan daya saing. Penciptaan daya saing amat penting agar kita memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif terhadap barang dan jasa yang kita hasilkan. Penentuan daya saing tidak hanya dari sisi kepemilikan sumber daya alam tetapi yang lebih penting adalah sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai bidang. Sumber daya manusia ini tersebar di seluruh pelosok tanah air termasuk sampai ke pedesaan. Oleh karena itu pembangunan kawasan amat dipentingkan agar tercipta keseimbangan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki.

B. Dimensi Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Kawasan

Menurut Rahardjo Adisasmita (2010:29), bahwa umumnya perencanaan pembangunan berorientasi sektoral dan cenderung melupakan pendekatan kawasan. Hal tersebut disebabkan oleh pemikiran Mazhab Klasik yang dipelopori Adam Smith kurang memberi perhatian terhadap masalah kawasan

dalam perencanaan pembangunan. Pemikiran mereka bersifat statis dan universal. Mazhab Historis yang dipelopori oleh Fried List mengeritik hal ini bahwa pentingnya analisis kawasan perlu menjadi perhatian karena masalah yang dihadapi masing-masing daerah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pemikiran mazhab historis telah melahirkan pengkawasan wilayah berdasarkan lokasi-lokasi yang strategis untuk dikembangkan. Dari sinilah muncul kawasan pengembangan berbasis kawasan produk misalnya kawasan hutan, kawasan pertambangan, kawasan pesisir laut, kawasan industri, kawasan perkotaan dan pedesaan, kawasan budidaya. Pemikiran pengembangan kawasan kerjasama utara-utara yang fokus pada pengembangan sapi potong merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan dan merupakan upaya nyata dalam mendukung daerah ini sebagai kawasan strategis nasional perbatasan negara sebagaimana kesepakatan tiga Gubernur di wilayah ini yaitu Gubernur Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara tahun 2014. Berhubung kawasan yang disebutkan di atas lebih banyak di pedesaan maka Sugeng Budiharsono (2018:2) menyebut wilayah perdesaan menjadi pilar pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai pilar pembangunan, maka perdesaan memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berdimensi pemerataan, berdaya saing dan berkeadilan. Untuk mewujudkan hal ini perlu ada komitmen pemerintah secara berkelanjutan dan memperhatikan beberapa prinsip dalam alokasi pembangunan secara spasial /wilayah (Raharjo Adisasmita: 30), yaitu:

1. Kesesuaian (Suitability)

   Perlunya keserasian antara kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan baik secara ekonomi, sosial. Lingkungan dan aspek-aspek lainnya

2. Keseimbangan Sumberdya Alam dan Lingkungan Hidup The Continuity Of Natural Resources and Enviromental).

   Perlunya memperhatikan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam pembangunan

3. Demokratisasi Alokasi Spasial (Ruang)

   Perlunya pelibatan masyarakat dalam perencanaan serta pemafaatan ruang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Sinergi Regional (Regional Synergy)

   Adaya sinergi wilayah yang saling terkait dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan.

C. Kerjasama Antar Daerah

Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur dalam kerjasama tersebut harus ada dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu obyek. Adanya unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kelompok kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk pemenuhan kepentingan masing- masing pihak secara bersama-sama tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kerjasama. Sehingga sebuah interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan harus ada keseimbangan (*equity*), artinya kalau interaksi hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu atau sebagian pihak dan ada pihak yang dirugikan dalam interaksi tersebut maka hubungan yang terjadi tidak masuk dalam kriteria kerjasama. Prinsipnya kerjasama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, selaras, dan serasi, karena interaksi yang terjadi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan, namun saling menguntungkan, saling membantu dan saling memperkuat.

Dengan melakukan kerjasama antar daerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Beberapa diantaranya adalah:

1. Manajemen konflik antar daerah, dimana kerjasama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar aktor utama daerah. Dengan adanya forum seperti ini, maka dapat meningkatkan pemahaman permasalahan antar daerah dan meningkatkan toleransi antar daerah

sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi. Seringkali konflik misalnya muncul karena adanya tarik menarik tentang tapal batas, pegelolaan sumber daya dan lain-lain.

2. Efisiensi dan Standarisasi Pelayanan, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama. Aksi bersama ini dalam konteks saling mendukung antara satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pelayanan publik, kerjasama antar daerah sangat mendukung daerah untuk menerapkan efisiensi dan standarisasi pelayanan antar daerah. Hal ini tentu saja akan sangat mendukung pelayanan publik di daerah melalui saling tukar informasi antara sesama anggota dalam kerjasama.
3. Pengembangan Ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah dan akan mengakibatkan spread effect (efek penyebaran pembangunan yang saling mengisi). Hal ini disebabkan karena logika pengembangan ekonomi tidak selalu sama dengan logika penguasaan wilayah-administratif. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah tidak bisa maksimal karena wilayah yang mencakup beberapa teritori daerah apalagi kalau teritori yang dimaksud sudah melewati beberapa provinsi. Apabila tidak ada kerjasama antar daerah, maka perkembangan wilayah menjadi tidak maksimal. Dengan demikian, kerjasama antar daerah juga dapat mendorong terjadinya pengembangan ekonomi daerah.
4. Pengelolaan Lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Sama dengan poin sebelumnya, wilayah pelestarian lingkungan juga tidak selalu sama dengan teritori-adminsitrasi. Tanpa adanya kerjasama antar daerah, penanganan lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak saja bagi daerah tersebut, tapi juga bagi daerah yang lain di sekitarnya, seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor.

Selain itu, kerjasama kerjasama antar daerah juga sangat bermanfaat bagi daerah karena adanya:

1. Sharing of Experiences

   Dengan kerjasama, maka daerah akan dapat berbagi pengalaman dengan daerah lain sehingga suatu daerah tidak perlu mengalami apa yang mungkin menjadi kesalahan yang pernah dilakukan oleh daerah lain. Pengalaman daerah lain dalam menjalankan sebuah kebijakan menjadi acuan untuk bertindak bagi suatu daerah dengan mempelajari apa yang menjadi hambatan ataupun yang menjadi pendorong keberhasilan sebuah kebijakan di suatu daerah. Demikian juga inovasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dapat ditularkan dari daerah satu ke daerah lainnya.

2. Sharing of Benefits

   Dengan kerjasama, maka daerah dapat saling berbagi keuntungan. Pengelolaan bersama pada potensi daerah akan menghasilkan keuntungan dan manfaat yang dapat dirasakan bersama sehingga daerah dapat merasakan manfaat secara adil dan merata dari pengelolaan yang dilakukan. Tiap daerah akan merasa diuntungkan dari dilakukannya kerjasama dan tidak ada yang dirugikan.

3. Sharing of Burdens

   Dengan kerjasama, maka daerah dapat bersama-sama menanggung biaya secara proposional dan tidak ada daerah yang terbebani. Dengan kata lain, anggaran pengelolaan dan penyediaan prasarana yang besar dapat ditanggung bersama sehingga tidak terlalu membebani keuangan dari daerah tertentu dan secara bersama-sama akan memanfaatkan anggaran secara berdaya guna.

   Kerjasama daerah dalam kerangka *inter governmental network* (hubungan antar pemerintahan) juga sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah bersama dan pertukaran informasi antar daerah, mengidentifikasi dan pertukaran tehnologi atau sumberdaya yang ada di masing-masing

daerah, peningkatan kapasitas daerah, pembuatan strategi atau program bersama antar daerah, dan bahkan bagi pembuatan kebijakan bersama. Selain itu, kerjasama daerah seperti ini juga sejalan dengan prinsip governance karena menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan.

Sedangkan beberapa basis bagi pengembangan kerjasama antar daerah adalah:

1. Basis ketetanggaan secara geografis, karena daerah yang secara geografis bertetangga, cenderung mempunyai potensi konflik tinggi sekaligus memiliki potensi kepentingan bersama yang tinggi pula. Dengan demikian, kedekatan secara geografis daerah dapat menjadi basis kerjasama apalagi basis ketetanggan ini diperkuat dengan kesamaan dalam kultur dan budaya serta historis.
2. Basis kesetaraan potensi, karena daerah-daerah ternyata memiliki potensi sama, seperti pariwisata, potensi laut dan sebagainya, juga mungkin mempunyai permasalahan yang hampir sama dan cenderung berkompetisi secara ketat. Dengan membangun kerjasama, daerah dapat melakukan negosiasi secara kuat menghadapi aktor lain, baik dari pemerintah pusat, maupun aktor swasta. Dalam hal ini motto merobah tantangan menjadi peluang perlu selalu dikedepankan.
3. Basis kesetaraan permasalahan, karena biasanya kerjasama juga dilandasi dari adanya permasalahan yang serupa yang dihadapi daerah otonom, seperti adanya trauma konflik sosial dan kekerasan di daerah rentan konflik. Kesetaraan ini diperkuat dengan adanya homoginitas dalam potensi, sosial dan budaya. Bisa juga karena adanya persamaan permasalahan yang berasal dari kondisi alam, seperti kebakaran hutan, banjir, longsor dan sebagainya. Kerjasama bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan tidak bisa diatasi daerah snediri tanpa harus melibatkan daerah lain yang mempunyai persamaan serupa dengan melakukan sharing pengalaman penanganan.

Sebagai implikasi dari kerjasama yang didasarkan pada konsensus, bentuk kerjasama perlu bersifat flexibel, sehingga peluang perubahan selalu terbuka dalam perjalanan kerjasama. Namun demikian, fleksibilitas ini harus tetap mengedepankan kepatuhan kepada kesepakatan dan keberlanjutan kerjasama. Selalu mengedepankan kepentingan bersama lebih diutamakan. Oleh karena itu, format kerjasama perlu dikembangkan secara bertahap, learning by doing, sebagai bentuk daya tanggap terhadap perubahan keadaan. Tingkat adaptasi yang tinggi terhadap keadaan lapangan ini pada gilirannya menuntut format kelembagaan kerjasama yang terbuka bagi variasi antar sektor. Perlu dimungkinkan bentuk kelembagaan yang berbeda terhadap karakter sektor yang berbeda.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA EKONOMI WILAYAH

Dalam perkembangan dunia yang semakin kompetitif konsep pembangunan berbasis wilayah tidak bisa dibaikan bahkan saat ini semakin mendapat perhatian tidak saja dari kalangan akademisi, tapi juga oleh kalangan praktisi dan pemegang kebijakan. Pendekatan wilayah dipandang lebih realistis terutama dikaitkan dengan pemerataan pembangunan, penciptaan daya saing dan efektifitas dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini akan diuraikan beberapa pandangan para ahli yang memandang pengembangan ekonomi wilayah dari sudut pandang masing-masing.

A. Konsep Wilayah Sebagai Representase Ruang

Perhatian terhadap wilayah sebagai representase ruang akan memudahkan dalam menganalis wilayah dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi, sosial maupun administrasi pemerintahan yang tergantung juga pada tujuan yang hendak dicapai. Menurut Syafrizal (2012) pembagian wilayah dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Wilayah Homogen

Wilayah homogen merupakan kesatuan wilayah yang dibentuk dengan memperhatikan kesamaan karakteristik sosial ekonomi dalam wilayah yang bersangkutan. Yang termasuk dalam wilayah seperti ini antara lain adalah provinsi, kota, kabupaten dan desa. Sedangkan untuk tingkat internasional termasuk dalam wilayah ini adalah kesatuan beberapa negara ASEAN, MEE, NAFTA dan lain-lain.

2. Wilayah Nodal

Wilayah Nodal merupakan kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan keterkaitan sosial ekonomi yang erat antar daerah. Keterkaitan ini menjadi penting karena dapat mendorong terbentuknya kesatuan yang erat antara beberapa daerah atau negara terkait. Termasuk dalam wilayah seperti ini adalah JABODETABEK (Kesatuan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). SIJORI (Singapura, Johor, Riau), dan Kerjasama Utara-Utara (Kabupaten Gorontalo Utara, Bone Bolango, Buol dan Bolaang Mongondow Utara).

3. Wilayah Planning

Wilayah Planning merupakan kesatuan wilayah yang dibentuk untuk tujuan perencanaan pembangunan wilayah. Yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah wilayah pembangunan (*development region*) dalam formulasi perencanaan pembangunan baik pada tingkat nasional maupun provinsi atau kabupaten dan kota sebagaimana umumnya terlihat pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) atau Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

4. Wilayah Administratif

Wilayah administrtaif merupakan kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan. Yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Tidak dapat disangkal bahwa adakalanya pengelompokkan wilayah administrasi ini sama dengan wilayah homogen khususnya dalam penentuan wilayah provinsi atau kota.

Berkaitan dengan klasifikasi tersebut, fase kemajuan perekonomian region/wilayah diklasifikasikan menjadi: (1) fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/*homogenitas.* Wilayah formal merupakan suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu,

seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik, (2) fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau *polarized region* dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.(3) fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang memiliki keterkaitan secara fungsional antar satu bagian dengan bagian lainnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional (tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah suatu kesatuan wilayah yang ditujukan untuk tujuan pengembangan/pembangunan/*development.* Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan. Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.

Perencanaan wilayah adalah suatu kegiatan dalam memanfaatkan suatu sumberdaya yang terbatas dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan mendapatkan manfaat secara maksimal. Dalam sejarah perkembangan konsep pengembangan wilayah di Indonesia, terdapat beberapa landasan teori yang turut mewarnai keberadaannya. Pertama adalah Walter Isard sebagai pelopor Ilmu Wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan sebab-akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial-ekonomi, dan budaya. Kedua adalah Hirschmann (era 1950-an) yang memunculkan teori *polarization effect* dan *trickling-down effect* dengan argumen bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (*unbalanced development*). Ketiga adalah Myrdal (era 1950-an) dengan teori

yang menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan menggunakan istilah *backwash and spread effect*. Keempat adalah Friedmann (era 1960-an) yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Terakhir adalah Douglass (era 70-an) yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa – kota (*rural – urban linkages*) dalam pengembangan wilayah (Rustiadi dan Panuju, 2005).

Keberadaan landasan teori dan konsep pengembangan wilayah diatas kemudian diperkaya dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran cemerlang putra-putra bangsa. Diantaranya adalah Sutami (era 1970-an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota.

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistim pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2005). Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas.

Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2005) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah:

1. Sebagai *growth center* Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.

2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.
3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.
4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

B. Teori Ekonomi Basis dan Perubahan Struktural

1. Teori Ekonomi Basis

Terminologi perekonomian wilayah membagi perekonomian atas ekonomi basis dan ekonomi non basis. Ekonomi basis memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya sebagai hinterland dan ekonomi basis cenderung memiliki daya dorong kuat terhadap perekonomian di sekitarnya. Menurut Sugeng Budiharsono (1989) inti dari model ekonomi basis ditentukan oleh ekspor yang menjadi pendorong dalam ekonomi basis. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa termasuk tenaga kerja. Sementara itu (Suyatno 2000:146) lebih lanjut menjelaskan bahwa pertumbuhan industry-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah yang ingin maju harus dapat mengembangkan ekspor sebagai pendorong ekonominya. Pandangan ini masih sejalan dengan pandangan para merkantalis pada abd ke 16 yang memandang bahwa negara nasional yang kuat akan terjadi apabila negara yang bersangkutan dapat mengembangkan ekspor. Jadi dengan demikian konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa di luar.

Selanjutnya Tarigan menayatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya penigkatan ekspor dari wilayah tersebut (Tarigan,2005). Teori basis ini digolongkan kedalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis.Sektor basis yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar di daerah tersebut maupun luar daerah. Secara tidak langsung daerah mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain.Sektor non basis adalah sektor yang menyediahkan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian tersebut. Berdasarkan atas pandangan di atas, maka sektor basis perlu dikembangkan dalam rangka memaacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Inti dari teori ini adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Sektor basis dan non basis ekonomi suatu wilayah dapat diketahui dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan cara membanding perannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional (Emilia, 2006).

C. Teori Perubahan Struktural

Perubahan struktur dalam perekonomian menggambarkan pergesaran dari peran sektoral suatu sektor ke arah yang memiliki daya saing tinggi khususnya dalam menghasilkan nilai tambah dan penyerapan angkatan kerja. Teori perubahan struktural menitikberatkan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dan sangat di dominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro dalam Mudrajad Kuncoro, 1997). Salah satu teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi perubahan struktur ekonomi adalah dengan menggunakan analisa shift share dimana menggambarkan perubahan struktur ekonomi daerah relative terhadap struktur ekonomi wilayah administrative yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Selanjutnya untuk melihat keberlanjutan produk unggulan dan perubahan struktur yaitu dengan

menganalisis kelayakan produk unggulan untuk dikelola lebih lanjut terlebih lagi apabila menjadi komoditi yang dikerjasamakan.

Jadi secara garis besar teori perubahan struktural menitikberatkan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dan sangat di dominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro, 1999). Berikut ini ada beberapa pandangan perubahan struktural beradasarkan teori dari beberapa ahli.

1. Teori Fei-Ranis (Ranis and Fei)

Dalam model Fei-Ranis menggambarkan konsep yang berkaitan dengan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Tahapan transfer tenaga kerja dibagi menjadi tiga tahapan berdasarkan pada produk fisik marginal (MPP) dan upah yang dianggap konstan dan ditetapkan secara eksogenus, sebagai berikut :

a. Pada tahap pertama, karena tenaga kerja melimpah maka MPP tenaga kerja sama dengan atau mendekati nol sehingga surplus tenaga kerja yang ditransfer dari sektor pertanian ke sektor industri mempunyai kurva penawaran yang elastis sempurna. Pada tahap ini walaupun ada transfer tenaga kerja, total produksi di sektor pertanian tidak menurun, produktivitas tenaga kerja meningkat dan sektor industri dapat tumbuh karena didukung oleh adanya tambahan tenaga kerja yang disediakan sektor pertanian. Dengan demikian, transfer tenaga kerja menguntungkan kedua sektor ekonomi.

b. Pada tahap kedua, pengurangan satu satuan tenaga kerja di sektor pertanian akan menurunkan produksi karena MPP tenaga kerja sudah positif (ruas AB) namun besarnya MPP masih lebih kecil dari tingkat upah W. Transfer tenaga kerja dari pertanian ke industri pada tahap ini mempunyai biaya seimbang yang positif, sehingga kurva penawaran tenaga kerja di sektor industri mempunyai

elastisitas positif sejak titik S_1. Transfer akan tetap terjadi, produsen disektor pertanian akan melepaskan tenaga kerjanya walaupun mengakibatkan produksi menurun karena penurunan tersebut lebih rendah dari besarnya upah yang tidak jadi dibayarkan. Di pihak lain, karena surplus produksi yang ditawarkan ke sektor industri menurun sementara permintaannya meningkat (karena tambahan tenaga kerja masuk), harga relative komoditi pertanian akan meningkat. Tahap ketiga adalah tahap komersialisasi di kedua sektor ekonomi, dimana MPP tenaga kerja sudah lebih tinggi dari tingkat upah. Produsen pertanian akan mempertahankan tenaga kerjanya sehingga masing-masing sektor berusaha efisien. Transfer masih akan terus terjadi jika inovasi teknologi di sektor pertanian dapat menigkatkan MPP tenaga kerja. Sementara permintaan tenaga kerja terus meningkat dari sektor industri dengan asumsi keuntungan di sektor ini diinvestasikan kembali untuk memperluas usaha.

Mekanismenya diringkas pada Gambar

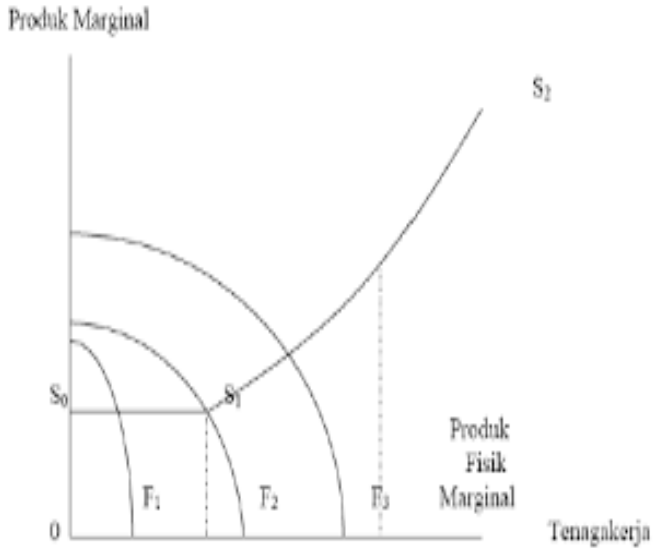

a. Sektor Industri

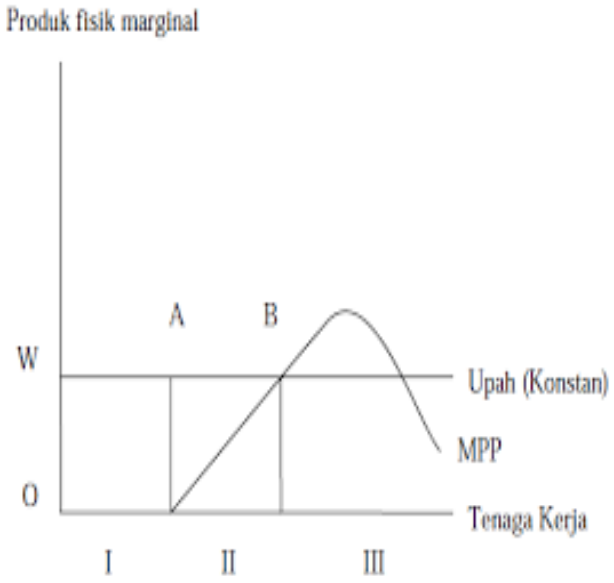

b. Sektor Pertanian

Gambar 1. Model Fei-Ranis tentang transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri

Dalam model FR ini kecepatan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri tergantung pada: (a) tingkat pertumbuhan penduduk, (b) perkembangan teknologi di sektor pertanian dan (c) tingkat pertumbuhan stok modal di sektor.

2. Teori W. Arthur Lewis

Transformasi struktural suatu perekonomian subsisten di rumuskan oleh seorang ekonom besar yaitu W. Arthur Lewis. Dengan teorinya model dua sektor Lewis antara lain :

a. Perekonomian Tradisional

Dalam teori ini Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisional mengalami surplus tenaga kerja. Perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten, hal ini di akibatkan kelebihan penduduk dan di tandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja

sama dengan nol. Ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja (*surplus labor*) sebagai suatu fakta bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut di tarik dari sektor pertanian, maka sektor itu tidak akan kehilangan outputnya.

b. Perekonomian Industri

Pada perekonomian ini terletak pada perkotaan modern yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang di transfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Dengan demikian perekonomian perkotaan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan sehingga penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang di produksi. Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan (*self-sustaining growth*) dan perluasan kesempatan kerja di sektor modern tersebut di atas diasumsikan akan terus berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja pedesaan diserap habis oleh sektor industri. Selanjutnya, tenaga kerja tambahan berikutnya hanya dapat di tarik dari sektor pertanian dengan biaya yang lebih tinggi karena hal tersebut akan mengakibatkan merosotnya produksi pangan. Transformasi struktural perekonomian dengan sendirinya akan menjadi suatu kenyataan dan perekonomian itu pun pada akhirnya pasti beralih dari perekonomian pertanian tradisional yang berpusat di pedesaan menjadi sebuah perekonomian industri modern yang berorientasi kepada pola kehidupan perkotaan.

3. Teori Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* menjelaskan perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi dari negara berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan peran sektor industri

dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang berhubungan sangat erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumber daya (*Human Capital*).

a. Dilihat dari Permintaan Domestik

   Apabila dilihat dari permintaan domestik akan terjadi penurunan permintaan terhadap konsumsi bahan makanan karena dikompensasikan oleh peningkatan permintaan terhadap barang-barang non kebutuhan pangan, peningkatan investasi, dan peningkatan anggaran belanja pemerintah yang mengalami peningkatan dalam struktur GNP yang ada. Di sektor perdagangan internasional terjadi juga perubahan yaitu peningkatan nilai ekspor dan impor. Sepanjang perubahan struktural ini berlangsung terjadi peningkatan pangsa ekspor komoditas hasil produksi sektor industri dan penurunan pangsa sektor yang sama pada sisi impor.

b. Dilihat dari Tenaga Kerja

   Apabila dilihat dari sisi tenaga kerja ini akan terjadi proses perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian di desa menuju sektor industri di perkotaan, meski pergeseran ini masih tertinggal (*lag*) dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan *lag* inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik dari awal maupun akhir dari proses tranformasi perubahan struktural tersebut.

Secara umum negara-negara yang memiliki tingkat populasi tinggi yang pada dasarnya menggambarkan tingkat permintaan potensial yang tinggi, cenderung untuk mendirikan industri yang bersifat substitusi impor. Artinya mereka memproduksi sendiri barang-barang yang dulunya impor untuk kemudian dijual di pasaran dalam negeri. Sebaliknya negara-negara dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, cenderung akan mengembangkan industri yang berorientasi ke pasar internasional.

BAB III
SEKILAS TENTANG KERJASAMA UTARA-UTARA

A. Latar Belakang Kerjasama Utara-Utara

Kerjasama Utara-Utara awalnya merupakan kerjasama 3 daerah di bagian utara Sulawesi yang meliputi 3 kabupaten yang terletak pada 3 Provinsi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorotanlo, Kabupaten Buol Provinsi Sulwesi Tengah, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara yang difasilitasi oleh Universitas Negeri Gorontalo. Melalui pertemuan Den Haag Belanda pada tanggal 10 Mei 2017 para Bupati dari ketiga daerah kerjasama utara-utara dan Rektor Universitas Negeri Gorontalo sepakat menerima Kabupaten Bone Bolango menjadi anggota baru. Tujuan dari pembentukan kerjasama utara-utara adalah agar ketiga daerah ini menjadi kawasan yang cepat tumbuh dan menjadi prime mover bagi daerah sekitarnya. Tampilnya Perguruan Tinggi menjadi inisiator kerjasama bisa dipahami dalam konteks perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Pada Masyarakat sehingga eksistensi Perguruan Tinggi tidak hanya menjadi agen of knowledge namun juga mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk kemitraan dengan daerah dalam memberikan masukan, ide bahkan inisiator dari suatu agen perubahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah terbentuknya Kerjasama Utara-Utara didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga; dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Kerjasama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela.

Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Dalam melaksanakan kerjasama wajib, daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama yang bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah dan pendanaan sekretariat kerjasama dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerjasama wajib antar daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Kerjasama Utara-Utara selain dilandaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 juga didasarkan pada kesepakatan 3 Gubernur yaitu Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2014 yang pada dasarnya menghendaki agar kawasan utara Sulawesi menjadi kawasan strategis nasional bidang perbatasan negara. Selain daripada itu kerjasama dimaksud juga didasarkan pada PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Sebagai perwujudan dari kesepakatan tersebut, maka dibentuklah Kerjasama Utara-Utara yang difasilitasi Universitas Negeri Gorontalo dimana penandatanganan MOU oleh Bupati Gorontalo Utara, Bupati Buol, dan Bupati Bolaang mongondow Utara serta Rektor Universitas Negeri Gorontalo telah dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya kerjasama ini diperluas melalui nota kesepahaman masing-masing pihak dengan nomor masing-masing daerah tertanggal 8 Juni 2017.

Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah ingin mengisi sasaran kawasan strategis nasional perbatasan negara dengan kegiatan pemberdayaan, pengembangan produk dan industri dalam rangka mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan dan energi. Berdasarkan kesepakatan komoditi unggulan yang dikembangkan di kawasan kerjasama utara-

utara adalah pengembangan sapi potong, budidaya udang vaname dan pengembangan pariwisata. Khusus untuk pengembangan sapi potong telah mendapat perhatian dari Departemen Pertanian Republik Indonesia yang mencanangkan pengembangangan sapi potong di daerah ini dengan target 1juta ekor dalam 10 tahun ke depan. Pengembangan udang vaname dan pariwisata saat ini masih dalam tahap persiapan dengan melakukan berbagai inovasi produk dan membuka jejaring dengan daerah sekitarnya.

Berikut ini disajikan indikator makro ekonomi 4 daerah yang menjadi *entry point* pengembangan Kawasan Kerjasama Utara-Utara. Adapun indikator makro ekonomi 4 daerah Kerjasama Utara-Utara tersaji dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Indikator Makro Ekonomi 4 daerah Kerjasama Utara-Utara

No.	Keterangan	Kab. Gorontalo Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Kab. Buol	Kab. Bone Bolango
1	Luas Wilayah (KM^2)	1.777,03	1.856,86	4.043,57	1.984,58
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,75	7,13	8,57	6,61
3	Penduduk (Jiwa)	109.052	75.290	142.585	159.673
4	Penduduk Miskin (%)	19,16	9,32	15,06	18,49
5	IPM	69,37	64	70,75	67.48
6	PDRB AHK (Rp)	2.650 M	1.253,61 M	3.120 M	2.601 M

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Dari data di atas menunjukkan bahwa keempat daerah secara geografis letaknya sangat berdekatan dengan luas wilayah yang bervariasi, tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun memiliki angka kemiskinan cukup tinggi serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif rendah. Gambaran angka kemiskinan cukup tinggi, IPM relatif rendah menunjukkan pengelolaam potensi pada keempat daerah belum maksimal dan selama ini kebijakan ekonomi dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing kabupaten, sehingga melalui kerjasama keempat daerah diharapkan akan saling mendukung dalam mensukseskan program pembangunan bersama. Keempat daerah memiliki potensi dalam bidang pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan, pariwisata, kehutanan, dan pertambangan sehingga memungkinkan untuk melakukan kerjasama antar 4 daerah dalam mengelola sumberdaya alam yang dimiliki dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan saling memperkuat.

Untuk memperkuat sasaran kerjasama dari keempat daerah, maka penelitian ini dipandang penting khususnya dalam mengidentifikasi potensi unggulan masing-masing daerah yang menjadi basis ekonomi (*economy bases*) yang akan dikembangkan dalam jangka panjang untuk menunjang kerjasama yang saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung antara keempat daerah juga melakukan studi mendalam tentang kelayakan pengembangan peternakan sapi potong untuk mencapai 1 juta ekor di kawasan ini.

B. Tinjauan Ekonomi Wilayah dan Kondisi Geografis Kerjasama Utara-Utara

1. Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Gorontalo dengan luas yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo Utara sekitar 1.777,03 km2, letak geografis 0° 30’ – 1° 02′ LU dan 121° 59′ - 123° 02′ BT. Batas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara adalah:

a. Sebelah Utara
   Berbatasan dengan Laut Sulawesi
b. Sebelah Timur
   Berbatasan dengan Kabupaten Bolmong Utara, Sulawesi Utara
c. Sebelah Selatan
   Berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.
d. Sebelah Barat
   Berbatasan dengan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah

Secara administratif, Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari 11 wilayah Kecamatan dan 123 desa dengan jumlah penduduk 111.824 jiwa (Profil Kabupaten Gorontalo Utara, 2017). Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara di bagian utara dibatasi oleh Laut Sulawesi, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Bolmong, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo dan Pohuwato dan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Buol (Gorontalo Utara dalam angka, 2017).

Akhir tahun 2016, wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari 11 wilayah kecamatan, luas masing-masing kecamatan, yaitu: Atinggola (264,548 km^2), Gentuma Raya (100,336 km^2), Kwandang (190,753 km^2), Tomilito (99,312 km^2), Ponelo Kepulauan (7,832 km^2), Anggrek (141,507 km^2), Monano (144,015 km^2), Sumalata (305,59 km^2), Sumalata Timur (197,549 km^2), Tolinggula (213,891 km^2) serta Biau (111,689 km^2).

Kabupaten Gorontalo Utara memiliki perekonomian yang terdiversifikasi dalam beberapa sektor yaitu: sektor pertanian dan perkebunan, sektor peternakan, serta sektor perikanan dan kelautan. Sektor perikanan dan kelautan dijadikan sektor unggulan, karena semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki daerah pesisir yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memandang penting menyediakan sarana dan prasarana dalam membangun suatu daerah.

Dalam menunjang pembangunan wilayah khususnya sumberdaya kelautan dan perikanan, maka jaringan perhubungan dan transportasi yang tersedia memungkinkan Kabupaten Gorontalo Utara berkembang mengikuti daerah-daerah lain di Provinsi Gorontalo. Pemerintah juga mendukung perekonomian daerah khususnya dalam hal meningkatkan interaksi dan jalur akses pasar antar pelaku ekonomi yang akhirnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah

Kabupaten Buol merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Dalam peta Pulau Sulawesi, Kabupaten Buol nampak memanjang dari timur ke barat, terletak di sebelah utara garis khatulistiwa dalam koordinat 0,35° - 1,20° Lintang Utara dan antara 120° - 122,09° Bujur Timur, serta mempunyai batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: Laut Sulawesi
b. Sebelah Timur: Kabupaten Gorontalo Utara
c. Sebelah Selatan: Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Parigi Moutong.
d. Sebelah Barat: Kabupaten Tolitoli

Kabupaten Buol adalah merupakan singkatan dari sebuah nama batas-batas wilayah Kabupaten Buol yaitu antara Kabupaten Gorontalo di sebelah Timur, dan Kabupaten Toli-toli di sebelah Barat. Karena Buol mempunyai nama Desa Umu yang terletak di sebelah Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo, Kemudian Buol juga mempunya nama desa Lakuan yang terletak di sebelah Barat sekaligus berbatasan langsung dengan Kabupaten Toli- Toli, maka dari itu Buol dikenal sebagai Bujur Umu Ordinat Lakuan. Istilah ini muncul dalam fikiran masyarakat untuk menunjukan batas-batas wilayah Kabupaten Buol dari timur ke barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 39 tahun 2016, luas daratan Kabupaten Buol adalah 4.043,57 km^2. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tiloan (40,6 persen) dan terkecil adalah Kecamatan Biau (1,73 persen). Kabupaten Buol mempunyai luas wilayah ± 4.043, 57 Km^2, dan memiliki 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Paleleh, Paleleh Barat, Gadung, Bunobogu, Bokat, Bukal, Biau, Momunu, Tiloan, Karamat, dan Lakea.

Wilayah administrasi Kabupaten Buol terdiri dari 11 wilayah kecamatan, luas masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Paleleh sebesar 386,19 Km^2 (9,55%), Kecamatan Paleleh Barat 200,68 Km^2 (4,96%), Kecamatan Gadung 160,38 Km^2 (3,97%), Kecamatan Bunobogu 327,15 Km^2 (8,09%),

Kecamatan Bokat 196,10 Km² (4,85%) Kecamatan Bukal 355,52 Km² (8,79%), Kecamatan Biau 217,80 Km² (5,39%), Kecamatan Momunu 400,40 Km² (9,90%), Kecamatan Tiloan 1.437,70 Km² (35,55%), Kecamatan Karamat 153,10 Km² (3,79%) dan Kecamatan Lakea 208,55 Km² (5,16%).

3. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan terbentuknya daerah baru ini maka berbagai keinginan terutama untuk memajukan pembangunan daerah diharapkan akan lebih cepat terealisasi. Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari banyaknya pembangunan fisik yang dilakukan tetapi lebih dari itu, harus tersedianya berbagai pilihan untuk meningkatkan kesehjateraan bagi semua penduduk.

Luas wilayah Bolaang Mongondow Utara, adalah berupa daratan seluas 1.856,86 km^2. Akhir tahun 2016, wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 Kecamatan dan 117 desa/kelurahan. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Sangkub (567,85 Km^2), Bintauna (348,94 Km^2), Bolangitang Barat (293,75 Km^2), dan Pinogaluman (115,59 Km^2)

Sebagai daerah yang terletak di garis Khatulistiwa, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki batas-batas:

a. Utara : Laut Sulawesi;
b. Selatan : Kecamatan Posigadan, Kabupaten bolaang Mongondow Selatan;
c. Barat: Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
d. Timur : Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow.

Wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 wilayah kecamatan, luas masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan

Sangkub dengan luas 567,85 KM^2 atau sebesar 30,58% dari luas Kabupaten, Kecamatan Bintauna dengan luas 348,94 KM^2 atau sebesar 18,79%, Kecamatan Bolang Itang Timur dengan luas 445,64 KM^2 atau sebesar 24,00%, Kecamatan Bolang Itang Barat dengan luas 293,75 KM^2 atau sebesar 15,82%, Kecamatan Kaidipang dengan luas 85,09 KM^2 atau sebesar 4,58% dan Kecamatan Pinogaluman dengan luas 115,59 KM^2 atau sebesar 6,23%.

4. Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang baru berdiri pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Sejak awal terbentuknya Kabupaten Bone Bolango terbagi atas 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tapa, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa dan Kecamatan Bone Pantai. Secara keseluruhan luas wilayahnya adalah 1.984,58 km^2. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan tuntutan dari beberapa elemen masyarakat menyebabkan beberapa kecamatan induk melakukan pemekaran wilayah menjadi beberapa kecamatan baru sehingga saat ini Kabupaten Bone Bolango telah memiliki 18 kecamatan.

Secara spasial Kabupaten Bone Bolango berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara) di sebelah timur, disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Utara dan Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan Kecamatan Telaga (Kabupaten Gorontalo). Di sebelah utara adalah Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolang Mongondow Sulawesi Utara, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Secara geografis Kabupaten Bone Bolango terletak antara 0^{o}18' 25" –0^{o}48' 21" Lintang Utara (LU) dan 123^{o}03' 41"–123^{o}33' 06' Bujur Timur (BT) berada diatas garis Equator atau garis khatulistiwa.

Secara keseluruhan dari total jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Pinogu, Kecamatan Bulango Ulu, dan Suwawa Timur merupakan daerah tertinggi dengan ketinggian masing-masing 300 meter, 95 meter, dan 55 meter diatas permukaan laut dan terendah adalah

Kecamatan Bone Pantai, Bone, Bone Raya, dan Bulawa yaitu masing-masing 7 meter, 7 meter, 10 meter, dan 10 meter diatas permukaan laut.

Berdasarkan luas wilayah, dari 18 kecamatan di wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Pinogu memiliki luas wilayah terbesar, yakni seluas 361.40 Km^2 atau 18.21% dari total luas kabupaten Bone Bolango, kemudian di-ikuti oleh berturut-turut, Kecamatan Kabila dengan luas wilayah 193.45 Km^2 (9.75%), Kecamatan Suwawa Selatan dengan luas wilayah 184.09 Km^2 (9.28%), Kecamatan Bulango Utara dengan luas wilayah 176.10 Km^2 (8.87%) dan Kecamatan Bone Pantai dengan luas wilayah 161.82 Km^2 (8.15%) dan seterusnya. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Bulango Selatan dengan luas 9.87 Km2 (0.50%) dan Kecamatan Bulango Timur dengan luas 10.82 Km2 (0.55%)(BPS Bone Bolango, 2017).

Lokasi kecamatan yang paling jauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Bone yang terletak di pesisir pantai dengan jarak tempuh sebesar 90 km. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

C. Kondisi Demografis

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Kondisi demografis Kabupaten yang termasuk dalam Badan Kerja Sama Utara Utara terutama dalam hal kependudukan dapat disajikan berikut ini:

Tabel 2. Distribusi Kependudukan pada Kabupaten dalam Badan Kerja Sama Utara Utara (BKSU)

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (jiwa/ km)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Kabupaten Gorontalo Utara	109.502	110.700	111.824	61,62	62,29	62,93
Kabupaten Buol	145.889	149.004	152.296	36,08	36,85	37,66
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	75.290	76.331	77.380	40,55	41,11	41,67
Kabupaten Bone Bolango	151.094	158.550	153.679	9.87	80	63

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Berdasarkan hasil pada tabel 2 maka dapat dijelaskan aspek demografi atau kependudukan pada 3 daerah yakni Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Buol dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berikut ini:

1. Kabupaten Gorontalo Utara

Proyeksi penduduk Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2014 adalah 109.502 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan selama kurun waktu 2000-2010 sebesar 1,84 persen. Persebaran penduduk di 11 Kecamatan masih belum merata, terbesar pada Kecamatan Kwandang sebesar 24,89% sedangkan terendah di Kecamatan Ponelo Kepulauan sebesar 3,23%. Hal ini disebabkan karena Kwandang merupakan pusat Kabupaten dan Ponelo Kepulauan merupakan kecamatan yang baru terbentuk. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2013 rata-rata 61,62 jiwa per kilometer persegi

Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 110.700 jiwa yang terdiri atas 56.090 jiwa penduduk laki-laki dan 54.610 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Gorontalo Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,09 persen dengan masing-masing persentase

pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,06 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,13 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,71. Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk pada tahun 2015 maka kepadatan penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2015 mencapai 62,29 jiwa/km^2.

Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 111.824 jiwa yang terdiri atas 56.589 jiwa penduduk laki-laki dan 55.235 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,45. Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk pada tahun 2016 maka kepadatan penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2016 mencapai sekitar 62,93 jiwa/km^2.

2. Kabupaten Buol

Berdasarkan estimasi, pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Buol mencapai 145.889 jiwa, terdiri dari 74.812 jiwa laki-laki dan 71.077 jiwa perempuan. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Biau dengan jumlah 33.959 jiwa. Kabupaten Buol dengan luas wilayah 4.043,57 km2, memiliki kepadatan penduduk 36,08 jiwa/km^2. Bila dilihat penyebaran penduduk pada tingkat kecamatan, ternyata Kecamatan Biau merupakan wilayah dengan kepadatan tertinggi yaitu 156 jiwa/km^2. sedangkan Kecamatan Tiloan merupakan wilayah yang terjarang penduduknya yaitu sebanyak 8 jiwa/km^2

Penduduk Kabupaten Buol berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 149.004 jiwa yang terdiri atas 76.284 jiwa penduduk laki-laki dan 72.720 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Buol mengalami pertumbuhan sebesar 2,14 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,90 Kepadatan penduduk di Kabupaten Buol tahun 2015 mencapai 36,85 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan

penduduk tertinggi terletak di kecamatan Biau dengan kepadatan sebesar 164 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tiloan sebesar 9 jiwa/Km2

Penduduk Kabupaten Buol berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 152.296 jiwa yang terdiri atas 77.913 jiwa penduduk laki-laki dan 74.383 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Buol mengalami pertumbuhan sebesar 2,21 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,75 Kepadatan penduduk di Kabupaten Buol tahun 2016 mencapai 37,66 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Biau dengan kepadatan sebesar 171 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tiloan sebesar 9 jiwa/Km^2.

3. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014 sebanyak 75.290 orang. Kepadatan penduduk Kabupaten yakni sebesar 40,55 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2014, persebaran penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dikatakan kurang merata. Di Kecamatan Kaidipang misalnya, kecamatan yang luasnya hanya 4,58 persen dihuni oleh 18,64 persen dari penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan tingkat kepadatan 164 orang per kilometer persegi. Sementara di Kecamatan Sangkub yang memiliki luas 30,58 persen dari luas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hanya dihuni oleh 12,87 persen penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan tingkat kepadatan 17 orang per kilometer persegi

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 76.331 jiwa yang terdiri atas 39.102 jiwa penduduk laki-laki dan 37.229 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan

sebesar 105,03. Sementara itu kepadatan penduduk tahun 2015 yakni sebesar 41,11 jiwa per Km^2.

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 77.380 jiwa yang terdiri atas 39.563 jiwa penduduk laki-laki dan 37.820 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,61. Sementara itu kepadatan penduduk tahun 2016 yakni sebesar 41,67 jiwa per Km^2.

4. Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, penduduk pertengahan tahun 2014 Kabupaten Bone Bolango adalah sebesar 148.971 jiwa. Sedangkan berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk Kab. Bone Bolango pada tahun 2014 adalah sebesar 151.094 jiwa. Dengan rincinan jumlah penduduk laki-laki sebesar 75.729 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 75.365 jiwa. Penduduk kabupaten Bone Bolango tahun 2014 yang tersebar di 18 kecamatan berjumlah 151.094 jiwa. Kecamatan Bulango Selatan dengan Luas daerah 9,87 km2 dan ditempati oleh 10.417 penduduk, merupakan kecamatan dengan penduduk paling padat apabila dibandingkan dengan 17 kecamatan lainnya di Bone Bolango.

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2015 adalah 158.550 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 79.589 jiwa dan penduduk perempuan 78.961 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 sebesar 80 jiwa per km^2. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bulango Selatan, yaitu 1.057 jiwa per $km^{2,}$ sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Pinogu yaitu 6 jiwa per km^2.

Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2016 adalah 159.673 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 80.444 jiwa dan

penduduk perempuan 79.222 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016 sebesar 80 jiwa per km2. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bulango Selatan, yaitu 1.098 jiwa per km2, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Pinogu yaitu 6 jiwa per km2. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bone Bolango adalah 102. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki, atau dapat dikatakan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bone Bolango lebih besar dari jumlah penduduk perempuan.

D. Potensi Kabupaten Dalam Badan Kerjasama Utara-Utara

Tanaman Pangan

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein. Gambaran mengenai tanaman pangan pada Kabupaten yang termasuk dalam Badan Kerja Sama Utara Utara yakni:

Tabel 3. Potensi Tanaman Pangan pada Kabupaten dalam Badan Kerja Sama Utara Utara (BKSU)

Aspek	Kab. Gorontalo Utara			Kab Buol			Kab. Bolaang Mongondow Utara			Kab. Bone Bolango		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Luas Lahan Sawah (Hektar)	6.536	6.211	6.242	4.997,00	4.997,00	4.997,00	9.025,00	11.819,00	13.685,00	1341.8	2053,40	2207,25
Padi Sawah (Ton)	40.512	45.458	-	19.019,00	15.516,00	15.516,00	39.227,00	91.221,00	-	14512.86	27568,48	21.496
Padi Ladang (Ton)	0	6.904	-	1.366,00	864,00	864,00	5.765,00	-	-	-	80,00	143.0
Jagung (Hektar)	9.054	12.845	28.607	786,00	1.188,00	1.188,00	3.349,00	3.196,50	6.531,00	2510.53	2523,0	10021.00
Jagung (Ton)	44.300	55.305	-	3.890,00	5.635,00	5.635,00	16.053,00	14.500,00	-	10 654,97	12051,4	49.074
Kedelai (Hektar)	11	11	37	46,00	78,00	78,00	261,00	41,00	52,00	-	-	23
Kacang Tanah (Hektar)	80	195	182	98,00	83,00	83,00	39,00	106,00	127,50	43.00	-	23

Kacang Hijau (Hektar)	12	52	52	12,00	13,00	13,00	29,00	141,00	291,50	-	-	-
Ubi Kayu (Hektar)	17	32	26	21,00	28,00	28,00	31,00	100,00	40,00	21,90	25	17
Ubi Jalar (Hektar)	6	30	6	11,00	24,00	24,00	19,00	41,20	21,00	7	11	9

Sumber: BPS Indonesia, 201

Berdasarkan hasil pada tabel 3, maka dapat dijabarkan penjelasan tabel tersebut:

1. Kabupaten Gorontalo Utara

Pada tahun 2014, luas lahan sawah di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 6.536 hektar, dan terbanyak ditamani padi 2 kali dalam 1 tahun. Luas Areal sawah yang ditamani padi 2 kali dalam 1 tahun mencapai 5.266 hektar. Sementara itu luas lahan untuk jagung yakni 9.054 hektar kemudian dengan produksi sebesar 44,300 ton jagung selama tahun 2014.

Komoditas Pertanian Tanaman Pangan yang paling banyak di Kabupaten Gorontalo Utara adalah Padi Sawah dan Jagung, kedua komoditas ini pada tahun 2015 memiliki nilai produksi 48 458 ton untuk padi sawah dan sekitar 55 305 ton untuk jagung. Komoditas Pertanian Tanaman Pangan lain yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah Padi Ladang, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Kecamatan Sumalata merupakan kecamatan yang memiliki luas panen terluas dibanding dengan kecamatan lainnya.

Komoditas Pertanian Tanaman Pangan yang paling banyak di Kabupaten Gorontalo Utara adalah Padi Sawah dan Jagung, kedua komoditas ini pada tahun 2016 memiliki luas panen 11.037,4 hektar untuk padi sawah dan sekitar 28.607 hektar untuk jagung. Komoditas Pertanian Tanaman Pangan lain yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah Padi Ladang, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Kecamatan Sumalata merupakan kecamatan yang memiliki luas panen terluas dibanding dengan kecamatan lainnya

2. Kabupaten Buol

Pada tahun 2014 produksi padi di Kabupaten Buol sebesar 25.385 ton dengan luas panen 4.997 hektar. Produksi padi tersebut merupakan produksi habis dari padi sawah dan padi ladang dengan produksi masing-masing 19.019 ton (93, 30 persen) dan 1.366 ton (6,70 persen).

Produksi habis jagung tahun 2014 sebesar 3.890 ton yang dihasilkan dari 786 hektar. Produktivitas jagung tiap hektar lahan sebesar 49,49 kuintal. Produksi habis kacang kedelai tahun 2014 sebesar 61 ton yang dihasilkan dari 46 hektar. Produktivitas jagung tiap hektar lahan sebesar 13,35 kuintal. Produksi habis kacang tanah tahun 2014 sebesar 139 ton yang dihasilkan dari lahan seluas 98 hektar. Produktivitasnya sebesar 14,23 kuintal per hektar. Produksi habis kacang hijau tahun 2014 sebesar 10 ton yang dihasilkan dari lahan seluas 12 hektar. Produktivitasnya sebesar 7,94 kuintal per hektar. Produktivitas ubi kayu sebesar 209,47 kuintal per hektar. Dengan luas lahan yang dipanen sebesar 21 hektar, produksi ubi kayu pada tahun 2014 adalah 440 ton. Produktivitas ubi jalar sebesar 105,06 kuintal per hektar. Dengan luas lahan yang dipanen sebesar 11 hektar, produksi ubi jalar pada tahun 2014 adalah 116 ton.

Produksi padi Kabupaten Buol tahun 2015 dan 2016 mencapai 16.380 ton, terdiri dari 15.516 ton padi sawah dan 864 ton padi ladang. Produksi tahun ini menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 20.385 ton. Hal ini disebabkan karena besarnya penurunan luas panen, baik padi sawah maupun padi ladang, meskipun produktivitas naik dari 40,8 kw/ha menjadi 44,2 kw/ha. Secara umum, produksi tanaman palawija mengalami kenaikan, dan kenaikan signifikan terjadi pada produksi ubi jalar (208,91 persen), kedelai (128,06 persen), dan jagung (44,85 persen). Produksi tanaman palawija terbesar tahun 2015 dan 2016 adalah tanaman jagung mencapai 5.635 ton.

3. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pada tahun 2014, tanaman pangan untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memilii luas lahan sawah sebesar 9.025,00 hektar dengan produksi pada sawah sebesar 39.227,00 ton dan padi ladang sebesar 5.765,00 ton. Kemudian untuk untuk jagung sebesar 3.349,00 hektar dengan produksi 16.053,00 ton.

Tahun 2015, produksi padi mencapai 91.221 ton meningkat dari tahun 2014 yang mencapai mencapai 60.148 ton. Musim kemarau hanya berdampak pada jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar yang

mengalami penurunan produksi pada tahun 2015. Kemudian, luas panen padi sawah di Bolaang Mongondow Utara tahun 2016 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan luas panen padi ladang. Tercatat ada seluas 8345 hektar luas panen padi sawah, sedangkan luas panen padi ladang hanya 5340 hektar.

4. Kabupaten Bone Bolango

Data Luas sawah yang tercatat di Kabupaten Bone Bolango padatahun 2014 seluas 1.341,8 hektar. Menurut pengairannya, sebagian besar sawah menggunakan sistem irigasi teknis yaitu mencapai 93,31persen. Pada tahun 2014, produksi padi sawah yang tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 14.512,86 ton. Sementara itu, untuk produksi jagung di tahun 2014 adalah sebesar 10.645,97 ton.

Data Luas sawah yang tercatat di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 seluas 2.178,40 hektar. Menurut pengairannya, sebagian besar sawah menggunakan sistem irigasi teknis yaitu mencapai 94,26 persen. Pada tahun 2015, produksi padi sawah yang tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 27.568,48 ton. Sementara itu, untuk produksi jagung di tahun 2015 adalah sebesar 12.051,4 ton.

Data Luas sawah yang tercatat di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016 seluas 2.207,25 hektar. Menurut pengairannya, sebagian besar sawah menggunakan sistem irigasi teknis yaitu mencapai 96,01 persen. Pada tahun 2016, produksi padi sawah yang tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 21.496 ton. Sementara itu, untuk produksi jagung di tahun 2016 adalah sebesar 49.074 ton.

Perkebunan

Hasil perkebunan merupakan Gambaran mengenai perkebunan pada Kabupaten yang termasuk dalam Badan Kerja Sama Utara Utara yakni:

Tabel 4. Potensi Perkebunan pada Kabupaten dalam Badan Kerja Sama Utara Utara (BKSU)

Aspek	Kab. Gorontalo Utara			Kab. Buol			Kab. Bolaang Mongondow Utara		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Cabai (Ha)	303,0	181,0	255,0	116,0	90,0	191,0	101,0	94,0	74,0
Cabai (Ton)	1.370,2	1.327,8	2.228,5	2.158,0	9.651,0	19.018,0	647,0	63,5	814,0
Bawang Merah(Ha)	-	5,0	4,0	6,0	-	7,0	-	-	-
Bawang Merah (Ton)	-	20,0	14,0	212,0	-	296,0	-	-	-
Tomat (Ha)	7,0	4,0	3,0	50,0	39,0	30,0	34,0	12,0	-
Tomat (Ton)	30,5	19,0	15,8	1.253,0	4.162,0	3.814,0	1.010,0	5,0	-
Kelapa (Ha)	11.190,0	11.387,0	6.524,1	12.775,0	17.766,0	17.766,0	15.684,0	9.699,0	9.699,0
Kelapa (Ton)	9.111,0	8.938,0	9.155,3	11.918,0	10.162,0	10.162,0	14.517,8	4.960,6	4.960,6
Kelapa Sawit (Ha)	-	-	-	21.322,3	24.111,0	24.111,0	-	-	-
Kelapa Sawit	-	-	-	230.738,0	224.474,2	224.474,2	-	-	-

Aspek	Kab. Gorontalo Utara			Kab. Buol			Kab. Bolaang Mongondow Utara		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Cengkeh (Ha)	2.234,0	2.256,0	429,9	-	2.180,0	2.180,0	343,2	-	-
Cengkeh (Ton)	254,0	236,0	123,4	-	314,5	314,5	-	-	-
Kakao (Ha)	1.532,0	1.524,0	247,9	11.618,0	11.525,0	11.525,0	5.235,5	182,0	182,0
Kakao (Ton)	122,0	111,0	99,9	7.020,0	5.457,0	5.457,0	685,3	14,9	14,9
Kopi (Ha)	382,0	382,0	26,7	629,0	627,0	627,0	126,5	7,0	7,0
Kopi (Ton)	205,0	205,0	7,0	197,4	187,2	187,2	27,3	7,2	7,2
Pala (Ha)	-	17,0	6,3	-	899,0	899,0	128,5	-	-
Pala (Ton)	-	1,6	1,6	-	10,0	10,0	6,9	-	-
Jambu Mete (Ha)	-	339,0	56,3	-	87,0	87,0	46,0	-	-
Jambu Mete (Ton)	-	122,0	18,1	-	0,4	0,4	-	-	-

Aspek	Kab. Bone Bolango		
	2014	2015	2016
Cabai (Ha)	113.7	113.7	217
Cabai (Ton)	113.9	113.9	-
Bawang Merah (Ha)	14.5	14.50	-
Bawang Merah (Ton)	-	-	-
Tomat (Ha)	5.25	5.25	47
Tomat (Ton)	155	155.00	-
Kelapa (Ha)	-	-	-
Kelapa (Ton)	-	18.637,91	6.949.85
Kelapa Sawit (Ha)	-	-	-
Kelapa Sawit	-	-	-
Cengkeh (Ha)	-	-	-
Cengkeh (Ton)	-	-	-
Kakao (Ha)	-	-	-
Kakao (Ton)	-	4.074,83	2.432.99
Kopi (Ha)	-	-	-
Kopi (Ton)	-	635,33	686.83
Pala (Ha)	-	-	-
Pala (Ton)	-	-	-
Jambu Mete (Ha)	-	-	-
Jambu Mete (Ton)	-	-	-

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Berdasarkan hasil pada tabel 4, maka dapat dijabarkan penjelasan tabel tersebut:

1. Kabupaten Gorontalo Utara

Pada tahun 2014, luas tanaman cabai yakni sebesar 303 hektar dengan produksi sebanyak 1.370,2 Ton. Kemudian untuk tomat sebesar 7 hektar yang digunakan untuk menanam tomat dengan total produksi pada tahun tersebut yakni 30,5 ton. Luas tanaman kelapa di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 11.190 Ha. Pada tahun yang sama, tanaman perkebunan lainnya masing-masing memiliki luas tanaman kakao 1.532 Ha, cengkeh 2.234 Ha.

Tanaman perkebunan yang paling banyak dan mudah ditemukan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah tanaman Kelapa. Pada tahun 2015 luas tanam pohon kelapa mencapai 11.387 hektar dan produksi mencapai 8.938 ton. Tanaman Perkebunan lain yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara antara lain adalah Jambu Mete, Nilam, Kopi, Pala, Kakao dan Cengkeh. Potensi tanaman perkebunan yang perlu untuk dipertahankan yakni pada cabai karena cenderung konsisten dan mampu bertahan pada cuaca yang kurang baik. Dibanding dengan tahun sebelumnya tanaman kelapa dalam mulai mengalami penurunan baik luas maupun produksinya di Kabupaten Gorontalo Utara dimana pada tahun 2016 luas tanam pohon kelapa dalam mencapai 6.186 hektar dan produksi mencapai 9.155,28 ton. Tanaman Perkebunan lain yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara antara lain adalah Kelapa Hibrida, Kopi, Cengkeh, Kakao, Jambu Mete, Pala, Aren dan Nilam.

2. Kabupaten Buol

Produksi tanaman sayuran terbanyak pada tahun 2014 adalah cabe rawit, yaitu 1.531 ton dengan luas panen 77 hektar. Kemudian diikuti oleh produksi tomat sebesar 1.253 ton dengan luas panen 50 hektar. Produksi kelapa sawit masih menjadi produksi unggulan tanaman perkebunan di Kabupaten Buol. Produksi kelapa sawit terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan produksi di tahun 2014 adalah sebanyak 230.738,02 ton dengan luas areal 21.322,33 hektar. Produksi perkebunan terbanyak kedua adalah kelapa dengan jumlah produksi yaitu 11.918 ton dengan luas areal 12.775 hektar. Produksi terbanyak selanjutnya adalah kakao sebanyak 7.020 ton dari luas areal sebesar 11.618

hektar. Kemudian setelah itu adalah produksi dari kopi, lada, dan yang lainnya (meliputi cengkeh, pala, lada, jambu mete, kapuk, vanili, dan sagu.

Tanaman sayur-sayuran yang diproduksi oleh Kabupaten Buol antara lain cabai besar, cabai rawit, petsai/sawi, bawang daun, bayam, kacang panjang, kangkung, ketimun, semangka, terung, dan tomat sayur. Berdasarkan luas tanam dan produksinya, tiga komoditas tanaman perkebunan di Kabupaten Buol yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2015 antara lain kelapa sawit, kelapa dan kakao.

Pada tahun 2016, tanaman sayur-sayuran yang diproduksi oleh Kabupaten Buol antara lain cabai besar, cabai rawit, petsai/sawi, bawang daun, bayam, kacang panjang, kangkung, ketimun, semangka, terung, dan tomat sayur Berdasarkan luas tanam dan produksinya, tiga komoditas tanaman perkebunan di Kabupaten Buol yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2016 antara lain kelapa sawit, kelapa dan kakao.

3. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pada tahun 2014, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki jumlah produksi terbanyak yakni kelapa dengan jumlah 14.517,8 yang tumbuh pada lahan seluas 15.684,0 hektar. Namun jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal tersebut karena adanya alih fungsi lahan yang ditanami kelapa untuk pembangunan daerah dan sektor rill lainnya.

Kemudian jumlah produksi yang paling kecil yakni pala yang ditanami pada lahan seluas 128,5 hektar dengan jumlah produksi sebesar 6,9 ton. Namun pada tahun-tahun berikutnya yakni tahun 2015 dan 2016 tanaman ini tidak lagi ada produksinya.

4. Kabupaten Bone Bolango

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2014 - 2015 masih didominasi tanaman kelapa dan kakao. Produksi tanaman kelapa pada 2015 sebesar 18.637,91 ton. Sedangkan tanaman kakao sebesar 4.074,83 ton. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bone Bolango

pada tahun 2016 masih didominasi tanaman kelapa dan kakao. Produksi tanaman kelapa pada 2016 sebesar 6.949,85 ton. Sedangkan tanaman kakao sebesar 2.432,99 ton.

Peternakan

Gambaran hasil peternakan per kabupaten di kawasan Kerja Sama Utara Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Potensi Peternakan pada Kabupaten dalam Badan Kerja Sama Utara Utara (BKSU)

Aspek	Kab. Gorontalo Utara			Kab Buol			Kab. Bolaang Mongondow Utara			Kab. Bone Bolango		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Sapi Potong	25.825,0	27.718,0	29.893,0	15.147,0	16.251,0	17.288,0	12.847,0	9.751,0	16.392,0	26243	27714	28350
Kuda	23,0	21,0	22,0	-	-	-	97,0	10,0	136,0	209	237	271
Kambing	4.625,0	5.487,0	6.527,0	20.990,0	27.465,0	33.388,0	6.742,0	6.274,0	10.634,0	4976	5046	6381
Babi	901,0	1.015,0	1.084,0	1.153,0	-	1.464,0	1.127,0	750,0	1.445,0	12	-	10
Ayam Kampung	282.938,0	291.501,0	313.083,0	76.785,0	95.624,0	119.782,0	36.962,0	51.823,0	44.602,0	168026	168026	177731
Ayam Ras Petelur	19.432,0	23.846,0	24.400,0	22.000,0	10.000,0	28.489,0	18.357,0	8.700,0	21.380,0	135320	135320	137300
Ayam Ras Pedaging	7.995,0	44.928,0	52.860,0	9.854,0	32.000,0	27.000,0	10.560,0	9.300,0	15.253,0	196345	219345	200600
Itik	3.486,0	4.564,0	4.302,0	9.820,0	17.676,0	13.080,0	1.712,0	9.957,0	6.063,0	10301	10541	10691

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Berdasarkan hasil pada tabel 5, maka dapat dijabarkan penjelasan tabel tersebut:

1. Kabupaten Gorontalo Utara

Pada tahun 2015, populasi ternak besar, sapi 25.825 ekor, kuda 23 ekor, Sedangkan untuk populasi ternak kecil, terdiri dari kambing 4.625 ekor dan babi 901 ekor. Sementara itu untuk unggas yang paling besar yakni ayam kampung sebesar 282.938 ekor.

Hewan Ternak yang banyak ditemui di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sapi potong dan kambing, untuk jumlah sapi potong pada tahun 2015 mencapai 27 718 ekor dan untuk kambing mencapai 5 487 ekor. Jenis Unggas yang paling banyak adalah Ayam Kampung, data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat pada tahun 2015 jumlah Ayam Kampung di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 291.501 ekor.

Hewan Ternak yang banyak ditemui di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sapi potong dan kambing, untuk jumlah sapi potong pada tahun 2016 mencapai 29.893 ekor dan untuk kambing mencapai 6.527 ekor. Jenis Unggas yang paling banyak adalah Ayam Kampung, data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat pada tahun 2016 jumlah Ayam Kampung di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 313.083 ekor.

2. Kabupaten Buol

Berdasarkan tabel di atas, maka populasi ternak besar terbanyak pada tahun 2014 adalah kambing 20.990 ekor, kemudian sapi potong 15.147 dan terendah adalah babi 1.153 ekor. Dari populasi ternak tersebut, jumlah kambing yang dipotong sebanyak 2.441 ekor, sapi 2.017 ekor, dan babi 162 ekor. Populasi unggas terbesar adalah ayam kampung sebanyak 76.785 ekor dan terendah adalah itik yitu 9.820 ekor.

Populasi ternak terbesar di Kabupaten Buol tahun 2015 adalah kambing dengan jumlah 27.465 ekor, diikuti sapi potong sebanyak 16.251 ekor dan babi sebanyak 1.271 ekor. Sedangkan populasi unggas terbesar adalah ayam

kampung dengan jumlah 95.624 ekor. Populasi ini berada jauh di atas populasi unggas lainnya, seperti ayam pedaging (32.000 ekor), itik (17.676 ekor) dan ayam petelur (10.000 ekor).

Populasi ternak terbesar di Kabupaten Buol tahun 2016 adalah kambing dengan jumlah 27.465 ekor, diikuti sapi potong sebanyak 16.251 ekor dan babi sebanyak 1.271 ekor. Sedangkan populasi unggas terbesar adalah ayam kampung dengan jumlah 95.624 ekor. Populasi ini berada jauh di atas populasi unggas lainnya, seperti ayam pedaging (32.000 ekor), itik (17.676 ekor) dan ayam petelur (10.000 ekor).

3. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pada tahun 2014, hewan Ternak yang banyak ditemui di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah ternak sapi sebesar 12.847 ekor, kemduain yang paling kecil yakni kuda 97 ekor. Kemudian untuk unggas yang terbesar yakni pada ayam kampung sebesar 36.962 ekor dan yang terkecil yakni hewan itik sebanyak 1.712 ekor

Pada tahun 2015, hewan Ternak yang banyak ditemui di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih ternak sapi sebesar 9.751 ekor, kemudian yang paling kecil yakni kuda 10 ekor. Kemudian untuk unggas yang terbesar yakni pada ayam kampung sebesar 51.823 ekor dan yang terkecil yakni hewan ayam ras petelur sebanyak 8.700 ekor

Pada tahun 2016, hewan ternak yang banyak ditemui di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih tetap adalah ternak sapi sebesar 16.932 ekor, kemudian yang paling kecil yakni kuda 136 ekor. Kemudian untuk unggas yang terbesar yakni ayam kampung sebesar 44.602 ekor dan yang terkecil yakni hewan itik sebanyak 6.063 ekor.

4. Kabupaten Bone Bolango

Populasi ternak terdiri dari sapi perah, sapi potong, kambing. Pada tahun 2014, jumlah populasi tersebut berturut-turut 1 ekor, 26.243 ekor, dan 4.976 ekor. Populasi unggas yang terdiri dari ayam kampung, ayam petelur,

ayam pedaging dan itik, pada tahun 2014 secara berturut-turut 168.026 ekor, 135.320, 196.345 ekor, dan 10.301 ekor. Pada tahun 2015 populasi sapi potong di Kabupaten Bone Bolango mengalami kenaikan sebanyak 27.714 ekor, naik 5,61 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan populasi ternak yang lain seperti kambing sebanyak 5.046 ekor, dan kuda sebanyak 237 ekor.

Pada tahun 2016 populasi sapi potong di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 28.350 ekor, naik 2,29 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan populasi ternak yang lain seperti kambing sebanyak 6.381 ekor, dan kuda sebanyak 271 ekor.

Perikanan

Untuk gambaran potensi dan produksi perikanan di kawasan Badan Kerja Sama Utara Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Potensi Perikanan pada Kabupaten dalam Badan Kerja Sama Utara Utara (BKSU)

Aspek	Kab. Gorontalo Utara			Kab Buol			Kab. Bolaang Mongondow Utara		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Ikan Nila	-	26,3	19,1	-	-	-	43.360,0	43.360,0	43.360,0
Bandeng	-	8,5	23,1	-	-	-	97.140,0	97.140,0	97.140,0
Kerapu	-	6,4	8,3	-	-	-	3.910,0	3.910,0	3.910,0
Kuwe	-	15,2	11,9	-	-	-	-	-	-
Udang Windu	-	0,8	2,5	-	-	-	66.270,0	66.270,0	66.270,0
Ikan Mas	-	10,1	3,1	-	-	-	35.400,0	35.400,0	35.400,0
Udang Vaname	-	84,7	175,6	-	-	-	108.000,0	108.000,0	108.000,0
Lele	-	0,7	0,0	-	-	-	11.350,0	11.350,0	11.350,0
Rumput Laut	-	29,5	26.633,4	-	-	-	571.800,0	571.800,0	571.800,0
Ikan Tangkap*	-	23.563,8	24.100,0	20.456,3	13.241,3	19.255,9	4.045,9	4.045,9	4.183,0

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Perahu di Kabupaten Bone Bolango, 2014

No	Kecamatan	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tapa	--	--	--
2	Bulango Utara	--	--	--
3	Bulango Selatan	--	--	--
4	Bulango Timur	--	--	--
5	Bulango Ulu	--	--	--
6	Kabila	--	--	--
7	Botupingge	--	--	--
8	Tilongkabila	--	--	--
9	Suwawa	--	--	--
10	Suwawa Selatan	--	--	--
11	Suwawa Timur	--	--	--
12	Suwawa Tengah	--	--	--
13	Pinogu	--	--	--
14	Bone Pantai	--	--	--
15	Kabila Bone	--	--	--
16	Bone Raya	--	--	--
17	Bone	--	--	--
18	Bulawa	--	--	--
	Kab. Bone Bolango	185	1225	25

Catatan / Note :*) Data masih mengikuti Kecamatan Induk

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango 2014

Banyaknya Rumah Tangga, Luas, dan Jumlah Produksi (ton) Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Bone Bolango, 2015

Jenis Budidaya	RTP	Luas (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kolam	1 301	72	1 320,18
Karamba	36	0,47	6,44
JA Tawar	32	0,51	6,40
JA Tawar	60	5	76,96
Minapadi	7	5	4,08
Jumlah	1 436	83,01	1 414,06

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango 2015

Banyaknya Rumah Tangga, Luas, dan Jumlah Produksi (ton) Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Bone Bolango, 2016

Jenis Budidaya	RTP	Luas (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
Budidaya Laut	20	256	0,2
Tambak	--	--	--
Kolam	431	181017	559,0
Keramba	--	--	--
Jaring Apung	--	--	--
Sawah	--	--	--
Jumlah	451	181273	559,2

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango 2016

Berdasarkan hasil pada tabel 6 maka dapat dijabarkan penjelasan tabel tersebut:

1. Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Kabupaten yang memiliki garis pantai yang cukup panjang, jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 2.666 rumah tangga dan terdapat 2.000 lebih perahu, dimana 1.678 diantaranya adalah perahu dengan motor tempel. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2015 mencapai 23 563,8 ton, jenis ikan tongkol dan cakalang merupakan jenis ikan dengan produksi paling banyak, masing-masing mencapai sekitar 4000 ton.

Pada tahun 2016 terjadi perkembangan dalam jumlah rumah tangga ,pemilikan perahu dan jumlah tangkapan di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 3.700 nelayan, terdapat 729 Perahu Tanpa Motor, 1.772 Perahu Motor Tempel dan 42 Kapal Motor. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2016 mencapai 24 100 ton, jenis ikan cakalang merupakan jenis ikan dengan produksi paling banyak dengan produksi mencapai 4.686,70.

2. Kabupaten Buol

Produksi perikanan laut di Kabupaten Buol tahun 2014 adalah 20.456,33 ton. Jumlah perahu/kapal sebanyak 2.608 perahu tanpa motor, 9.720 perahu motor tempel, dan 396 kapal motor. Jumlah rumah tangga perikanan di Kabupaten Buol tahun 2015 adalah 2.210 rumah tangga. Produksi perikanan laut Kabupaten Buol pada tahun 2015 sebesar 13.241,30 ton, turun 35,27 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 20.456,33 ton.

3. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Potensi perikanan yang paling dominan pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014-2016 yakni untuk perikanan tangkap yang terus mengalami kenaikan dari 4.045,9 ton tahun 2014, kemudian tahun 2015 naik menjadi 4.045,9 ton serta pada tahun 2016 meningkat menjadi 4.183,0 ton. Kemudian untuk perikanan yang dibudidayakan yakni yang paling baik

adalah potensi udang vaname karena harganya yang terbilang mahal dan nilai tambah ekonomis bagi masyarkat menjadi lebih baik.

4. Kabupaten Bone Bolango

Pada tahun 2014, jumlah perahu/kapal yang terdiri dari 185 perahu tanpa motor, 1.225 perahu motor tempel, dan 25 kapal motor. Jumlah rumah tangga perikanan keseluruhan di Kabupaten Bone Bolango tahun 2015 - 2016 sebesar 1.436 rumah tangga, sedangkan produksinya sebesar 1.414,06 ton.

E. Analisis Location Quotient

Pertumbuhan ekonomi lokal merupakan fungsi dari bagaimana bisnis lokal memenuhi kebutuhan setiap individu dalam suatu komunitas dan bagaimana bisnis tersebut dibentuk oleh kekuatan eksternal yang saling mendukung seperti pasar untuk ekspor barang-barang lokal, impor, pariwisata, dan bahkan perubahan besar dalam alat pembayaran internasional (misalnya, naik atau jatuhnya dolar relatif terhadap mata uang asing). Setiap perusahaan merupakan bagian dari sektor industri, dan sektor industri ekonomi lokal adalah faktor paling mendasar yang mempengaruhi pertumbuhan. Dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi supaya berlangsung secara terus menerus dan berkesesinambungan, maka diperlukan pemetaan ekonomi basis dan non basis.

Menurut Glasson (1977), kegiatan ekonomi basis adalah kegiatan mengekspor barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat. Semakin bertambah ekonomi basis di dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan. Menambah permintaan barang dan jasa akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan, begitu juga sebaliknya. Kegiatan lain yang bukan kegiatan basis disebut sektor nonbasis. Sektor non basis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga permintaan sektor ini

sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Oleh karena itu, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan adalah sektor basis (Tarigan, 2005). Konsep Location Quetiont dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah, Konsep *Location Quotient* merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan dengan mudah, cepat dan tepat yang dapat digunakan berulang kali dengan menggunakan berbagai perubah acuan dan periode waktu, dimana *Location Quotient* merupakan rasio antara PDRB sektor tertentu terhadap total nilai PDRB di suatu daerah dibandingkan dengan sektor yang sama

F. Deskripsi Hasil Analisis Location Quotient

Hasil perhitungan dengan menggunakan location quotient pada ketiga daerah Kerjasama Utara-Utara dan setelah mempertimbangkan sektor basis yang terkait langsung dengan pengembangan ekonomi, maka ada dua sektor ekonomi yang memperoleh nilai lq lebih besar dari 1 yang bisa dijadikan menjadi sektor basis, yaitu untuk Kabupaten Gorontalo Utara sektor pertambangan dan penggalian memperoleh 1,47 dan sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan 1,17.

Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sama seperti Kabupaten Gorontalo Utara ada dua sektor ekonomi yang dominan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memperoleh nilai 2,22 dan pertambangan dan penggalian 2,16. Lain halnya dengan Kabupaten Buol ada 4 sektor ekonomi yang dominan yaitu sektor perdagangan 4,89, sektor industri pengolahan 3,37, sektor pertanian 1,39 dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,06. Karena lingkup pembahasan adalah wilayah Kerjasama Utara-Utara, maka yang bisa dijadikan sektor basis antara ketiga daerah adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan.

Setelah ditanyakan kepada stake holder pada waktu fokus group discussion, para peserta sepakat untuk menjadikan sektor pertanian, kehutanan dan peternakan menjadi sektor basis pada ketiga daerah dengan pertimbangan: 1). Sektor pertambangan dan penggalian walaupun lokasinya berada pada ketiga kabupaten, namun saat ini kewenangan terhadap pengembangan sektor pertambangan dan penggalian sudah berada pada dinas pertambangan masing-masing provinsi dan dengan demikian program dan kebijakan sudah menjadi kewenangan provinsi. 2). Berdasarkan potensi yang dimiliki ketiga daerah ditinjau dari struktur dan letak geografis, maka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan layak dikembangkan menjadi sektor basis.

Adapun sektor perdagangan dan industri untuk saat ini akan menjadi sektor non basis yang menjadi daya dukung terhadap pengembangan potensi ke tiga daerah walaupun untuk Kabupaten Buol memperoleh nilai LQ lebih besar dari 1. Untuk jelasnya hasil identifikasi location quetiont pada ketiga daerah dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Nilai LQ Rata-Rata Sektor Ekonomi Wilayah Kerjasama Utara-Utara Tahun 2010-2015

Kabupaten/Sektor	Pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertambangan dan penggalian	Perda-gangan	Industri Pengolahan	Jasa Lainnya
Gorontalo Utara	1,17	1,47	0,87	0,48	1,17
Bolaang Mongondow Utara	2,22	2,16	0,83	0,30	0,43
Buol	1,39	1,06	4,89	3,37	0,96

Sumber: Data diolah tahun 2017

Baik sektor basis maupun sektor non basis menjadi objek pembicaraan dalam pengembangan kerjasama antara ketiga daerah. Untuk itu perlu diidentifikasi lebih jauh komoditas unggulan dari sektor basis pertanian, kehutanan dan perikanan pada masing-masing kabupaten. Hasil identifikasi fokus group discussion yang menghadirkan para camat, tokoh masyarakat serta instansi terkait pada masing-masing kabupaten menunjukkan untuk

dua kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo Utara dan Buol sekitar 90 % memilih tiga komoditas menjadi unggulan yaitu komoditas jagung dan sapi serta budidaya ikan vaname.Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memilih komoditas sapi serta ikan kerapu menjadi komoditas unggulan.

Komoditas jagung bukanlah hal baru bagi masyarakat petani di Kabupaten Gorontalo Utara karena sejak zaman dulu mereka sudah mengembangkannya secara turun temurun. Bahkan Provinsi Gorontalo semenjak terbentuk telah menetapkan komoditas jagung menjadi sektor unggulan. Begitu pula dengan Kabupaten Buol telah menetapkan komoditas jagung telah menjadi sektor unggulan dengan tingkat produksi yang setiap tahun mengalami peningkatan hingga saat ini telah mencapai 200.000 ton per tahun dan sudah diantar pulaukan sampai ke Surabaya setelah bahkan sedang melakukan kontak dengan pabrik pakan terbesar di Surabaya. Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara walaupun masyarakatnya ada yang menanam jagung, namun belum dominan sehingga belum merupakan perioritas untuk dikembangkan. Lain halnya dengan komoditas sapi, ketiga daerah sama-sama memiliki program pengembangan sapi potong sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Untuk itu melalui Kerjasama Utara-Utara ketiga daerah dengan difasilitasi Universitas Negeri Gorontalo telah bekerjsama dengan PUM Netherland Senior Experts dalam pengembangan sapi potong khususnya melalui Training of Trainer (TOT) bimbingan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) pengembangan sapi potong bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Negeri Gorontalo. Ketiga daerah setuju memilih pembiayaan pengembangan sapi potong melalui dua jalur pembiayaan yaitu jalur pemerintah dengan sumber dana APBN dan APBD, juga jalur swasta dengan mendatangkan investor.

Kedua jalur pembiayaan tersebut intensif sedang disiapkan terutama dalam penyediaan lahan pengembangan sapi potong pada ketiga daerah. Saat ini ketiga daerah sedang menjajaki kemungkinan kerjasama investasi pengembangan sapi potong dengan PT. Catur Nawa sebuah perusahaan yang

telah memperoleh lisensi dari negara Spanyol dalam pengembangan sapi potong di Indonesia.

Satu komoditas lagi yang menjadi perioritas akan dikembangkan oleh ketiga daerah adalah menjajaki pengembangan budidaya udang vaname. Ada tiga pertimbangan yang mereka sampaikan dalam pengembangan ikan vaname, yaitu:

1. Potensi ketiga daerah yang terletak di pinggir pantai seluas kurang lebih 300 km memiliki peluang untuk pengembangan udang vaname intensif apalagi tambak udang vaname sebaiknya di pinggir laut dan tidak terlalu banyak membutuhkan air tawar. Udang vaname membutuhkan lebih banyak air laut yang dialirkan ke tambak sedangkan air tawar hanya berfungsi menstabilkan kadar garam (salinitas) supaya tidak terlalu tinggi.

   Dengan demikian letak tambak udang vaname tidak mesti dekat hulu sungai bahkan beberapa yang telah berhasil hanya mengandalkan air dari sumur suntik ataupun air PDAM;
2. Harga udang vaname cukup stabil dan mudah mendapatkan pembeli ataupun pengumpul karena jenis udang ini pasar dunia cukup terbuka. Dengan demikian para pembudidaya memiliki jaminan pasar yang pasti, apalagi pengembangan budidaya ikan vaname mendapat dukungan dari pemerintah dan ditetapkan sebagai komoditas unggulan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan semenjak tahun 2001.
3. Secara teknis perawatan udang vaname relatif lebih mudah dengan jumlah pakan yang tersedia dengan harga relatif terjangkau.

G. Analisis Shift Share

Alat Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian wilayah yang direfleksikan dalam bentuk pertumbuhan wilayah, kecepatan pertumbuhan relatif sektor-sektor wilayah, dan daya saing sektor-sektor wilayah. (Bendavid-Val, 1991:67, Amien 1996:106). Analisis Shift-Share bertitik tolak pada asumsi pertumbuhan sektor wilayah pengamatan, sama dengan wilayah acuan (Isard, 1960; Hustede, 1984; Blair,

1991:190). Hasil perhitungan Shift-Share masing-masing sektor ekonomi terpilih di kabupaten Gorontalo Utara, Bolaang Mongondow Utara dan Buol dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Perhitungan Shift Share Sektor Ekonomi Wilayah Kerjasama Utara-Utara tahun 2010-2105

Kabupaten/Sektor	Pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertambangan dan penggalian	Perda-gangan	Industri Pengolahan	Jasa Lainnya
Gorontalo Utara	0,35	0,38	0,42	0,28	0,33
Bolaang Mongondow Utara	0,40	0,18	0,11	0,27	0,24
Buol	0,28	0,23	0,26	0,29	0,20

Sumber: Data diolah tahun 2017

Secara keseluruhan sektor-sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Gorontalo Utara, Bolaang Mongondow Utara dan Buol dihitung berdasarkan shift-share menunjukkan hasil yang positif dimana hal ini sesuai dengan keriteria Shift-share sendiri yang menyatakan bahwa bila nilai total shift-share mencapai nilai positif berapapun nilainya maka dikatakan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk dikembangkan. Sekaligus hal ini menggambarkan arah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor ekonomi tergambar adanya perubahan struktur dari pertanian ke sektor industri dan jasa walaupun dari data yang ada dominasi sektor pertanian belum terlalu nampak terjadi pada ketiga daerah.

Terjadinya perubahan struktur sebagai akibat dari berubahnya komponen berbagai variabel ekonomi wilayah misalnya terjadinya pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan menurunnya angka kemiskinan. Kesemuanya akan bermuara pada peningkatan pendapatan wilayah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam model statik yang dikembangkan Edgar S. Dunn tahun 1960 bahwa perubahan struktur yang dimaksud menggambarkan 3 komponen, yaitu:

1. Dampak pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu berubahnya variabel-variabel ekonomi sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi seperti variabel produksi, konsumsi dan distribusi. Ketiga variabel tersebut diupayakan terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhannya melalui serangkaian kebijakan ekonomi yang konsisten dan terarah;
2. Dampak dari perubahan peran sektor industri dalam perekonomian wilayah yang secara konsisten searah dengan dampak pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Dampak perubahan ekonomi lokal yaitu berubahnya variabel-variabel ekonomi lokal searah dengan berubahnya variabel ekonomi regional maupun nasional. Oleh karena itu analisis ekonomi regional melalui analisis shift share antara ketiga daerah Kerjasama Utara-Utara amat penting untuk melihat arah perubahan struktur dari ketiga daerah.

STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN SAPI POTONG

BAB IV

A. Latar Belakang Masalah

Badan Kerjasama Utara-Utara (BKSU) saat ini sudah memasuki tahun keempat semenjak ditandatangai Nota Kesepahaman di Kabupaten Gorontalo tanggal 17 September 2014 oleh Bupati Gorontalo Utara, Bupati Buol, Bupati Bolaang Mongondow Utara serta Rektor Universitas Negeri Gorontalo sebagai fasilitator yang kemudian diperkuat oleh Kabupaten Bone Bolango yang diterima sebagai anggota ke empat BKSU melalui kesepakatan Den Hag Belanda tanggal 10 Mei 2017.

Wilayah BKSU dengan luas 9.662,04 km^2 dan jumlah penduduk 486.600 jiwa tahun 2017 yang terletak di teras utara Sulawesi memiliki potensi untuk pengembangan sapi potong antara lain ditunjang dengan tersedianya bahan pakan alami berupa jerami padi, jagung, rumput alam, limbah tanaman pangan, limbah industri dan lain-lain yang selama ini tidak termanfaatkan secara maksimal. Selain dari pada itu masyarakat di daerah ini sebagian besar adalah petani dan peternak yang pekerjaannya turun temurun hidup dari memelihara sapi secara tradisional sehingga sangat potensial untuk mendukung pengembangan sapi potong di daerah ini.

Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP di Kabupaten Bone Bolango tanggal 30 Oktober 2017 mengharapkan agar BKSU mentargetkan produksi sapi potong di kawasan ini sejumlah satu juta ekor dalam 10 tahun ke depan sesuai dengan kesepakatan 4 bupati untuk menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan di Indonesia Timur.

Untuk memperkuat sasaran kerjasama BKSU, maka telah dilaksanakan penelitian tahap I di daerah ini tahun 2017 oleh Fahrudin dkk yang pada

dasarnya telah menghasilkan identifikasi sektor unggulan di kawasan kerjasama utara-utara yang sekaligus menjadi sektor basis yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Pertambangan dengan 3 komoditas unggulan yang terpilih yaitu Komoditas Sapi Potong, Jagung dan Budidaya Udang Vaname. Sebagai kelanjutan dari hasil penelitian tahap I, maka pada tahap II perlu dibuat perencanaan bisnis dari ketiga komoditas dimaksud yang meliputi 4 kabupaten sesuai dengan perkembangan wilayah dan keanggotan kerjasama utara-utara. Karena keterbatasan anggaran dan tenaga maka penelitian ini fokus pada pengembangan sapi potong sekaligus menjadi daya dukung terhadap harapan Menteri Pertanian dengan sasaran 1 juta ekor sapi potong dalam 10 tahun ke depan. Output dari perencanaan bisnis akan menjadi dasar dalam kebijakan pengembangan komoditas unggulan di kawasan kerjasama utara-utara serta pula menjadi dasar kebijakan dalam pembagian peran masing-masing daerah. Kaitannya dengan peran Universitas Negeri Gorontalo adalah keterlibatannya dalam riset dan disain pengembangan komoditas unggulan yang dapat melibatkan tenaga pengajar maupun mahasiswa sesuai bidang dan komoditas yang dikembangkan.

1. Fokus Kajian Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian tahp II ini sebagai berikut:

1. Membuat studi kelayakan pengembangan komoditas unggulan kerjasama utara-utara khusunya pengembangan sapi potong
2. Merumuskan kebijakan penting pengembangan komoditas unggulan kerjasama utara-utara khususnya komoditas sapi potong

2. Urgensi Penelian

Hasil penelitian ini memiliki urgensi sebagai berikut:

1. Menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten di wilayah kerjasama utara-utara tentang studi kelayakan dan perencanaan bisnis komoditas unggulan kerjasama utara-utara

2. Menjadi masukan bagi pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan semua stake holder yang terkait dengan kerjasama utara-utara terutama tentang kebijakan dalam percepatan pembangunan di kawasan kerjasama utara-utara

B. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Kerjasama Utara-Utara yang meliputi Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara.

2. Tahapan Penelitian

Penelitain ini diadakan selama 2 tahun dengan tahapan penelitian sebagai berikut:

Tahap I (Tahun 2017).

Mengidentifikasi produk unggulan masing-masing Kabupaten di wilayah kerjasama utara-utara, sekaligus akan menjadi sektor basis dalam pengembangan produk.

Tahap II (Tahun 2018).

Tahun kedua diharapkan akan membuat studi kelayakan dari produk unggulan khusunya pengembangan sapi potng di wilayah kerjasama utara-utara.

3. Metode Perhitungan Carryng Capacity

Pengkajian dilakukan di Kawasan Kerjasama Utara-Utara pada 4 kabupaten yang ada saat ini. Keseluruhan lokasi di kabupaten dikaji sesuai dengan potensi yang dimiliki. Data yang dikumpulkan berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dengan kegiatan survei langsung maupun wawancara. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi

pemerintah (Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan instansi terkait Badan Kerjasama Utara-Utara) yang nantinya akan menjadi pendukung oprasionalisasi pengembangan peternakan sapi potong.

Data primer maupun sekunder yang terkumpul selanjutnya akan ditabulasi, diverifikasi, dan dikaji/dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi. Aspek-aspek yang menjadi kajian antara lain:

- **Ketersediaan Pakan dan Bahan Baku Pakan**

Meliputi identifikasi terhadap beberapa bahan pakan yang dapat digunakan sebagai bahan baku didalam pembuatan pakan. Proses identifikasi potensi bahan pakan ditujukan terhadap kabupaten yang terdapat di Kawasan Kerjasama Utara-Utara. Penentuan jumlah produksi Bahan Kering (BK) hijauan makanan ternak dan limbah tanaman pertanian yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan pakan dilakukan dengan cara estimasi dengan melakukan perkalian dengan koefisien teknis dari masing-masing bahan pakan yang akan dianalisis.

- **Dinamika Populasi Sapi Potong**

Kajian ditujukan untuk mengetahui populasi terkini sapi potong di Kabupaten kawasan kerjasama utara-utara dan tingkat pertumbuhannya sejak tahun 2018. Proyeksi populasi sapi potong 10 tahun kemudian dilakukan untuk mengetahui capaian populasi sapi potong setiap tahun dengan menggunakan beberapa asumsi, baik dengan berdasarkan tanpa program percepatan dan melalui program percepatan (perbaikan manajemen pemeliharaan dan reproduksi dan impor sapi potong dari luar Kabupaten kerjasama utara-utara).

- **Daya Dukung Hijauan/Kapasitas Tampung**

Penghitungan kapasitas tampung ternak ditujukan untuk menunjukkan populasi maksimum suatu jenis ternak ruminansia yang dapat ada di wilayah tersebut pada kemampuan wilayah dalam menyediakan pakan hijauan. Untuk

mengetahui Daya Dukung Lahan dan Indeks Daya Dukung Lahan, maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan terhadap:

- ***Kebutuhan Pakan Minimum.*** Kebutuhan pakan minimum ternak ruminansia setiap 1 Satuan Ternak (ST) dihitung berdasarkan Sumanto dan Juarini (2006), yaitu:

  K= 2.5% x 50% x 365 x 250 kg = 1.14 ton BK/Tahun/ST

  Keterangan:

K	=	Kebutuhan pakan minimum untuk 1 Satuan Ternak (ST) dalam ton Bahan Kering (BK) tercerna selama satu tahun
2.5%	=	Kebutuhan minimum jumlah ransum hijauan pakan (bahan kering) terhadap berat badan
50%	=	Nilai rata-rata daya cerna berbagai jenis tanaman
365	=	Jumlah hari dalam setahun
250 kg	=	Berat hidup 1 ST (dapat berubah sesuai kondisi ternak masing-masing wilayah)

- ***Daya Dukung Hijauan (DDH).*** Daya Dukung Hijauan dihitung berdasarkan produksi Bahan Kering (BK) terhadap kebutuhan 1 Satuan Ternak (ST) sapi potong dalam 1 tahun. Rumus yang digunakan berdasarkan Haryono (2002), yaitu:

  Daya Dukung Hijauan (ST)= (Produksi Bahan Kering (Kg))/(Kebutuhan Bahan Kering (Kg/ST))

- ***Indeks Daya Dukung Hijauan (IDDH).*** IDDH dihitung berdasarkan jumlah produksi hijauan makanan ternak yang tersedia terhadap jumlah kebutuhan hijauan bagi sejumlah populasi ternak ruminansia di suatu wilayah. Rumus yang digunakan berdasarkan Ashari, dkk (1995), yaitu:

  IDDH= (Daya Dukung Hijauan Makanan Ternak (ST))/(Jumlah Populasi Ruminansia (ST))

  IDDH mencerminkan tingkat keamanan pakan pada suatu wilayah untuk mendukung kehidupan ternak yang ada di wilayah tersebut, dengan kriteria:

Tabel 9. Kriteria Status Daya Dukung Hijauan Berdasarkan Indeks Daya Dukung

Indeks Daya Dukung (IDD)	Kriteria
>2	Aman
> 1,5 – 2	Rawan
> 1 – 1,5	Kritis
< 1	Sangat Kritis

- ***Kapasitas Peningkatan Populasi.*** Merupakan selisih antara daya dukung hijauan dengan jumlah populasi ternak sapi potong saat ini, dan dihitung dengan satuan yang sama yaitu satuan ternak (Ashari dkk, 1995).

4. Penyusunan Studi Kelayakan

Penyusuanan Studi Kelayakan meliputi aspek penentuan kelayakan lokasi pengembangan dan penyusunan dokumen kelayakan produk unggulan di wilayah kerjasama utara-utara dilihat dari berbagai aspek seperti aspek produksi, bahan baku (bibit), teknik, SDM, ekonomi dan sosial, pemasaran, hukum dan lingkungan. Pada sisi penentuan lokasi mengacu pada penentuan lokasi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kabupaten. Produk unggulan hasil penelitian tahap I adalah komoditas sapi potong, jagung dan budidaya udang vaname. Sebagai kelanjutan penelitian tahap I tahun 2017, maka pada tahap II tahun 2018 akan dihitung kelayakan usaha dari masing-masing produk. Namun, setelah mempertimbangkan luasnya daerah penelitian serta komoditas yang diunggulkan sebanyak tiga komoditas yang tersebar pada 4 kabupaten serta mempertimbangkan biaya penelitian, maka perhitungan studi kelayakan akan dibatasi pada satu komoditas yang menjadi perioritas utama yaitu pengembangan sapi potong. Adapun aspek-aspek yang akan dihitung dalam pembuatan studi kelayakan adalah sebagai berikut:

Aspek produksi

Dalam aspek ini akan dihitung besarnya kemungkinan produksi yang dihasilkan sesuai dengan potensi bahan pakan di masyarakat serta yang menguntungkan kepada peternak sapi serta alternative kerjasama yang

bisa dilakukan oleh investor yang menguntungkan kedua belah pihak baik peternak maupun investor.

Aspek Bahan Baku (bibit)

Dalam aspek ini akan dihtung kebutuhan bibit sapi potong kisaran produksi tertentu. Akan ditampilkan beberapa scenario jumlah produksi dan kebutuhan bibit serta sumber pembibitan pada skala tertentu yang feasible.

Aspek Teknik

Dalam aspek ini akan dijelaskan kebutuhan teknik budidaya dan sumberdaya pendukung seperti tenaga teknik yang bisa mendukung budiaya sapi potong secara maksimal. Dalam aspek ini juga akan dijelaskan kebutuhan pakan dalam suatu periode tertentu sesuai dengan aspek teknik budidaya.

Aspek SDM

Dalam aspek ini akan dihitung besaran kebutuhan SDM dalam suatu siklus budidaya yang menguntungkan dari sisi kelayakan usaha. SDM yang dimaksud adalah SDM yang bertugas di lapangan melakukan aktifitas budidaya.

Aspek Ekonomi dan sosial

Dalam aspek ekonomi akan diungkapkan dampak secara ekonomi dan sosial keberadaan budidaya pengembangan sapi potong baik bagi nelayan maupun bagi masyarakat sekitarnya.

Aspek Keuangan

Dalam aspek ini akan dijelaskan kelayakan usaha yang menguntungkan dalam skala tertentu serta kebutuhan permodalan budidaya dalam siklus tertentu. Analisis akan mengungkapkan tingkat keuntungan, Benefit Cost

Ratio (B/C ratio) titik pulang modal (Break Event Point), dan analisis Periode Investasi (Pay Back Period).

Aspek Pasar

Pasar sangat menentukan dalam proses kegiatan budidaya karena ketersediaan pasar akan menentukan dalam kelancaran proses produksi. Dalam hal ini akan dilihat kemungkinan pasar yang menguntungkan baik pasar lokal, regional maupun internasional.

Aspek Hukum

Dalam aspek ini akan diulas tentang legalitas budidaya pengembangan sapi potong terutama kesesuaian dengan kebijakan pemerintah maupun tata ruang kawasan baik tingkat Provinsi maupun kabupaten sehingga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Lingkungan

Dalam aspek ini akan dikaji kelayakan budidaya pengembangan sapi potong yang tidak bertentangan dengan aspek lingkungan terutama pencemaran maupun pengrusakan lingkungan. Yang perlu diungkap juga dalam aspek ini persyaratan lingkungan yang dibutuhkan dalam budidaya pengembangan sapi potong sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data sekunder dan dilengkapi dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari laporan dan hasil-hasil studi yang sudah ada yang berkaitan dengan pembuatan studi kelayakan pengembangan sapi potong, sedang data primer diperoleh dengan metode wawancara dengan responden yang terdiri atas: aparat pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir. Pengumpulan data primer dibantu dengan daftar pertanyaan terstruktur yang sudah disiapkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan disusun sedemikian rupa disesuaikan

dengan kebutuhan analisis. Data sekunder yang dikumpulkan berasal dari Instansi Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Instansi Pemerintah Terkait. Sedangkan pengambilan data primer dilaksanakan dengan metode survey pada lokasi survey dengan metode purposive (yang terkait dengan objek penelitian yang akan diwawancarai). Selain daripada itu untuk menguji data yang terkumpul maupun hasil studi akan dilakukan fokus group diskusi dengan instansi terkait maupun masyarakat dan stake holder lainnya.

C. Metode Analisis

Semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan digunakan dalam analisis sesuai dengan kebutuhan dalam kajian studi kelayakan pengambangan sapi potong di kawasan kerjasama utara-utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Tentang penentuan lokasi akan diungkap secara deskriptif yang disesuaikan dengan Garis Kebijakan Pengembangan sapi potong baik Pusat, Provinsi maupun tingkat kabupaten kerjasama utara-utara. Sedangkan aspek-aspek yang terkait dengan analisis kelayakan usaha akan diungkap secara deskriptif yang disesuaikan dengan data dan kebutuhan lapangan. Tentang aspek keuangan akan dihitung secara kuantitatif, yaitu:

1. Analisis Biaya dan Manfaat (Cost Benefit Analysis)

Analisis biaya dan manfaat akan membandingkan antara besaran keuntungan dan biaya pada suatu periode budidaya sehingga menghasilkan keuntungan bersih (net benefit) yang kemudian akan dihitung nilai bersih sekarang (Net Present Value/NPV). Kriteria analisis jika NPV >0 maka kegiatan proyek investasi layak dilaksanakan dan menguntungkan dan sebaliknya. NPV < 0, maka kegiatan proyek investasi tidak layak dilaksanakan. Perhitungan biaya dan perbandingannya adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{NPV} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$$

Dalam formulasi ini, kriteria *Benefit-Cost Ratio* didefinisikan sebagai B/C.

Kriteria Investasi

Kriteria investasi merupakan indeks untuk mengukur dan membandingkan tingkat keuntungan dari berbagai proyek sehingga bisa dinilai apakah suatu proyek menguntungkan (*GO*) atau tidak (*NOT GO*). Tujuannya adalah untuk menentukan ranking dengan berbagai kriteria untuk mengalokasikan dana yang ada sehingga keuntungannya maksimum.

1. Undiscounted

   Tergantung lamanya waktu pengembalian investasi *(payback period*). Waktu yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh dana yang diinvestasikan:

   a. Semakin pendek *payback period*, semakin menarik proyek yang direncanakan

   b. Sumber dana intern proyek *(internal generating fund)* yang dapat digunakan untuk mengembalikan dana yang telah diinvestasikan adalah laba sesudah pajak dan alokasi dana penyusutan *(net cash flow)*

2. Discounted

   Menghitung *Net Present Value* (NPV) atau nilai sekarang dari selisih antara nilai manfaat dengan arus biaya selama umur proyek, pada tingkat *opportunity cost of capital* tertentu. Pendekatan discounted dalam menghitung investasi dapat dilakukan dengan menghitung beberapa indikator di bawah ini:

   1) Net present value (NPV): menghitung nilai netto saat ini

   2) Internal rate of return (IRR): menghitung tingkat bunga pada saat NPV=0

   3) P/R: Membandingkan *present value* dari *net benefit* dengan *present value* dari investasi

4) B/C ratio: membandingkan *discounted gross benefit* dengan *discounted gross cost*

5) *Least cost*: Digunakan untuk memilih proyek bila keuntungan tidak dapat dikuantifikasi, sehingga yang menjadi acuan hanyalah proyek mana yang biayanya paling kecil

a. Net Present Value

Jumlah seluruh ***present value*** dari ***cash flow*** yang dapat dikumpulkan proyek selama umur ekonomisnya dikurangi nilai investasi. Pedoman: bila **NPV positif**, proyek dianggap layak, bilamana **NPV negatif**, proyek dianggap tidak layak.

Formula:

$$NPV = \sum_{t=0}^{t=n} \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}$$

NPV > 0 ➔ Layak
NPV < 0 ➔ Tidak Layak

b. Internal rate of return (IRR)

IRR adalah suku bunga atau *discount rate* yang apabila dipakai untuk mendiskonto seluruh cash flow yang dikumpulkan proyek selama umur ekonomisnya, akan menghasilkan dana yang jumlahnya sama dengan nilai investasi proyek. IRR menggambarkan nilai profitabilitas proyek yang sebenarnya. IRR dapat dicari dengan jalan *trial and error*, atau dengan bantuan komputer dan kalculator yang sudah diprogram.

Formula:

$$0 = \sum_{t=0}^{t=n} \frac{B_t - C_t}{(1+IRR)^t}$$

IRR > COC ➔ Layak
IRR < COC ➔ Tidak Layak

$$IRR = (i'' - i')\left(\frac{NPV'}{NPV' - NPV''}\right) + i'$$

c. Profitability ratio

Profitabilitas proyek dikategorikan layak apabila jumlah seluruh ***present value cash inflows*** lebih besar dari jumlah dana yang diinvestasikan. Formula:

$$P/R = \frac{\sum_{t=1}^{n} \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^{n} \frac{K_t}{(1+i)^t}} \quad C = operating\ cost$$

P/R > 1 ➔ Layak
P/R < 1 ➔ Tidak Layak

D. Pengembangan Kawasan Peternakan

Pengembangan peternakan di kawasan kerjasama utara-utara merupakan ketetapan bersama oleh para Bupati kerjasama utara-utara dan Rektor Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu komoditi yang disepakati untuk dikembangkan melalui penandatanganan *memorandum of understanding* (MOU) tanggal 17 September 2014. Salah satu pertimbangan BKSU memilih pengembangan sapi potong dipilih menjadi program unggulan karena kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan gaya hidup serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang (Daryanto, 2009; Mayulu, *et al.* 2010). Rata-rata konsumsi daging sapi per kapita masyarakat Indonesia antara tahun 2002-2012 sebesar 1,87 kg/kapita/tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,23 persen setiap tahunnya (Pusdatin, 2013b).

Upaya pemenuhan kebutuhan daging sapi terus diupayakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta yang menjalankan usaha peternakan sapi potong. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah populasi sapi potong dan produksi daging sapi yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,83 persen dan 7,48 persen setiap tahunnya (Ditjennak, 2013). Peningkatan populasi dan produksi daging sapi yang terjadi pada kenyataannya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri, baik itu kebutuhan pelaku usaha maupun kebutuhan konsumen akhir. Hal tersebut

dibuktikan dengan masih dibukanya impor sapi hidup maupun daging sapi oleh pemerintah. Bahkan pada tahun 2013 pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan yang menghapuskan sistem kuota impor dan digantikan dengan mekanisme harga referensi (Kemendag, 2013). Penghapusan kuota impor dan pembebasan importasi sapi potong melalui Permendag tersebut menjadi peluang tersediri bagi berkembangnya bisnis penggemukan sapi potong di Indonesia. Pilihan atas komoditas tersebut kemudian diperkuat oleh hasil penelitian Fahrudin dkk tahun 2017 yang menetapkan bahwa komoditas unggulan Kabupaten di kawasan kerjasama utara-utara adalah jagung, sapi potong dan budidaya udang vaname. Setelah masuknya Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 melalui kesepakan Den Hag Belanda tanggal 10 Mei 2017 telah memperkuat visi kawasan kerjasama utara-utara menjadi lumbung pangan di Indonesia Timur dengan dukungan Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan target produksi 1 juta ekor dalam 10 tahun ke depan. Pada awal tahun 2017 Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mencanangkan Indonesia menuju lumbung pangan dunia 2045, untuk komoditas beras, bawang merah, cabai, jagung, gula, kedelei, bawang putih, dan daging sapi. Peluang mewujudkan lumbung pangan dunia dapat tercapai khususnya untuk sapi potong adalah keniscayaan karena Indonesia memiliki potensi pengembangan ditunjang dengan iklim dan sumberdaya manusia yang berlebihan. Untuk itu salah satu strategi yang akan diterapkan adalah pengembangan kawasan peternakan sapi potomg. Pengembangan kawasan peternakan berangkat dari filosofi bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam mensejahterakan peternak rakyat hanya dapat diperoleh apabila pemerintah dan para pihak melakukan berbagai upaya yang memperhatikan prinsip satu manajemen, pengorganisasian (konsolidasi pelaku) pelaku dan pemberdayaan peternak. Penyusunan studi kelayakan pengembangan sapi potong kawasan kerjasama utara-utara yang meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, dan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone

Bolango Provinsi Gorontalo akan memperkuat perencanaan pengembangan sapi potong di kawasan ini.

1. Aspek Produksi Ternak Sapi Potong

Ketersediaan Pakan dan Bahan Baku Pakan

Proyeksi ketersediaan pakan dan bahan baku pakan di kawasan kerjasama utara-utara penting diketahui untuk mendukung target produksi sapi potong 1 juta ekor dalam 10 tahun ke depan sebagaimana dicanangkann Menteri Pertanian di Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 Oktober 2017. Proyeksi bahan baku pakan ini dihitung berdasarkan produksi bahan kering per ton yang berasal dari a). Rumput Alam Liar seperti padang rumput, lahan HMT, hutan sekunder b). Limbah Tanaman Pangan seperti jerami padi sawah, jerami jagung dll c). Tanaman pangan seperti jagung d). Limbah Industri Pangan seperti dedak, bekatul, bungkil kelapa e). Limbah Perkebunan seperti kulit kopi, kulit biji coklat, kulit buah coklat. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi pakan yang tersedia pada 4 kabupaten sebesar 932.586,27 ton bahan kering per tahun. Jumlah ini pada tahun 2016 dapat mensuplai kebutuhan pakan ternak sapi potong hingga 1.371.976 ekor atau melampaui target yang ditetapkan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Yang paling besar ketersediaan pakannya adalah Kabupaten Gorontalo Utara bisa mensuplai kebutuhan pakan hingga 653.746 ekor, kemudiaan diikuti oleh kabupaten Buol hingga 307.433 ekor, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hingga 264.928 ekor dan Kabupaten Bone Bolango 145.869 ekor (lihat tabel 10). Analisa kebutuhan pakan lebih rinci berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, total produksi Bahan Kering (BK) rumput alam di kawasan kerjasama utara-utara adalah 115.638,07 ton BK/tahun pada tahun 2016. BK tersebut berasal dari berbagai lahan baik yang produktif maupun tidak produktif diantaranya padang rumput, lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT), lahan sawah, hutan sejenis, dan hutan sekunder. Produksi BK terbanyak bervariasi antar daerah seperti Kabupaten Gorontalo Utara terbanyak berasal dari lahan HMT sebanyak 22.464 ton BK/tahun, Kabupaten Bone Bolango berasal dari lahan Hutan Sejenis yaitu **8.743,2** ton BK/tahun, Kabupaten

Buol berasal dari lahan hutan sekunder sebanyak 8.063,59 ton BK/tahun dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga berasal dari lahan hutan sekunder sejenis sebesar 9.852,43 ton BK/tahun.

Hasil kajian sumber pakan dan bahan baku pakan dari limbah tanaman pangan paling dominan di kawasan kerjasama utara-utara yaitu sejumlah 538.871,51 ton BK/tahun pada tahun 2016. Total produksi BK ton/tahun tersebut dominan berasal dari jerami jagung **(351.655,5** ton BK/tahun), dan jerami padi sawah (89.540,55 ton BK/tahun) dan sebagian lainnya berasal dari jerami padi gogo, daun ubi kayu, jerami kacang tanah, jerami kacang kedele, jerami dan kacang hijau. Untuk jerami jagung terbesar berasal dari Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 216.888 ton bk/tahun, kemudian disusul oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seluas 75.920,25 ton bk/tahun kemudian Kabupaten Buol sebesar 6.237 ton bk/tahun dan terakhir Kabupaten Bone Bolango sebesar 52.610,25 ton bk/tahun Untuk jerami padi yang dominan berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 47.805,93 ton bk/tahun kemudian Kabupaten Bone Bolango sebesar 21.752,42 ton bk/tahun. Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 1.869,79 ton bk/tahun dan Kabupaten Buol sebesar 18.112,41 ton bk/tahun.

Tanaman pangan di kawasan kerjasama utara-utara yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pakan satu-satunya berasal dari tanaman jagung dengan produksi BK 333.138,64 ton BK/tahun. Jagung dapat digunakan sebagai bahan baku pakan untuk pembuatan konsentrat sapi potong. Limbah industri pangan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pakan untuk pembuatan konsentrat kawasan kerjasama utara-utara adalah dedak padi dan bekatul dengan total produksi adalah 53.564,46 ton BK/tahun. Produksi kedua bahan baku pakan ini di Kawasan Kerjasama Utara-Utara secara terpisah, masing-masing adalah dedak padi sebesar 33.839,14 ton BK/tahun, bekatul sebesar 14.099,64 ton BK/tahun, dan bungkil kelapa sebesar 5.625,68 ton BK/tahun. Produksi dedak padi terbesar adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 8.916,89 ton BK/tahun, produksi bekatul terbesar adalah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 7.168,79 dan produksi bungkil kelapa terbesar adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 3.875,82.

Limbah perkebunan yang dapat digunakan untuk bahan baku pakan dalam pembuatan konsentrat sapi potong kawasan kerjasama utara-utara adalah kulit buah kopi, kulit biji coklat, dan kulit buah coklat. Total produksi dari ketiga bahan baku tersebut adalah **137.683,53 BK**/Tahun. Produksi limbah perkebunan terbesar adalah Kabupaten Buol yaang disebabkan daerah ini merupakan daerah perkebunan kelapa sawit dengan produksi daun sawit sebesar 131.290,69 ton BK/tahun. Penggunaan bahan baku pakan tersebut harus hati-hati sebab mengandung antinutrisi yang dapat menghambat penyerapan makananan pada proses pencernaan. Anti nutrisi dapat dihilangkan dengan berbagai cara diantaranya melalui pengeringan dibawah matahari atau dengan melalui teknologi fermentasi. Untuk jelasnya tentang daya dukung makanan di kawasan kerjasama utara-utara dapat dilihat pada tabel 10

Tabel 10. Daya Dukung Makanan dan Prediksi Sapi Potong BKSU

No	URAIAN	BUOL	GORUT	BOLMUT	BONE BOL	TOTAL
1	Rumput alam/liar	34.543,94	42.718,94	19.657,24	18.717,95	115.638,07
2	Limbah tanaman pangan	26.334,35	300.948,58	136.346,55	75.242,03	538.871,51
3	Tanaman pangan	59.516,16	178.137,34	52.301,04	43.184,10	333.138,64
4	Limbah industri pangan	4.539,43	24.376,08	16.508,09	8.140,86	53.564,46
5	Limbah perkebunan	135.240,87	14,50	547,11	1.767,22	137.569,70
	Total pakan	260.174,76	546.309,20	225.360,09	147.052,16	1.178.896,21
	Prediksi jumlah sapi (ekor)	307.433	653.746	264.928	145.869	1.371.976

Sumber: Data BKSU diolah tahun 2018.

Prediksi jumlah kapasitas penambahan populasi ternak sapi potong (KPPTSP) (tabel 10) wilayah kerjasama utara-utara yang didasarkan pada daya dukung potensi pakan bisa terlaksana bila pengembangan sapi potong dilaksanakan secara intensif dengan pemberian pakan mencukupi, pengembangan bibit sapi terencana dengan baik menggunakan teknologi

inseminasi buatan, tersedia sumberdaya petani yang bisa menangani sapi mulai dari penyediaan pakan alami, pemberian pakan secara rutin, pengawasan kesehatan sapi dan lain-lain seebagainya. Dengan asumsi 1 tenaga kerja bisa menangani 10 ekor sapi, maka untuk mencapai 1 juta ekor sapi di wilayah kerjasama utara-utara dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 100.000 orang atau kalau pembagian secara proporsional, maka setiap kabupaten membutuhkan 25.000 orang petani. Memperhatikan sumber daya petani saat ini jumlah ini tidak terlalu sulit, namun persoalannya apakah mereka mau professional terhadap pekerjaan memelihara sapi daripada pekerjaan lainnya. Ubtuk itu maka keterlibatan dinas peternakan masing-masing kabupaten sangat dibutuhkan yang menjadi perencana di lapangan, pengawalan dan pengawasan terhadap program pengembangan sapi potong. Kalau tidak, maka pengembangan sapi potong di kawasan ini hanya berjalan secara tradisional dan prediksi capaian 1 juta ekor sapi tidak akan tercapai. Berdasarkan hitungan proyeksi jumlah ternak sapi potong wilayah Badan Kerjasama Utara-Utara (BJSU) pola peternakan rakyat dalam 10 tahun hingga tahun 2028 berdasarkan data populasi sekarsng hanya mencapai 227.480 ekor. Proyeksi ini dengan asumsi rata-rata perkembangan sapi sebesar 8 persen pertahun (lihat tabel 11)

Tabel 11. Proyeksi Jumlah Ternak Sapi Potong BKSU 2028-2028 Pola Peternakan Rakyat

Kabupaten	Tahun										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Buol	17.288	18.671	20.164	21.777	23.519	25.400	27.432	29.626	31.996	34.555	37.319
Gorut	34.867	37.657	40.669	43.923	47.436	51.231	55.330	59.756	64.537	69.670	75.276
Bolmut	17.478	18.876	20.386	22.016	23.777	25.679	27.733	29.951	32.347	34.934	36.756
Bone Bolango	36.192	39.087	42.213	45.590	49.237	53.175	57.429	62.023	66.985	72.342	78.129
BKSU	**105.825**	**114.291**	**123.432**	**133.306**	**143.969**	**155.485**	**167.924**	**181.356**	**195.865**	**211.501**	**227.480**

Sumber : Dihitung tahun 2018

Asumsi: Pertumbuhan sapi rata-rata 8% / tahun

Tabel 12. Proyeksi Jumlah Ternak Sapi Potong BKSU 2028-2028 Pola Peternakan Intensif

Kabupaten	Tahun										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Buol	17288	19708	22467	25613	29199	33287	37947	43259	49316	56220	64090
Gorut	34867	39748	45313	51657	58889	67133	76532	87247	99461	113386	129260
Bolmut	17478	19925	22714	25894	29520	33652	38364	43735	49858	56838	64795
Bone Bolango	36192	41259	47035	53620	61127	69685	79440	90562	103241	117695	134172
BKSU	**105825**	**120640**	**137529**	**156784**	**178735**	**203757**	**232283**	**264803**	**301876**	**344139**	**392317**

Sumber : Dihitung tahun 2018

Asumsi: Pertumbuhan sapi rata-rata 14 % / tahun

Apabila diasumsikan ada penanganan intensif terhadap pemeliharaan sapi dan ada pertambahan populasi sapi bunting 70 %, jumlah pedet lahir 56 %, dan jumlah kematian pedet 5 %, serta ada ketambahan impor sapi 2.000 ekor per tahun, maka hasil perhitungan rata-rata pertambahan populasi sapi sebesar 14 % per tahun. Prediksi dengan ketambahan rata-rata 14 % per tahun, maka pada tahun 2028 jumlah sapi di wilayah kerjasama utara-utara sebanyak 392.317 ekor (lihat tabel 12) Jumlah ini masih jauh dari target 1 juta ekor sapi. Untuk mencapai jumlah tersebut dibutuhkan rekayasa kebijakan yaitu menambah jumlah impor sapi dan memperbaiki sistem pemeliharaan sehingga jumlah sapi bunting meningkat, jumlah pedet lahir dan hidup juga meningkat. Hanya saja perlu kesiapan sumberdaya manusia untuk bekerja secara professional untuk mencapai target tersebut

2. Aspek Teknis

Wilayah Kerjasama Utara-Utara lebih banyak dipengaruhi oleh iklim tropis dengan suhu sekitar 20˚C - 37˚C dengan curah hujan rata-rata 192,33 mm/tahun. Adapun kondisi topografi tanahnya datar sampai berombak (25%), berombak sampai berbukit (40%) dengan keadaan tanah yang tergolong subur. Curah hujan di Wilayah Kerjasama Utara-Utara cukup bervariasi setiap bulannya. Curah hujan tinggi terjadi di bulan Desember, Oktober, Juni, dan September. Curah hujan paling tinggi terjadi di bulan Desember yang mencapai 485 mm dengan 22 hari hujan. Sedangkan curah hujan terendah adalah di bulan April yang hanya 27 mm dengan 9 hari hujan. Atas dasar hal tersebut, maka secara teknis pengembangan sapi potong di wilayah kerjasama utara-utara sangat memenuhi persyaratan baik untuk jenis sapi Bali maupun sapi impor seperti sapi Brahman Cross dari Australia, Galician Blonde dari Brazil.

Untuk jenis sapi Bali sudah turun temurun dipelihara petani sehingga jenis sapi ini sudah sangat terterima di masyarakat. Jenis sapi Bali secara fisik memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Warna bulunya pada badannya akan berubah sesuai usia dan jenis kelaminnya, sehingga termasuk hewan dimoprhism-sex. Pada saat masih "pedet", bulu badannya berwarna sawo matang sampai kemerahan, setelah dewasa sapi bali jantan berwarna lebih gelap bila dibandingkan dengan sapi bali betina. Warna bulu sapi bali jantan biasanya berubah dari merah bata menjadi coklat tua atau hitam setelah sapi itu mencapai dewasa kelamin sejak umur 1,5 tahun dan menjadi hitam mulus pada umur 3 tahun. Warna hitam dapat berubah menjadi coklat tua atau merah bata kembali apabila sapi bali jantan itu dikebiri, yang disebabkan pengaruh hormon testosterone.
2. Kaki di bawah persendian telapak kaki depan (articulatio carpo metacarpeae) dan persendian telapak kaki belakang (articulatio tarco metatarseae) berwarna putih. Kulit berwarna putih juga ditemukan pada bagian pantatnya dan pada paha bagian dalam kulit berwarna putih tersebut berbentuk oval (white mirror). Warna bulu putih juga dijumpai pada bibir atas/bawah, ujung ekor dan tepi daun telinga. Kadang-kadang bulu putih terdapat di antara bulu yang coklat (merupakan bintik-bintik putih) yang merupakan kekecualian atau penyimpangan yang ditemukan sekitar kurang daripada 1% . Bulu sapi bali dapat dikatakan bagus (halus) pendek-pendek dan mengkilap.
3. Ukuran badan berukuran sedang dan bentuk badan memanjang.
4. Badan padat dengan dada yang dalam.
5. Tidak berpunuk dan seolah-olah tidak bergelambir
6. Kakinya ramping, agak pendek menyerupai kaki kerbau.
7. Pada tengah-tengah (median) punggungnya selalu ditemukan bulu hitam membentuk garis (garis belut) memanjang dari gumba hingga pangkal ekor.
8. Cermin hidung, kuku dan bulu ujung ekornya berwarna hitam
9. Tanduk pada sapi jantan tumbuh agak ke bagian luar kepala, sebaliknya untuk jenis sapi betina tumbuh ke bagian dalam.

Sapi Bali hidup pada iklim tropik yang lembab dan pemeliharannya relatif mudah terutama dalam penyediaan pakan. Umumnya cara pemeliharaan sapi Bali pada masyarakat di wilayah kerjasama utara-utara dilepas pada lahan yang memiliki hijauan. Pola seperti ini sudah membudaya pada masyarakat secara turun temurun. Oleh karena itu apabila jenis sapi bali yang dikembangkan di wilayah kerjasama utara-utara sangat cocok dengan budaya masyarakat setempat, Demikian pula kalau pola pemeliharaan intensif ketika ditanyakan kepada masyarakat mereka siap asalkan pemerintah menjamin ketersediaan pakan serta pasar dengan harga yang menguntungkan.

Ketika ditanyakan tentang peluang pengembangan sapi impor seperti jenis sapi Brahman Cross dari Australia, Galician Blonde dari Brazil mereka juga siap. Sebagaimana diketahui dalam rangka meningkatkan populasi sapi potong Kementerian Pertanian Republik Indonesia menghimbau agar masyarakat tertarik memelihara sapi impor karena secara ekonomis sangat menguntungkan karena memiliki berat badan hingga 2 sampai 3 kali lipat dari sapi Bali. Secara teknis kedua jenis sapi tersebut sudah teruji bisa menyesuaikan dengan iklim di Indonesia dimana hal tersebut terbukti berhasil dibudidaya pada beberapa daerah seperti di Sulawesi Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain.

Program pengembangan sapi potong di Wilayah Kerjasama Utara-Utara selama ini dilakukan secara tradisional mulai dari penyediaan sapi, pemiliharaan hingga pemasaran. Setiap tahun penyediaan sapi dilakukan oleh pemerintah melalui perguliran kepada kelompok-kelompok peternak dan dipelihara secara tradisional dan umumnya hidup liar mencari makan sendiri hingga pertumbuhan berat badannnya lambat dan tidak terkontrol. Akibatnya perkembangan populasi sapi sangat lambat dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan utama bagi keluarga melainkan sebagai pekerjaan sambilan. Demikian dalam hal pemasaran sapi dilakukan secara tradisional hingga harga penjualan sapi kadang-kadang seadanya sesuai harga yang ditetapkan pembeli apalagi bila sektor rumah tangga sudah kepepet untuk keperluan mendesak. Penjual cenderung menerima harga yang ditetapkan pembeli (price taker) karena ketiadaan informasi tentang harga, mata rantai

perdagangan serta kurangnya pemahaman tentang tata niaga usaha sapi. Adanya ketetapan target pemerintah 1 juta ekor sapi di wilayah ini, maka mengharuskan pemeliharaan sapi harusnya dilakukan secara professional mulai dari pembibitan, penggemukan hingga pasca panen dengan mendirikan industri yang bisa menciptakan permintaan sapi misalnya industri bakso, dendeng dan lain-lain. Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, maka para anggota Badan Kerjasama Utara-Utara sepakat langkah pertama menyiapkan mini ranch pengembangan sapi potong untuk menjadi percontohan bagi masyarakat serta membuat Blue Print pengembangan sapi potong kawasan kerjasama utara-utara. Untuk jelasnya kebijakan masing-masing kabupaten di wilayah kerjasama utara-utara dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Untuk Kabupaten Buol mini ranch sedang dibangun di lokasi KTM Air Terang dilakukan pada area seluas 314,34 ha dengan rincian alokasi pemanfaatan (segmen) sebagai berikut:

a. Area Penerima seluas 73.888,94 m^2 (7,39 ha)
b. Area Penggemukan seluas 89.659,07 m^2 (8,96 ha)
c. Area Pembibitan seluas 206.785,64 m^2 (20,68 ha)
d. Area Ranch I/ Pastura seluas 801.073,74 m^2 (80,11 ha)
e. Area Ranch II/ Pastura seluas 1.199.195,00 m^2 (119,92 ha)
f. Area Hijauan seluas 650.161,45 m^2 (65,016 ha)
g. Area Prasarana Jalan seluas 122.497,44 m^2 (12,25 ha).

Selain daripada itu Pemerintah Kabupaten Buol mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pengembangan ternak sapi yang tertuang dalam SK Bupati Buol 188.09/99.16/P/STAN/2018 tanggal 9 April 2018. Kebijakan ini dikenal sebagai kebijakan one man one cow sebagai himbauan kepada masyarakat Buol berjumlah 152.296 orang untuk senang memlihara sapi. Secara eksplisit kebijakan pengembangan ternak sapi Kabupaten Buol berisi pertama, pengembangan sapi potong pola Mini Ranch, pola integrasi perkebunan sawit dan ternak sapi, pola pengembangan sapi pedesaan, pola pengembangan sapi mandiri melalui aparatur sipil negara. Kedua, pola

pengembangan sapi pedesaan dapat dilakukan dengan memperioritaskan program pengembangan sapi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan perioritas 30 ekor sapi setiap desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, Pola pengambangan peternakan sapi mandiri melalui Aparatur Sipil Negara yaitu a) penyediaan sapi pejabat eselon II sejumlah 4 (empat) ekor, b) penyediaan sapi oleh pejabat eselon III sejumlah 3 (tiga) ekor sapi, c) penyediaan sapi oleh pejabat eselon IV sejumlah 2 (dua) ekor sapi, d) penyediaan sapi oleh ASN non jabatan sejumlah 1 (satu) ekor sapi, Keempat, untuk menjamin perlindungan terhadap pengembangan ternak sapi, setiap ternak sapi diasuransikan oleh perusahaan asuransi yang ditetapkan Bupati, Kelima, program pengadaan sapi secara mandiri dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan yang ditetapkan Bupati 2). Untuk Kabupaten Bone Bolango saat ini sedang disiapkan Dokumen, Survey, Investigasi (SID) mini ranch pengembangan sapi potong di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan dan Desa Tulabolo Barat Kecamatan Suwawa Timur dengan luas 511.11 ha. 3). Untuk Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sedang disiapkan tanah untuk mini ranch di Desa Papualagi Kecamatan Tolinggula yaitu tanah sisa penggunaan lahan transmigrasi sekitar 500 ha. 4). Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sedang disiapkan lahan seluas 1.050 ha yang merupakan eks lahan HGU dan sedang disiapkan alih fungsinya untuk ranch peternakan sapi potong di perbatasan dengan Gorontalo Utara.

Selain kebijakan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Buol juga mencanangkan Program TAURA (Tanah Untuk Rakyat), yaitu program pengentasan kemiskinan dengan cara membagikan tanah eks HGU seluas 30.000 ha kepada 15.000 KK miskin atau setiap rumah tangga mendapat 2 ha tanah. Peruntukkan tanah dimaksud tidak secara spesifik untuk pengembangan sapi potong, namun sangat potensial menjadi pilihan pengembangan lahan bagi RTM penerima sertifikat dengan melakukan pola peternakan intensif.

3. Aspek Legalitas

Pemerintah pada 4 daerah kerjasama utara-utara secara legal menetapkan program pengembangan sapi potong sebagai salah satu program unggulan. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan sentra pengembangan sapi potong, Rencana Strategik Daerah (Renstra) masing-masing daerah juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangka pendek dan jangka panjang. Selain daripada itu masing-masing kabupaten mengeluarkan kebijakan yang sifatnya secara operasional mendukung pencapaian target satu juta ekor dalam sepuluh tahun ke depan. Pola pengembangan sapi potong pada masing-masing daerah kawasan kerjasama utara-utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Perkembangan Kawasan

   Berdasarkan arahan pola ruang RTRW masing-masing kabupaten kerjasama utara-utara terdapat lahan yang bisa digunakan sebagai lahan pengembagan sapi potong seperti Areal Penggunaan Lainnya (APL) dan juga termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangan perkebunan. Adapun tipe kawasan pengembangan sapi potong umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

2. Tipe Kawasan

   Berdasarkan hasil survey dan pengamatan kerjasama utara-utara termasuk tipe kawasan dataran tinggi, yang memiliki kemiringan lereng sangat memadai. Lahan dengan kemiringan 5-8% dan lahan kemiringan 15-25% menunjang pengembangan kawasan pengembangan peternakan yang ditunjang oleh kawasan budidaya pertanian, yakni : perkebunan, pertanian lahan kering (hortikultura) dan peternakan.

3. Potensi Dasar

   Potensi wilayah kerjasama utara-utara memiliki kesesuaian untuk dijadikan pengembangan sapi potong yang meliputi kondisi iklim dan curah hujan, kesesuaian dan kemampuan lahan termasuk ketersediaan

air untuk ternak, pengairan dan air minum. Umumnya jenis tanah adalah Mediteran Merah Kuning, Mediteran Merah Kuning, dengan jenis tanah dominan adalah Typic Haplustalfs seluas 107.41 ha (15.31%), Typic Ustropepts seluas 596.86 ha (84.06%) dan Fluventic Ustropepts seluas 5.73 ha (0.81%). Infrastruktur jaringan jalan umumnya telah tersedia dimana jalan yang akan dikembangkan sebagai jalan kabupaten dengan fungsi sebagai jalan lokal.

4. Fasilitas Layanan Peternakan

   Fasilitas layanan peternakan telah tersedia di masing-masing kabupaten melalui ptogram dinas peternakan/peternakan setempat bahkan pemerintah Pusat telah menjanjikan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) dan untuk tahap awal di Kabupaten Buol.

5. Nisbah Lahan Pangan / Penduduk

   Ketersediaan lahan pangan dan lahan permukiman sangat menunjang adanya pengembangan kawasan pertanian dan peternakan di masing-masing kabupaten kerjasama utara-utara.

6. Kapasitas Tampung Ternak

   Kapasitas daya tampung ternak diharapkan akan mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan pengembangan pada masing-masing daerah baik secara tradisional maupun intensif.

7. Jarak Dengan SWP

   Akses jalan ke lokasi pengembangan sapi potong umumnya sudah terbuka melalui pembukaan jalan akses, Di beberapa tempat masih perlu perbaikan jalan dan jembatan untuk mempermudah akses pengangkutan alat-alat pertanian/peternakan maupun akses pemasaran sapi.

8. Pengetahuan Peternak

   Dengan adanya kondisi eksisting dimana sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam kesuksesan budidaya peternakan baik yang dilakukan pada peternakan dan juga pertanian lahan kering (perkebunan),

maka program peningkatan pengetahuan peternak, akan menjadi prioritas program untuk mendukung pengembangan kawasan.

9. Ketersediaan Listrik

   Dibeberapa daerah jaringan listrik belum tersedia oleh karena itu hal ini perlu mendapat perhatian terutama apabila listrik sangat dibutuhkan dalam pengembangan sapi potong secara intensif.

10. Kemudahan Transport

    Ketersediaan prasarana jalan dan sarana angkutan cukup memadai sehingga mempermudah aksesibilitas ke kawasan rencana pengembangan peternakan sapi potong. Sarana perhubungan khususnya jalan akses dan jembatan perlu mendapat perhatian baik pemerintah desa, kecamatan maupun provinsi.

11. Jarak Pemasaran

    Jaringan pemasaran perlu ditata dengan baik sehingga para peternak memiliki kepastian dalam mengakses pasar dengan harga yang menguntungkan. Kelembagaan peternak perlu juga ditata tidak saja kelompok peternak tapi juga dengan usaha koperasi yang memiliki semangat sel help atau semangat mendorong diri sendiri untuk kesejahteraan bersama.

4. Aspek Pemasaran

Subsektor peternakan merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian yang selalu memiliki laju pertumbuhan positif dan kontribusi yang cenderung meningkat (Ditjennak, 2013). Sapi potong merupakan sumber penyedia daging terbesar kedua di Indonesia setelah ayam (Ngadiyono, 2004; BKPM 2012). Daging sapi merupakan salah satu komoditas prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan nasional, terutama ketahanan pangan asal ternak (Saragih, 2000; Daryanto, 2009; Priyanti, *et al.*2011). Selain mengandung gizi yang tinggi, daging sapi juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Daging sapi merupakan komoditas peternakan yang bersifat *high income elastic*. Artinya, dengan semakin meningkatnya pendapatan

maka akan diikuti dengan meningkatnya permintaan terhadap daging sapi (Saragih, 2000; Ilham, 2009).

Terdapat dua pelaku utama dalam industri sapi potong di Indonesia yaitu peternak rakyat dan perusahaan berbadan hukum (swasta dan BUMN). Perbedaan diantara keduanya terletak pada skala usaha, permodalan, dan pemeliharaan. Peternak rakyat umumnya memiliki skala usaha relatif kecil, permodalan terbatas, sistem pemeliharaan tradisional dalam bentuk usaha pembibitan maupun penggemukan (Hadi dan Ilham, 2002; Suryana, 2009; Sunari *et al.*, 2010; Ekowati *et al.*, 2011; Ashari *et al.*, 2012; Prasetyo *et al.*, 2012). Sementara itu, perusahaan berbadan hukum umumnya memiliki skala usaha yang relatif besar, padat modal, dan sistem pemeliharaan lebih modern dalam bentuk usaha pembibitan dan penggemukan. Namun, umumnya usaha pembibitan kurang diminati perusahaan swasta karena efisiensinya rendah dan jangka pengembalian modal panjang (Suryana, 2009; Priyanto, 2011).

Perkembangan industri penggemukan sapi potong di Indonesia didukung oleh berbagai faktor, di antaranya faktor harga, peningkatan kebutuhan, dan kebijakan pemerintah. Harga daging sapi, baik di tingkat produsen maupun konsumen tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang dikeluarkan Pusdatin (2013a) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 8.23 persen pada rata-rata harga produsen daging sapi dan peningkatan sebesar 8,92 persen pada rata-rata harga konsumen daging sapi di seluruh Indonesia pada periode 2008-2013. Trend positif harga daging sapi tersebut menjadi peluang bagi berkembangnya bisnis penggemukan sapi potong.

Peningkatan kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia juga menjadi salah satu peluang berkembangnya bisnis penggemukan sapi potong di Indonesia. Kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan gaya hidup serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang (Daryanto, 2009; Mayulu, *et al.* 2010). Rata-rata konsumsi daging sapi per kapita masyarakat Indonesia antara

tahun 2002-2012 sebesar 1,87 kg/kapita/tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,23 persen setiap tahunnya (Pusdatin, 2013b).

Upaya pemenuhan kebutuhan daging sapi terus diupayakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta yang menjalankan usaha peternakan sapi potong. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah populasi sapi potong dan produksi daging sapi yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan masing-masing pening- katan berturut-turut sebesar 6,83 persen dan 7,48 persen setiap tahunnya (Ditjennak, 2013).

Peningkatan populasi dan produksi daging sapi yang terjadi pada kenyataannya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri, baik itu kebutuhan pelaku usaha maupun kebutuhan konsumen akhir. Hal tersebut dibuktikan dengan masih dibukanya impor sapi hidup maupun daging sapi oleh pemerintah. Bahkan pada tahun 2013 pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan yang menghapuskan sistem kuota impor dan digantikan dengan mekanisme harga referensi (Kemendag, 2013). Penghapusan kuota impor dan pembebasan importasi sapi potong melalui Permendag tersebut menjadi peluang tersediri bagi berkembangnya bisnis pengembangan sapi potong di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dari sisi pemasaran terbuka peluang pengembangan sapi di Indonesia termasuk di Kawasan kerjasama utara-utara. Selama ini produksi sapi potong di 4 daerah ini pemasarannya terutama untuk memenuhi kebutuhan lokal walaupun banyak permintaan dari daerah sekitar seperti ke Tarakan Kalimatan. Kebijakan pengembangan sapi potong masih memberi harapan dimasa datang.

5. Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Sumberdaya Manusia (SDM) yang lebih dititik beratkan pada aspek ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam pengembangan sapi potong. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksananakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam konteks pengambangan sapi potong yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah mereka yang melakukan kegiatan pemeliharaan sapi mulai dari sapi bunting, malahirkan hingga penggemukan.

Tabel 13. Jumlah Kelompok dan Peternak Sapi di Kawasam Kerjasama Utara-Utara

No.	Kabupaten	Jumlah Kelompok	Jumlah Peternak
1.	Buol	60	120
2.	Gorontalo Utara	135	3.593
3.	Bolaang Mongondow Utara	81	951
4.	Bone Bolango	98	980
	Total	374	5.644

Sumber: Dinas Pertanian BKSU, 2018.

Di kawasan kerjasama utara-utara animo untuk menjadi peternak tersebar hampir disemua kecamatan dan ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat sudah terbiasa memelihara sapi tapi umumnya masih sistem tradisional. Apabila pemerntah memprogramkan sistem pemeliharaan secara moderen peluang adaptasinya sangar terbuka. Tabel 13 ditampilkan kelompok peternak yang sudah memperoleh bantuan dari pemerintah dalam bentuk perguliran sapi pada masing-masng kabupaten kawasan kerjasama utrara-utara. Laporan pengelompokkan biasanya dikaitkan dengan jumlah penerimaan bantuan sehingga jumlah peternak biasanya lebih besar dari yang tercatat. Ketika dilakukan konfirmasi kesiapan mereka menerima program pemerintah dengan target jumlah produksi sapi potong sebanyak 1 juta ekor sapi, umumnya mereka menjawab siap asalkan pemerintah menjamin pasar dengan harga yang menguntungkan peternak. Selama ini pasar masih dikuasai pedagang sehingga terkadang mereka menerima harga tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini pulalah yang mengakibatkan pekerjaan sebagai peternak sapi bukanlah tujuan utama terutama generasi muda sekarang ini semakin kurang yang tertarik menjadi peternak. Oleh karena itu sekalgus hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah apabila ingin berhasil dalam pencapaian

target produksi sapi potong 1 juta ekor sapi dalam 10 tahun ke depan, maka hal yang penting disiapkan sejak dini adalah aspek SDM peternak tidak saja dari jumlah tapi juga kualitas peternak yang berorientasi pengembangan sapi potong adalah bagian dari bisnis rumah tangga. Perlu diciptakan pemahaman dan sikap sense of belonging (rasa memiliki) pekerjaan peternak sapi adalah pekerjaan utama bukan pekerjaan sampingan. Untuk itu adanya rencana pembangunan mini ranch pada masing-masing kabupaten merupakan upaya pemerintah dalam memberikan percontohan kepada masyarakat peternak tentang cara pemeliharaan sapi yang baik serta mini ranch ini menjadi lokasi bagi mahasiswa untuk melakukan praktek lapang serta para dosen melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

6. Aspek Keuangan

Aspek Keuangan digunakan untuk melihat kelayakan usaha dari sisi pemanfaatan modal apakah menguntungkan atau tidak. Pada analisa ini akan dihitung semua komponen biaya yaitu biaya investasi awal, biaya tetap dan biaya variabel yang merupakan biaya operasional. Asumsi yang digunakan dalam analisis keuangan adalah:

Penggemukan Sapi

1. Sapi bakalan berumur 8 bulan (equivalen) masa makan sapi normal dibeli dengan harga Rp.5 juta per ekor.
2. Target pemeliharaan selama 8 bulan dan dijual pada umur 1.5 tahin (18 bulan)
3. Pakan selama penggemukan yaitu rumput gajah Rp/ 15.000 per hari, dedak padi halus Rp. 850.- per hari, Ampas tahu Rp. 7.000.- per hari
4. Satu orang tenaga kerja bisa menangani 10 ekor sapi
5. Kandang dibuat semi permanen dengan lantai cor semen, dinding, dan kerangka terbuat dari papan kayu serta atap genting. Kandang bisa dipakai selam 4 tahun.
6. Masa pakai peralatan dengan perlengkapan kandang selama 1 tahun.

7. Kotoran sapi dihasilkan per ekor sd 20 kg per hari dan dijual Rp.750.- per kg.
8. Sewa lahan 500 meter persegi selama 1 tahun Rp. 500.000
9. Biaya pembangunan kandang Rp. 20.000.000
10. Peralatan dan perlengkapan kandang Rp. 1.000.000

Biaya tetap

- Pengadaan sapi 10 ekor @ Rp. 5.000.000.- = Rp. 50.000.000.-
- Penyusutan sewa lahan 1/4 x Rp. 500.000 =Rp. 125.000 per tahun atau per bulan Rp. 10.416.-
- Penyusutan kandang 1/4 x Rp. 20.000.000 = Rp. 500.000 per tahun atau per bulan Rp. 41.666.-
- Penyusutan peralatan dan pelengkapan 1/4 x Rp. 500.000 = Rp. 125.000 per bulan Rp. 10.416.-

Total Biaya Penyusutan per bulan Rp. 62.500 atau 8 bulan pemeliharaan Rp. 500.000.-

Biaya Tidak Tetap

Pakan Selama 8 Bulan

- Rumput gajah 10 ekor x 8 bulan x 30 hari x Rp. 15.000.= Rp. 36.000.000.-
- Dedak Padi halus 10 ekor x 8 bulan x 30 hari x Rp. 850.- = Rp. 2.040.000.-
- Ampas Tahu 10 ekor x 8 bulan x 30 hari x Rp. 7.000.- = Rp.16.800.000.-
- Tenaga Kerja 1 oran x 8 bulan x 30 hari x Rp. 50.000 = Rp. 12.000.000.-

Total biaya tidak tetap =Rp. 66.840.000

Total Biaya Operasional = Total biaya tetap + Total biaya tidak tetap

= Rp. 50.500.000 + Rp. 66.840.000.- = Rp. 117.340.000.-

Penerimaan

- Penjualan Sapi 10 ekor x Rp. 13.000.000.- = Rp. 130.000.000.-
- Penjualan kotoran 10 ekor x 25 kg x 30 x 8 bulan Rp. 750.- = Rp.4.500.000.-

Total Penerimaan = Rp. 134 500..000.-

Analisa Laba/Rugi

Keuntungan =Total penerimaan – total biaya operasional

=Rp. 134.500..000 – Rp. 117.340.000.- = Rp. 17.160.000.-

Analisis Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)

Analisis B/C ratio digunakan untuk menilai kelayakan suatu usaha apa bisa dijalankan atau tidak. Bila nilai B/C ratio yang diperoleh sama dengan 1 (satu), berati titik pulang modal atau perusahaan bisa menutupi semua biaya operasionalnya tetapi tidak memperoleh keuntungan. Jika nilai B/C ratio lebih besar dari 1 (satu), maka perusahaan selain bisa menutupi semua biaya operasionalnya juga sudah memperoleh keuntungan. Jika nilai B/C ratio lebih kecil dari 1 (satu), maka perusahaan dalam posisi merugi dan tidak layak diteruskan. Hasil Rumus B/C ratio adalah sebagai berikut: Total Pendapatan : Total biaya operasional, jadi B/C Ratio = Rp. 134.500..000 –: Rp. 117.340.000.- = 1.46 (feasible) yang berarti setiap keluar biaya 1 satuan masih mendatangkan keuntungan sebesar 0,46 kali 1 satuan biaya dan dengan demikian pengembangan sapi potong di wilayah kerjasama utara-utara layak untuk dikembangkan.

Analisis Break Event Point (BEP)

BEP = Total Biaya Operasional : Harga Penjualan

BEP = Rp. 117.340.000 : Rp. 134.500.000- = 0,87

Break Event Point 0,87 x 8 bulan = 6,97 bulan. Artinya titik pulang modal dalam masa pemeliharaan sapi potong 6,97 bulan.

Dari hasil analisis keuangan di atas menunjukkan bahwa pengembangan sapi potong di Kawasan Kerjasama Utara-Utara layak untuk dilaksanakan.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan kerjasama utara-utara potensial dan layak untuk pengembangan sapi potong dengan target 1 juta ekor dalam 10 tahun (2018-2028) yang ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek ketersediaan pakan, sumberdaya manusia, sosial budaya dan aspek ekonomi
2. Tahapan untuk mewujudkan target tersebut saat ini pemerintah daerah melalui Bappeda dan Dinas Pertanian dan Peternakan daerah setempat sedang membangun Mini Ranch pengembangan sapi potong sebagai percontohan kepada masyarakat. Selain dari pada itu saat ini juga sedang dibuat Blue Print pengembangan sapi potong untuk mencapai 1 juta ekor sapi potong dalam 10 tahun ke depan

2. Saran-saran

1. Perlu komitmen dari semua unsur pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan pengembangan sapi potong yang dapat diimplementasikan dalam program dan anggaran
2. Perlu komitmen masyarakat untuk mewujudkan program 1 juta ekor sapi di daerah ini seperti komitmen pengembangan sapi potong secara moderen, dukungan investor dalam pembiayaan dan kelembagaan yang mengarah pada swadaya peternak.

BAB V
PEMBUATAN MINI RANCH PENGEMBANGAN SAPI POTONG KAWASAN KERJASAMA UTARA-UTARA

Dalam mendukung kebijakan pencapaian target pengembangan 1 juta ekor sapi di kawasan kerjasama utara-utara, maka ada serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing kabupaten seperti pengembangan mini ranch untuk sapi potong, kewajiban setiap individu satu ekor sapi untuk dipelihara (one man one cow), kerjasama dengan perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengembangan sapi potong, program kemitraan dengan investor dalam pengembangan sapi potong dan lain-lain.

Pengembaangan Mini Ranch Untuk Sapi Potong

Program Pencapaian se-Juta ekor sapi merupakan program yang dicanangkan Menteri Pertanian RI tanggal 30 Oktober 2017 di Kabupaten Bone Bolango untuk kawasan kerjasama utara-utara. Sejalan dengan arahan menteri tersebut masing-masing kabupaten juga telah memasukkan program tersebut sebagai salah satu program prioritas masing-masing Pemerintah Daerah kawasan kerjasama utara-utara dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya lokal khususnya ternak sapi potong. Pencapaian se-juta sapi potong tersebut melibatkan partisipasi peternak, pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah.

Dalam rangka pencapaian target tersebut, maka masing-masing kabupaten mengeluarkan kebijakan seperti pembuatan mini ranch pengembangan sapi potong semenjak tahun 2017 yang diawali dengan penyusunan Dokumen Survey, Investigasi, Design (SID) dan Detail Design (DD) Pengembangan Kawasan Peternakan sapi. Masing-masing pemerintah daerah menyadari

adanya potensi perolehan keuntungan dan nilai tambah baik berupa penyerapan tenaga kerja baru maupun sebagai alternative tambahan pendapatan bagi keluarga peternak melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) lokal melalui pengembangan peternakan sapi. Selain itu, program prioritas ini akan semakin meningkatkan penyediaan daging sapi yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) khususnya bagi masyarakat baik di kawasan kerjasama utara-utara maupun masyarakat sekitarnya serta akan berkontribusi secara Nasional dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan hewani.

Pencapaian target 1 juta ekor dalam 10 tahun ke depan akan sangat tergantung dari partisipasi penuh masyarakat peternak sapi dengan pertimbangan bahwa populasi ternak sapi saat ini relative kecil untuk 4 kabupaten (105.825 ekor) tahun 2018. Apabila tidak ada kebijakan inovatif, maka dalam 10 tahun ke depan dengan asumsi tingkat pertumbuhan sapi potong 8 % per tahun pada tahun 2028 sebesar 227.480 ekor. Prediksi ini didasarkan pada pengamatan performance populasi sapi seiring dengan budaya beternak yang hanya mencontoh peternak disekitarnya, atau sekedar mengikuti cara orang tua dengan pemeliharaan seadanya. Kondisi ini teramati dari terbatasnya pemberian pakan, bahkan dilepas merumput tanpa memperhitungkan kecukupan nutrisi, semua ini berkonsekuensi terhadap perlambatan pertumbuhan jumlah ternak, demikian pula terhadap pertambahan bobot badan hidup. Ketergantungan peternak terhadap padang penggembalaan alam sebagai sumber pakan utama perlu diperhitungkan kembali karena umumnya memilki produktivitas dan kualitas hijauan yang rendah.

Pada dasarnya, secara teoritis, padang penggembalaan merupakan sumber penyediaan hijauan pakan bagi ternak yang efisien dalam suatu usaha peternakan dan merupakan area padang rumput dimana ternak digembalakan. Berbeda halnya dengan padang penggembalaan masyarakat di daerah ini, yang semuanya terkategori padang penggembalaan alam, umumnya memiliki campuran rumput dan leguminosa yang tidak seimbang, dilain pihak paduan kedua komponen ini dapat saling melengkapi dalam mencukupi kebutuhan

nutrisi ternak. Padang pengembalaan selain memiliki fungsi sebagai sumber pakan hijauan utama bagi ternak ruminansia, juga berfungsi sebagai sarana pemeliharaan dan penanganan ternak, wahana pengembangan ekonomi masyarakat, pelestarian sumber daya genetik ternak wilayah dan memiliki nilai ekonomis lingkungan sekitarnya, wahana pembelajaran peternak dan keorganisasian kelompok ternak (Soekardono, 2009 ; IPB, 2016). Melihat arti penting dan fungsi padang penggembalaan dalam sistem Agribisnis Peternakan Sapi, maka dibutuhkan penyusunan dokumen SID dan DD, agar desain padang penggembalaan dapat dijadikan rujukan pola pengelolaan ternak sapi yang mudah dilakukan oleh masyarakat dalam mewujudkan Pengembangan Kawasan Peternakan menuju pencapaian target 1 juta ekor sapi tahun 2028.

Seiring dengan upaya percepatan pembangunan di kawasan ini yang luasnya mencapai wilayah daratannya 9.662,04 km^2 memiliki potensi pengembangan peternakan yang menjanjikan. Peluang pengembangan peternakan tertera dalam dokumen RPKP (Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan) masing-masing kabupaten yang merekomendasikan salah satu komoditas unggulan adalah pengembangan peternakan sapi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Fahrudin dkk (2017/, juga merekomendasikan pengembangan sapi potong adalah produk unggulan di kawasan ini.

Keberhasilan pengembangan ternak sapi akan menjadi salah satu indikator penting pencapaian kinerja masing-masing kabupaten sesuai dengan Nawacita pemerintahan Jokowi. Adapun populasi ternak sapi saat ini masih tergolong kecil, dengan sistim pemeliharaan tradisional dan semi-intensif, pemberian hijauan seadanya, lebih mengandalkan padang penggembalaan alami disekitar kediaman peternak. Selain ternak sapi, juga diusahakan ternak lainnya seperti kambing, babi, ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur, itik dan bebek, dengan populasi terbesar adalah ayam kampung, dipelihara sebagai ternak rumahan.

Sukses pengembangan kawasan peternakan khususnya ternak ruminansia sangat ditentukan oleh ketersediaan pakan hijauan secara kuantitas, kualitas,

dan tersedia secara kontinyu. Secara prinsip, hijauan makanan ternak bersumber dari padang rumput alam yang didukung dengan penanaman hijauan, namun perlu diperhatikan bahwa jenis dan kualitas hijauan dipengaruhi oleh kondisi ekologi dan iklim di suatu wilayah. Artinya bahwa ketersediaannya tidak sepanjang tahun, dan hijauan yang berkualitas ini merupakan suatu kendala yang perlu mendapatkan solusi yang tepat. Ternak sapi sebagai salah satu penghasil daging dan susu yang pakan utamanya adalah hijauan memiliki potensi pengembangan secara komersial, namun kendala dalam penyediaan hijauan dan padang penggembalaan perlu dirumuskan secara rinci dalam perencanaan ke depan. Untuk itu pengembangan mini ranch di masing-masing kabupaten diharapkan akan menjadi tempat percontohan bagi masyarakat dalam pengembangan sapi potong, menjadi tempat praktek lapangan bagi para mahasiswa.

3. Pembangunan Mini Ranch Kabupaten Buol

Pembangunan Mini Ranch di Kabupaten Buol dilaksanakan di ex Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang Kecamatan Tiloan berjarak 27 km dari ibu kota Kabupaten Buol. Daerah tersebut dapat dicapai dengan kenderaan roda dua juga dengan roda empat. Topografi daerah tersebut bervariasi dari areal datar, lereng (sudut elevasi kurang dari 30^{o}), dan bukit. Ketinggian (altitude) lahan bervariasi dari 50 meter sampai 300 meter di atas permukaan laut (m dpl), berkorelasi dengan variatifnya siteplan yang dihasilkan. Dipilihnya lokasi tersebut dharapkan menjadi klaster pengembangan sapi potong sebagai dukungan terhadap KTM Air Terang yang selama ini tidak difungsikan. Sebagai klaster ekonomi pengembangan sapi potong maka langkah yang ditempuh adalah (1) pemenuhan kbutuhan dasar *mini ranch* 2) penataan kawasan termasuk pemenuhan prasarana 3) pengembangan kelengkapan sarana pendukung aktifitas kawasan. Pemenuhan dasar kawasan tersebut merupakan hal yang utama yang harus dipenuhi untuk standar kebutuhan minimum suatu *mini ranch* yang telah secara cermat dikaji oleh tim penyusun SID dan DD khususnya Ahli Peternakan. Pemenuhan kebutuhan standar merupakan syarat berlangsungnya kegiatan di *Mini ranch* yang berkorelasi positip dengan

peningkatan “nilai ekonomi sosial kawasan” . Pada posisi tersebut pemerintah daerah menjadikannya sebagai pusat pelatihan (training centre) untuk dapat mengedukasi masyarakat peternak, meningkatkan minat masyarakat untuk berperan dalam membangun peternakan komunitas. Demikian halnya dengan pembangunan sarana pendukung akan membangkitkan semangat dan beragam aktifitas bahkan dapat meningkatkan ekonomi kreatif lainnya semisal berperan sebagai objek wisata pendidikan peternakan yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Kawasan mini ranch ini merupakan kawasan yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten khususnya untuk lokasi pendidikan dan pelatihan di bidang peternakan disamping usaha pengembangan peternakan (pembibitan sapi potong). Kedua jenis usaha tersebut membutuhkan hijauan pakan yang cukup. Oleh karena itu upaya pengadaan satuan ternak sapi harus disesuaikan dengan besaran suplai hijauan. Berdasarkan hasil penelitian Prof. Dr. Marhawati Mappatoba dkk (2017), bahwa hasil cuplikan hijauan dari 4 lokasi yang dilakukan, kawasan mini ranch yang direncanakan memiliki komposisi botanis sebagai berikut: 26,6 % rumput, 15,2 % legum, dan 58,2 % gulma. Menurut Dyksterhuls yang disitasi oleh Amar (2012), komponen hijauan pakan sebanyak 41,8 % (rumput+legum) termasuk dalam kondisi buruk atau miskin. Ditambah lagi komponen gulma yang ada di lokasi sebanyak 58,2 % merupakan vegetasi semak belukar yang mengindikasikan bahwa lokasi calon *mini ranch* didominasi oleh tumbuhan yang tidak disukai/dimakan oleh ternak dan berkualitas rendah. Kondisi seperti ini merupakan hal umum dijumpai pada padang penggembalaan alam di wilayah tropik (Humpreys 1978, Amar 2012) sehingga konsukwensinya melakukan perombakan lahan sampai siap tanam. Adapun daya dukung lahan carryng capacity (CC) lahan yang ada hanya dapat dihuni oleh seperempat ekor sapi per hektar yang berarti bahwa akan dibutuhkan 4 ha lahan untuk memelihara sapi dengan baik.

Secara kasat lahan mini ranch pengembangan sapi potong Kabupaten Buol dapat dilihat sebagai berikut:

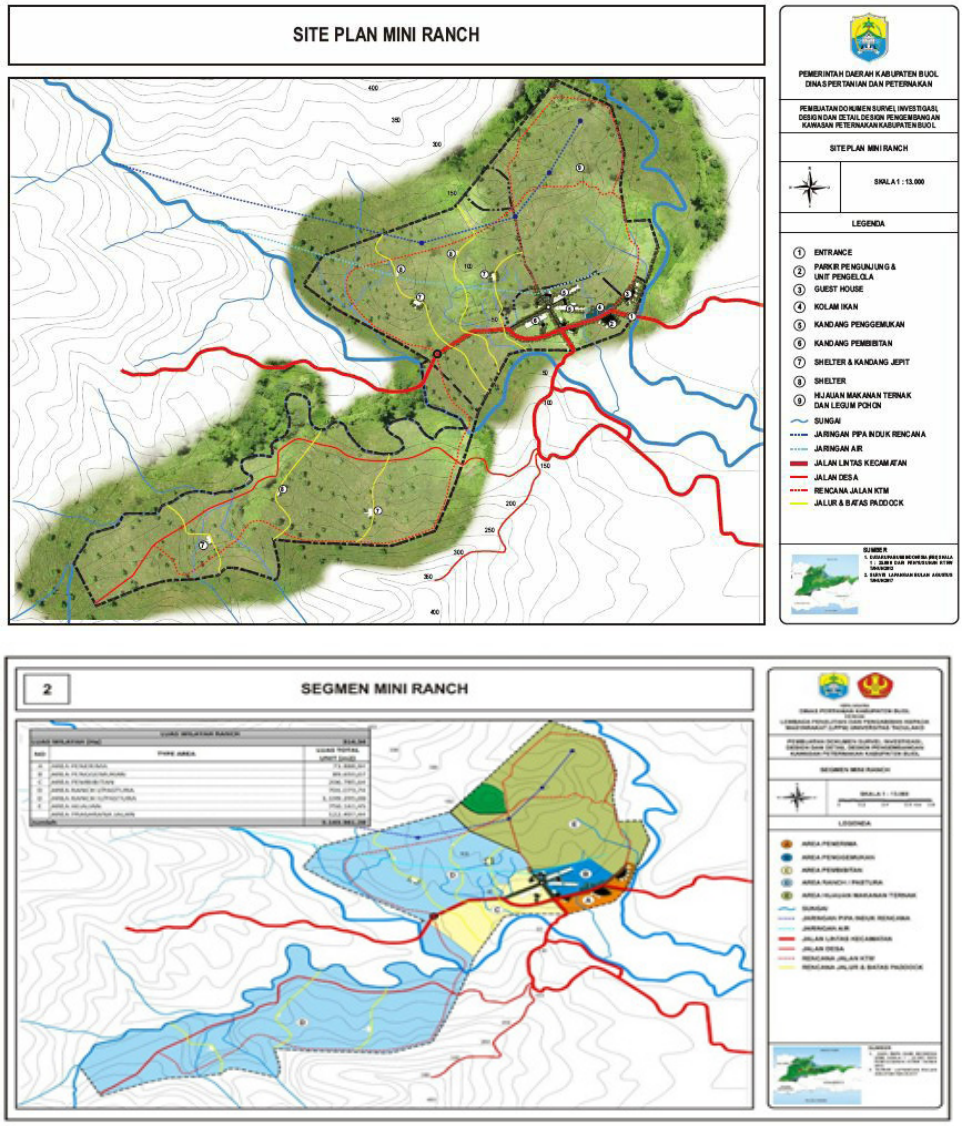

Gambar 2. Mini Ranch Pengembangan Sapi Potong Kab. Buol

4. Pembangunan Mini Ranch Kabupaten Bone Bolango

Pembangunan sektor pertanian, khususnya sub sektor peternakan secara kontinyu dan terarah dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan

peningkatan pendapatan masyarakat, dan secara tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Sumber daya manusia bersama-sama sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis mengerakkan pembangunan peternakan untuk mencapai peningkatan produksi peternakan. Kontribusi sektor peternakan, yaitu pada penyediaan bahan pangan asal hewan dan bahan baku industri, serta ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sub sektor peternakan merupakan salah satu penyangga kebutuhan dan komoditas utama, yaitu : daging, telur dan susu. Ketiga komoditas tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan populasi ternak yang memadai dengan produktivitas tinggi.

Masyarakat peternakan di kabupaten Bone Bolango secara khusus maupun provinsi Gorontalo pada umumnya, sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholders*) berperan sangat penting dalam upaya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, karena masyarakat adalah pelaku utama bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah ini.

Tujuan utama pembangunan peternakan adalah peningkatan penyediaan Produk Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) dan kesejahteraan peternak melalui kebijakan dan program pembangunan peternakan yang berdaya saing berkelanjutan, dengan mengoptimalkan pemantapan sumber daya lokal.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di wilayah kabupaten Bone Bolango secara khusus, maupun kawasan kerjasama utara-utara pada umumnya sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya

manusia (SDM) yang ada dapat menjadi salah satu tumpuan dalam percepatan pembangunan.

Wilayah Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi sumber daya peternakan yang relatif memadai, sehingga apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan peternakan secara signifikan, kabupaten Bone Bolango dapat dijadikan sebagai salah satu sentra pengembangan kawasan peternakan yang memiliki peran strategis dalam wilayah kerjasama utara-utara.

Berdasarkan data yang tertera dalam Buku Bone Bolango Dalam Angka Tahun 2017, tertulis situasi perekonomian kabupaten Bone Bolango tahun 2016 terlihat semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2016, nilai PDRB Kabupaten Bone Bolango atas dasar harga berlaku sebesar 3.509 milyar rupiah mengalami kenaikan dari 3.137 milyar rupiah pada tahun 2015.

Dari distribusi persentase menurut harga berlaku tahun 2016 terlihat bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi perekonomian kabupaten Bone Bolango. Pada tahun 2016, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai kontribusi sebesar 36,16%. Pada tahun 2016 populasi sapi potong di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 28.350 ekor, naik 2,29 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan populasi ternak yang lain seperti kambing sebanyak 6.381 ekor, dan kuda sebanyak 271 ekor. Populasi unggas terbanyak, yaitu ayam pedaging sebanyak 200.600 ekor selanjutnya diikuti ayam kampung sebanyak 177.731 ekor.

Data distribusi persentase menurut harga berlaku tahun 2016 dan data peternakan tersebut diatas memberikan informasi/gambaran awal bahwa sub sektor peternakan di wilayah kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu potensi yang sangat memadai apabila dikembangkan.

Dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2031 juga terlihat jelas bahwa arahan rencana pengembangan kawasan budidaya peternakan adalah : (1) *Peningkatan diversivitas ternak, meskipun perlu mempertimbangkan kondisi wilayah yang sesuai serta budaya masyarakat*

; (2). *Pembuatan skim pengembangan usaha peternakan skala besar, karena potensi pengembangan yang sesuai cukup luas* ; (3). *Pengembangan sarana pendukung usaha peternakan, seperti industri pakan ternak, pembangunan rumah potong hewan, penggemukan ternak (cattle fatening), industri pengalengan daging, pembibitan, dll* ; (4). *Pembuatan grand design peternakan di Kabupaten Bone Bolango, sebagai suatu kesatuan dengan konsep agropolitan provinsi, dan juga dengan sub-sektor pertanian lainnya*.

Dalam arahan pengembangan kawasan peruntukan untuk sub sektor peternakan pada RTRW Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031, tertera antara lain : (1). Sentra ayam kampung di Kecamatan Suwawa Desa Tingkohobu dan Kecamatan Bone Pantai Desa Tongo; (2). Sentra ayam ras petelur di Kecamatan Bulango Timur, Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Suwawa Desa Huluduotamo dan kecamatan Tilongkabila, Desa Tamboo; (3). Sentra ayam ras pedaging di Kecamatan Bulango Selatan Desa Ayula, Kecamatan Tilongkabila Desa Tamboo dan Kecamatan Tapa; (4). Sentra itik di Kecamatan Tilongkabila Desa Iloheluma dan Kecamatan Kabila Desa Talango; (5). Sentra kambing di Kecamatan Bulango Utara Desa Langge, Kecamatan Kabila Desa Dutohe dan Desa Talango, Kecamatan Bone Pantai Desa Bilungala; dan (6). Sentra sapi potong di Kecamatan Bulango Ulu Desa Owata, Kecamatan Bulango Utara Desa Boidu, Kecamatan Suwawa Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa Timur Desa Tilangobula dan Kecamatan Kabila Desa Poowo Barat.

Dengan demikian untuk mendukung pembangunan pertanian sesuai arahan rencana pengembangan kawasan budidaya pertanian dalam rencana pola ruang kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2031, maka diperlukan adanya pengembangan kawasan pertanian terpadu di wilayah kabupaten Bone Bolango tahun 2018, pada lokasi wilayah desa Bondawuna-kecamatan Suwawa Selatan. Di daerah tersebut akan dikembangkan *mini ranch* pengembangan sapi potong yang terintegrasi dengan pengembangan konsep agropolitan dan sub-sektor pertanian lainnya. Berikut ini tata letak lokasi pengembangan pertanian terpadu dan *mini ranch* pengembangan sapi potong Kabupaten Bone Bolango.

Peta Arahan Mini Ranch Kawasan Pertanian Terpadu Dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango

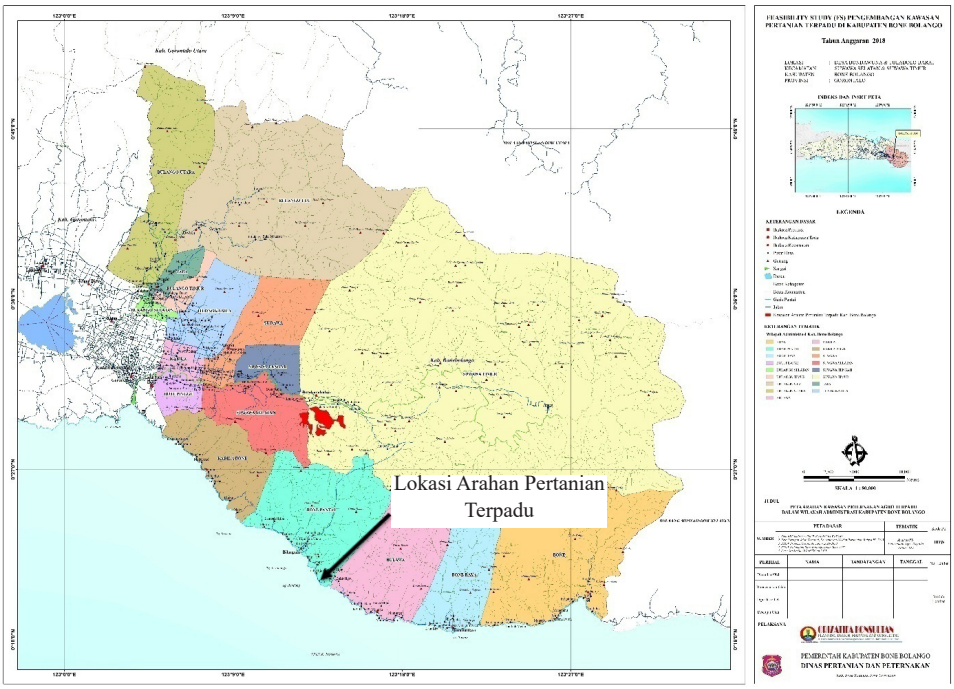

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Gambar 3. Peta Arahan Mini Ranch Kawasan Pertanian Terpadu Bone Bolango

Secara geografis, wilayah pengembangan kawasan pertanian terpadu seluas 710.01 Ha yang terletak di antara 0° 29’ 13.8364” - 0° 29’ 56.6767” Lintang Utara (LU) dan 123° 13’ 24.0732” – 123° 13’ 34.0240” Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- Batas Utara : berbatasan dengan wilayah desa Bondawuna di kecamatan Suwawa Selatan dan desa Tulabolo Barat di kecamatan Suwawa Timur;
- Batas Timur : berbatasan dengan desa Tulabolo dan Tulabolo Barat di kecamatan Suwawa Timur;
- Batas Selatan : berbatasan dengan kaki gunung Lantadutomulo ;

- Batas Barat : berbatasan dengan desa Bondawuna di kecamatan Suwawa Selatan.

Berikut ini adalah tata letak kawasan arahan pengembangan pertanian terpadu.

Peta Tata Letak Mini Ranch Kawasan Arahan Pertanian Terpadu
Skala 1 : 25,000

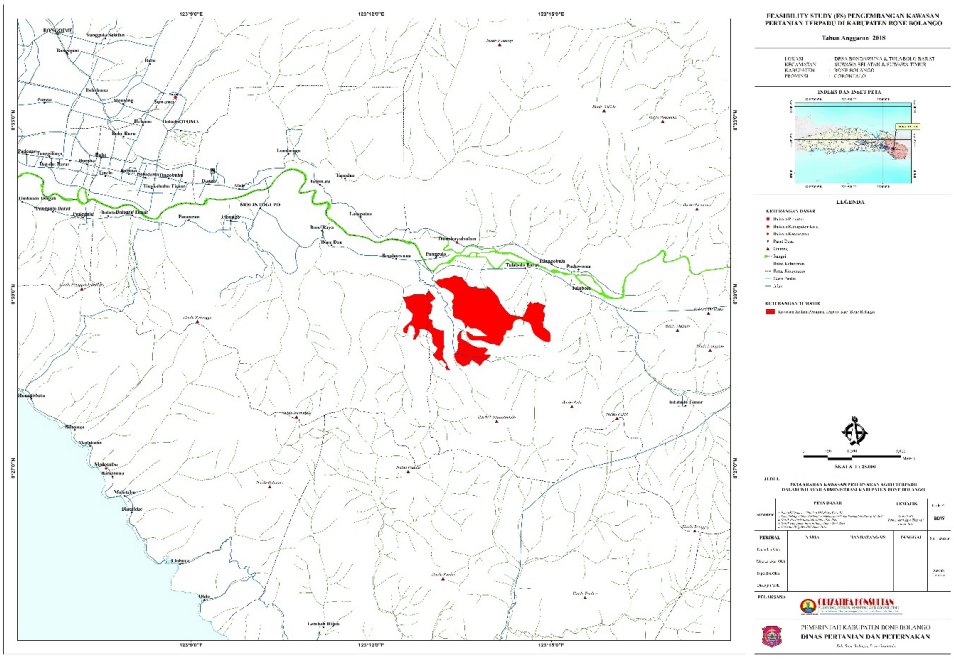

Gambar 4.Peta Tata Letak Mini Ranch Kawasan Arahan Pertanian Terpadu

Peta Tata Letak Kawasan Arahan Pertanian Terpadu
Skala 1 : 10,000

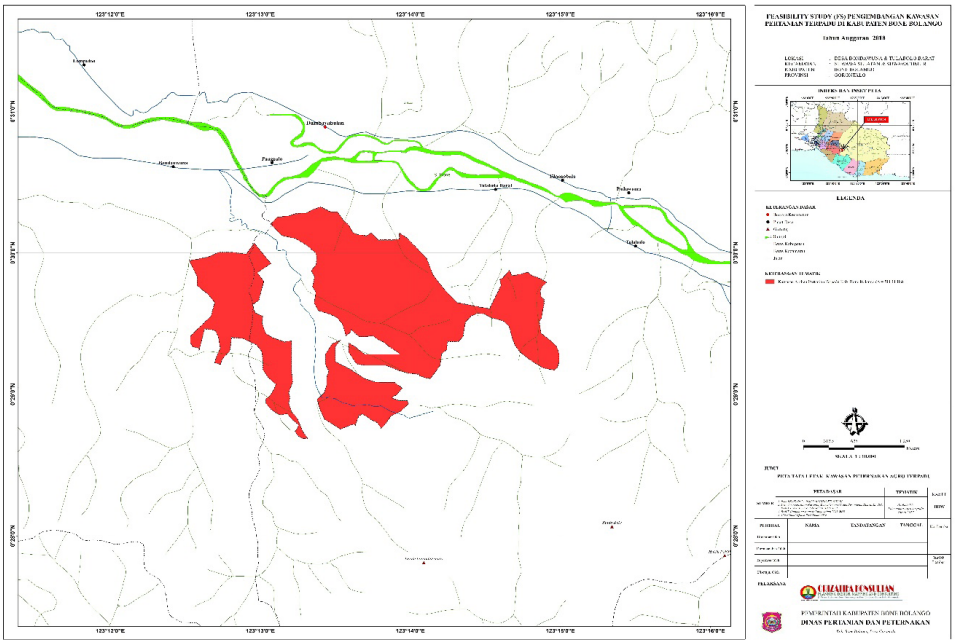

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Gambar 5. Peta Tata Letak Kawasan Arahan Pertanian Terpadu

5. Pembangunan Mini Ranch Kabupaten Gorontalo Utara

Rencana pengembangan kawasan peternakan Kabupaten Gorontalo Utara mengacu pada:

- Peningkatan diversivitas ternak, meskipun perlu mempertimbangkan kondisi wilayah yang sesuai serta budaya masyarakat.
- Pembuatan skim pengembangan usaha peternakan skala besar, karena potensi pengembangan yang sesuai cukup luas.
- Pengembangan sarana pendukung usaha peternakan seperti industri pakan ternak, pembangunan rumah potong hewan, penggemukan ternak (*cattle fatening*), industri pengalengan daging, pembibitan, dll.
- Pembuatan *grand design* peternakan di Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai suatu kesatuan dengan konsep pengembangan provinsi dan

kawasan kerjasama utara-utara , dan juga dengan sub-sektor pertanian lainnya.

Pendekatan pengembangan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan. Empat pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kawasan komoditas unggulan, yaitu : (1) pendekatan agroekosistem, (2) pendekatan sistem agribisnis, (3) pendekatan partisipatif, dan (4) pendekatan terpadu.

Keempat pendekatan tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam pengembangan kawasan pertanian dan peternakan. Khusus untuk pengembangan kawasan perkebunan ada satu pendekatan lagi yang digunakan adalah pendekatan diversifikasi integratif.

Secara ringkas urgensi dan makna dari setiap pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Agroekosistem

Pengembangan kawasan pertanian disusun dengan mempertimbangkan kualitas dan ketersediaan sumberdaya lahan melalui pewilayahan komoditas, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan agroklimat agar diperoleh hasil produksi dan produktivitas pertanian yang optimal dan berwawasan lingkungan.

Kondisi agroekosistem di wilayah salah satunya dicirikan oleh kondisi bio-fisik lahan yang mencakup ketinggian lokasi, kelerengan lahan, kondisi iklim, dan karakteristik tanah. Untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan, penentuan komoditas unggulan harus mengacu pada peta pewilayahan komoditas pertanian skala 1:50.000 yang telah mempertimbangkan agroekosistem setempat.

b. Pendekatan Sistem Agribisnis

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan kawasan komoditas unggulan adalah meningkatnya kuantitas produksi, kualitas

produk dan kesinambungan produksi komoditas yang dihasilkan. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengembangan komoditas unggulan, maka pengembangan kawasan komoditas unggulan harus dilaksanakan melalui pendekatan sistem agribisnis.

Hal ini mengandung pengertian bahwa pengembangan komoditas pertanian di kawasan komoditas unggulan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari pengadaan input produksi hingga pemasaran produk yang dihasilkan petani. Dengan kata lain, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan komoditas unggulan dapat meliputi aspek pengadaan input produksi, proses produksi komoditas, aspek pemasaran, pengolahan komoditas, serta aspek penyuluhan dan permodalan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan komoditas unggulan di kawasan setempat.

Pendekatan agribisnis dalam pengembangan kawasan juga bermakna bahwa kegiatan pertanian pada suatu kawasan berorientasi pada keuntungan usaha tani. Hal ini mengisyaratkan perlunya efisiensi dalam penggunaan input produksi, serta optimasi produksi. Pendekatan agribisnis juga mensyaratkan adanya keterpaduan antar pemangku kepentingan pertanian yang terdiri dari kalangan bisnis/usaha, masyarakat dan pemerintah.

Namun demikian, motor utama penggerak suatu kawasan pertanian tetap berada di masyarakat dan dunia usaha, sedangkan keberadaan pemerintah hanya sebagai fasilitator dan pengungkit terutama dalam pengembangan tahap awal.

Kawasan pertanian yang dibangun melalui pendekatan agribisnis memiliki orientasi produksi yang jelas, apakah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan lokal, atau untuk memenuhi permintaan pasar khususnya pasar ekspor. Kawasan pertanian yang mengembangkan komoditas pangan utama dari sub-sektor tanaman pangan (*terutama padi, jagung, kedelai*), komoditas peternakan (*sapi potong*), dan komoditas perkebunan (gula)

merupakan kawasan yang diarahkan untuk menjadi pemasok utama kebutuhan pangan masyarakat.

Keterpaduan kegiatan yang dibangun dalam kawasan pertanian tersebut lebih diarahkan untuk dapat menghasilkan produk berdaya saing melalui peningkatan kuantitas produksi dan produktivitas melalui berbagai instrumen mencakup perluasan areal, penggunaan benih/bibit unggul, aplikasi teknologi budidaya, pengairan dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan titik berat kepada aspek hulu (benih/bibit unggul) dan aspek budidaya (kuantitas produksi), serta tetap mengedepankan aspek kualitas dan efisiensi.

Kawasan pertanian yang mengembangkan komoditas bernilai tinggi dan diminati pasar (sebagai produk kebutuhan sekunder atau tersier), merupakan kawasan yang diarahkan untuk menjadi pemasok terhadap permintaan pasar baik di tingkat lokal maupun internasional. Produk-produk bernilai tinggi dan bukan merupakan kebutuhan pangan utama tersebut sebagian diantaranya mencakup produk-produk unggulan hortikultura dan perkebunan.

Keterpaduan kegiatan yang dibangun dalam kawasan berorientasi permintaan pasar lebih diarahkan untuk dapat meningkatkan daya saing produk melalui peningkatan produksi dan kualitas produk, kontinuitas ketersediaan produk, pengolahan pasca panen dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan titik berat kepada aspek budidaya (praktik GAP) dan aspek pasca panen (*pengolahan, penyimpanan dan peningkatan kualitas*).

c. Pendekatan Terpadu dan Terintegrasi

Pembangunan kawasan komoditas unggulan dengan pendekatan sistem agribisnis akan membutuhkan dukungan pembinaan serta fasilitas dari seluruh unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan berbagai dinas/instansi di daerah, dan dalam hal tertentu akan dibutuhkan pula dukungan dari Kementerian lain.

Dalam rangka menciptakan sinergisme kegiatan pada lingkup Kementerian Pertanian, maka pelaksanaan program pada Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian di lokasi kawasan komoditas tertentu perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan sinkronisasi program lintas Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan memprioritaskan program-program unit Eselon I Kementerian Pertanian di lokasi kawasan komoditas unggulan yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebutuhannya. Sinkronisasi program juga perlu dilaksanakan dengan program Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi dan program Kementerian lain.

d. Pendekatan Parsitipatif

Pembangunan kawasan komoditas unggulan dalam pelaksanaannya akan melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah pusat (Kementan), Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan masyarakat.

Dalam rangka mendorong keberlanjutan kawasan komoditas yang telah ditetapkan, maka perlu ditumbuhkan rasa memiliki pada seluruh pihak yang terkait. Dalam kaitan tersebut seluruh pihak terkait perlu dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan kegiatan hingga tahap pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan.

Partisipasi dana dari berbagai pihak (dana APBD, swasta dan masyarakat) juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan sinergi dan *outcome* dari kegiatan pengembangan kawasan.

e. Pendekatan Diversifikasi Integratif

Dalam pengembangan budidaya tanaman tahunan, seperti tanaman perkebunan dan hortikultura, pada periode Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), dapat dikembangkan tanaman pakan ternak atau tanaman penutup tanah untuk menekan pertumbuhan gulma, menahan erosi, serta menahan aliran permukaan dan penguapan.

Dengan tujuan yang sama, dapat dikembangkan paket teknologi alternatif berupa pengembangan tanaman pangan intensif, sehingga selain menekan biaya, sekaligus memberikan pendapatan kepada petani. Disamping itu pada usaha tanaman tahunan terdapat berbagai jenis limbah dan hasil samping yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan kawasan tanaman tahunan (perkebunan, hortikultura) adalah meningkatnya produksi, produktivitas, kualitas produk dan kontinuitas produksi yang dihasilkan.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka pada pengembangan kawasan tanaman tahunan dapat dilaksanakan pengembangan sistem pertanian dengan integrasi tanaman pangan atau integrase ternak. Khusus integrasi ternak Kabupaten Gorontalo Utara akan membangun *mini ranch* pengembangan sapi potong di Desa Papupalgi Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara seluas 500 ha. Lahan tersebut merupakan sisa lahan transmigrasi di Desa Papulangi yang saat ini masih dalam proses pengalihan lahan menjadi lahan peternakan. Adapun foto lahan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6. Lokasi Ranch Pengembangan Sapi Potong Kabupaten Gorontalo Utara

6. Pembangunan Mini Ranch Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pembangangunan *mini ranch* pengembangan sapi potong Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini juga masih dalam tahap persiapan lahan. Pada mulanya lahan yang akan diperuntukkan untuk *mini ranch* adalah di Desa Ollot II Kecamatan Bolangitang Barat seluas kurang lebih 200 ha yang merupakan sisa lahan transmigrasi namun pada saat akan dilakukan pembuatan SID tahun 2018 lahan tersebut sudah dikuasai masyarakat sehingga mengalami kesulitan dalam pembuatan *mini ranch* peternakan sapi potong. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pemerintah daerah setempat memindahkan lokasi pembuatan *mini ranch* dimaksud ke ex lahan HGU seluas 1050 ha lokasinya berbasatan dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Saat ini lahan tersebut masih dalam tahap pengurusan di Departemen Kehutanan RI. Gambaran lahan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 7. Lokasi Mini Ranch Pengembangan Sapi Potong Bolaang Mongondow Utara

7. Pola Pengembangan Sapi Potong Kabupaten Buol

Setelah digulirkannya rencana pengembangan satu juta ekor sapi di kawasan kerjasama utara-utara, maka Pemerintah Kabupaten Buol langsung mengeluarkan gebrakan kebijakan antara lain mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 188.09/99.16/Distan/2018 tanggal 9 April 2018 yang mengatur pelaksanaan program pengembangan ternak sapi . Gebrakan kebijakan ini menyusul kebijakan membagikan tanah untuk rakyat (TAURAT) tahun 2014 yang cukup terkenal oleh Bupati Buol dr. Amiruddin Rauf seluas 18.000 ha untuk masing-masing petani mendapat sebanyak 2 ha. Kebijakan ini menjadi cukup terkenal karena Bupati Buol menolak permintaan lahan untuk investor kelapa sawit dan lebih memilih membagikannya kepada petani. Tahun 2013 Nama Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah tiba-tiba dikenal banyak orang karena Bupati yang berkuasa pada saat itu Amran Batalipu ditangkap Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) karena kasus suap oleh PT. Hardaya Inti Plantation milik pengusaha Hartati Murdaya. Setelah pergantian Bupati, maka Bupati yang baru dr. Amiruddin Rauf menolak pemberian lahan baru

untuk pengusaha kelapa sawit dengan alasan pemerintah daerah hanya mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang sedikit dari perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Buol. Kontribusi perusahaan sawit ke kas daerah hanyalah Rp. 200-300 juta per tahun. Sementara dalam sebulan, perusahaan sawit itu bisa menghasilkan uang Rp. 60 milyar per bulan (Christopel Paino, 2014).

Tanah untuk rakyat sasarannya adalah rumah tangga miskin yang tidak mempunyai lahan di areal tanah Area Penggunaan Lain (APL), lahan tidur yang berada dalam penguasaan masyarakat atau badan usaha serta lahan negara yang berasal dari kawasan hutan konversi. Lahan 2 hektar diberikan kepada 18.000 kepala keluarga. Dengan pemberian lahan tersebut masyarakat akan lebih sejahtera karena akan memperoleh pendapatan lebih besar. Saat itu karyawan yang bekerja di perusahaan kelapa sawit berkisar 1.500 hingga 2.000 tenaga kerja dengan upah sekitar Rp. 2 juta per orang, yang berarti uang yang beredar sekitar Rp. 4 milyar. Akan tetapi bila warga yang jumlahnya 18.000 orang bekerja di lahan sendiri seluas 2 hektar, maka hitung-hitungannya dalam satu hektar warga mendapat Rp. 1,5 hingga Rp. 2 juta per bulan. Jadi pendapatan mereka akan lebih besar dan uang yang beredar akan lebih banyak.

Menurut Bupati Amiruddin program ini merupakan pelaksanaan dari konsep revitalisasi perkebunan dan *land reform* yang sesuai denganUndang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun1960 berupa pemberian dan pensertifikasian lahan pertanian bagi masyarakat miskin. Tujuannya demi meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat miskin melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk rakyat. Kemiskinan itu ada karena negara absen di tengah-tengah rakyatnya, malah lebih mengedepankan investasi dalam skala besar serta berorientasi pada pertumbuhan, bukan pemerataan, akhirnya menjadi katalisator para pemilik modal. Implementasinya tidak menyentuh masalah yang akhirnya menjadi kebijakan salah kaprah.

Dengan adanya kesepakatan dalam kerjasama utara-utara, maka program Taurat akan diintegrasikan dengan program pengembangan sapi

potong sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buol tahun 2018 yang populer dengan kebijakan one man one cow (satu orang satu sapi).

Kebijakan ini merupakan perwujudan komitmen Bupati Buol yang menghendaki Kabupaten Buol menjadi lumbung ternak baik di Provinsi Sulawesi Tengah juga di kawasan kerjasama utara-utara. Kebijakan tersebut mengatur pola pengembangan sapi potong yaitu 1). Pola *mini ranch*, 2). Pola integrasi perkebunan sawit dan ternak sapi, 3). Pola pengembangan sapi pedesaan, dan 4). Pola pengembangan peternakan sapi mandiri melalui Aparatur Sipil Negara. Pola pertama *mini ranch* dilakukan Pemerintah Daerah, pengelolaannya oleh unit pelaksana teknis dinas yang membidangi melalui perjanjian kerjasama dengan petani peternak dan hal ini perencanaanya sudah cukup jelas dijelaskan pada bab 5.1.1 tentang pembangunan *mini ranch* Kabupaten Buol. Pola kedua yaitu pola integraasi perkebunan sawit dan ternak sapi akan mengatur pemanfaatan ruang perkebunan sawit untuk pengembangan sapi potong. Di Kabupaten Buol saat ini terdapat 55.500 ha kelapa sawit milik dari 3 perusahaan besar, dan apabila integrasi ini berjalan baik maka akan ada peningkatan populasi sapi di Kabupaten Buol. Pola ketiga yaitu pola pengembangan sapi pedesaan dapat dilakukan dengan memperioritaskan program pengembangan peternakan sapi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dengan perioritas 30 ekor sapi setiap desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Pola keempat yaitu pola pengembangan sapi mandiri melalui Aparatur Sipil Negara berpedoman pada peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui peyediaan ternak sapi, meliputi:

1. Penyediaan sapi oleh pejabat eselon II sejumlah 4 (empat) ekor
2. Penyediaan sapi oleh pejabat eselon III sejumlah 3 (tiga) ekor sapi
3. Penyediaan sapi oleh pejabat eselon IV sejumlah 2 (dua) ekor sapi
4. Penyediaan sapi oleh ASN non jabatan sejumlah 1 (satu) ekor sapi

Ketentuan lain adalah setiap pengadaan sapi diasururansikan melalui perjanjian antara Bupati dengan pihak asuransi yang disetujui Bupati. Demikian pula penyediaan sapi pola mandiri dapat bekerjasama dengan perbankan yang disetuji Bupati dan dibuatkan perjanjian tersendiri dengan Bupati.

BAB VI
TINJAUAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN SAPI

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan kebijakan tata ruang secara nasional terkait pengembangan kawasan pertanian dan peternakan terpadu di wilayah kerjasama utara-utara. Dalam tinjauan kebijakan tersebut juga dipaparkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis termasuk arahan pemanfaatan dan pengendaliannya, sehingga diperoleh gambaran tentang rencana pengembangan pertanian secara hirarki di wilayah kerjasama utara-utara.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) TAHUN 2008 – 2028

Kebijakan penataan ruang merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah baik provinsi/kota / kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah dalam kurun waktu 20 tahun. Sedangkan strategi penataan ruang wilayah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata, dan akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah dan rencana kawasan strategis.

Kebijakan dan strategi penataan ruang terbagi menjadi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Secara umum kebijakan pengembangan struktur ruang dititikberatkan pada upaya mengurangi disparitas pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Aspek kelestarian lingkungan hidup menjadi prinsip utama pengembangan pola ruang, dengan tetap menitikberatkan semua upaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah penjelasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Nasional

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia;
e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi :

a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan

b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, meliputi:

a. Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
c. Mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan;
d. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
e. Mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan
f. Mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi :

a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
d. Meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal

e. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi :

a. Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung;
b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Kebijakan pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:

a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi :

a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
b. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah :
    5. Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
    6. Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
    7. Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45%(empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;

8. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
9. Pulau Papua dengan luas paling sedikit 70% (tqjuh puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
10. Kepulauan Maluku dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; dan
11. Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;

c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
d. Mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan
e. Mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi :

a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
b. Melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
c. Melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
g. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi :

a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan.
b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
c. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi :
d. Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
e. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
f. Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;

g. Menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
h. Mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai sentra ekonomi wilayah yang berbasisi kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
i. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan diwilayah perairan, wilayah yuridiksi, laut lepas dan wilayah dasar laut internasional untuk kedaulatan ekonomu nasional ; dan
j. Mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai asset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan,

Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :

a. Membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
b. Mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak;
c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya ;
e. Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil ;
f. Membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi ;
g. Menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan ;

h. Mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tamping lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota ;

i. Mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sector non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan ;

j. Mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen) ; dan

k. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada didalam satu atau lebih daerah aliran sungai.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional, meliputi :

a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;

b. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

c. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalamperekonomian internasional;

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

e. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;

f. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar; dan

g. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :

a. Menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
b. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
c. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
d. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
e. Mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
f. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi :

a. Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional, meliputi :

a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
c. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
d. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
e. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
f. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal, meliputi :

a. Mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
b. Meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
c. Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa, meliputi :

a. Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
b. Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan
c. Melestarikan situs warisan budaya bangsa.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia, meliputi :

a. Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
b. Meningkatkan kepariwisataan nasional;
c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. Melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.
e. Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal, meliputi :
f. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
g. Membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
h. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
i. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
j. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah nasional, meliputi :

a. Sistem perkotaan nasional;
b. Sistem jaringan transportasi nasional;
c. Sistem jaringan energi nasional;
d. Sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e. Sistem jaringan sumber daya air.

Sistem Perkotaan Nasional

Sistem perkotaan nasional, terdiri atas : PKN, PKW, dan PKL, dapat berupa :

- Kawasan megapolitan;

- Kawasan metropolitan;
- Kawasan perkotaan besar;
- Kawasan perkotaan sedang; atau
- Kawasan perkotaan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Amien, Mappadjati, 1996, *Penataan Ruang Untuk Pembangunan Wilayah: Pendekatan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Yang Berdimensi Ruang*, Pusat Studi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Lemlit Unhas, Ujung Pandang.

Ashari, F., E. Juarini, Sumanto, B. Wibowo, Suratman, 1995. *Pedoman Analisis Potensi Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Peternakan*. Balai Penelitian Ternak dan Direktorat Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan. Jakarta.

Ashari, N. Ilham dan S. Nuryanti. 2012. *Dinamika Program Swasembada Daging Sapi: Reorientasi Konsepsi dan Implementasi*. Analisis Kebijakan Pertanian, 10(2):181- 198.

Adisasmita, Rahardjo, 2010, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha. Ilmu, Yogyakarta.

Agranoff, Robert, *A New Look at the Value-Adding Functions of Intergovermental Networks*, Paper presented for Seventh National Public Management Research Conference, Georgetown University, October 9-11, 2003.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo 2011-2015*

Badan Pusat Statistik. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara 2011-2015*

Badan Pusat Statistik. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2015*

Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo. 2017. Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2017. Gorontalo

Badan Pusat Statistik (BPS) Bone Bolango. 2017. Bone Bolango Dalam Angka 2017. Bone Bolango.

Bendavid-Val., Avrom, 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, Fourth edition, New York: Prager Publisher

Blair, J.P., 1991, *Urban and Regional Economics*, Ricard Irvin Inc. HomewoodBoston

Budiharsono, Sugeng, 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Teori, Model Perencanaan, dan Penerapannya*.

---------- 2017. *Membangun Keajaiban Wilayah Perdesaan,* IPB Press.

Budiarto. A, L.Hakim, Suyadi, V.M.Ani Nurgiartiningsih, G. Ciptadi. 2013. Natural Incresae Sapi Bali Di Wilayah Instalasi Populasi Dasar Propinsi Bali. J. Ternak Tropika Vol. 14, No.2: 46-52

Bressani, R. 1979. The by-products of coffee berries. In Coffee pulp: Composition, Technology, and Utilization. BRAHAM, J.E. and R. BRESSANI, (Eds.). International Development Research Centre, Ottawa, Canada. pp. : 5-10 .

Daryanto, A. 2009. *Dinamika Daya Saing Industri Peternakan*. IPB Press. Bogor.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditenpkh) Kementerian Pertanian. 2017. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2017. http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2017_(ebook).pdf?time=1505127443012.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2005). Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan. Bogor. Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian – IPB.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2013. *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2013*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta.

Ekowati, T., D.H. Darwanto, S. Nurtini dan A. Suryantini. 2011. *The Analysis of Beef Cattle Subsystem Agribusiness Implementation in Central Java Province, Indonesia*. J. Indonesian Trop. Anim. Agric, 36(4):281-289.

Emilia dan Imelia. 2006. Model Ekonomi Regional. Jambi: FE – UNJA

Esteban-Marquillas, J.M. (1972). "A reinterpretation of shift-share analysis". Regional and Urban Economics. ***2*** *(3): 249–261. doi:10.1016/0034-3331(72)90033-4.*

Glasson, John. 1977.*Pengantar Perencanaan Regional*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Hadi, P.U. dan N. Ilham. 2002. *Problem dan Prospek Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi Potong di Indonesia*. Jurnal Litbang Pertanian, 21(4):148-157.

Hustede, R. et al, G., 1984, *Community Economic Analysis, North Central Regional Centre Rural Development*, Iowa State University.

Ilham, N. 2009. *Kelangkaan Produksi Daging: Indikasi dan Implikasi Kebijakannya*. Analisis Kebijakan Pertanian, 7(1):43-63.

Isard, Walter, 1960, *Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science*, The M.I.T Press, Massachusetts.

Kementerian Perdagangan. 2013. Peraturan Meneteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/MDAG/PER/8/2013. Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Kuncoro Mudrajad (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Percetakan PN Jakarta.

Mappatoba Marhawati dkk (2017). *Laporan SID Mini Ranch Pengembangan Sapi Potong Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah*, Bappeda Buol.

Mayulu, H., Sunarso, C.I. Sutrisno, Sumarsono. 2010. *Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi Potongdi Indonesia*. Jurnal Litbang Pertanian, 29(1):34-41.

Nell, A.J dan D.H.I. Rollinson. 1974. *The Requirent and avaibility of livestock feed in Indonesia*. UNDP Projed INS/72/009

Ngadiyono, N. 2004. *Pengembangan Sapi Potong dalam Rangka Penyediaan Daging di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. UGM. Yogyakarta.

Taslim, I. 2016. *Analisis Kesesuaian Iklim Untuk Lahan Perkebunan di Kabupaten Bone Bolango*. Jurnal Bindhe, Vol 1, No 1, September 2016: 44-53

Olilingo, Fahrudin Zain (2014). *Analisis Potensi Dan Pemanfaatan Lahan APL dan HGU Dalam Pengembangan Investasi Di Provinsi Gorontalo*. Lembaga penelitian Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.

---------- (2017). *Analisis Sektor Unggulan Wilayah Kerjasama Utara-Utara Sulawesi*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

Pamudji, S, *Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Pembinaan Wilayah; Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983

Prasetyo, E., Sunarso, P.B. Santosa, E. Rianto. 2012. *The Influence of Agribusiness Subsystem on Beef Cattle Fattening Farm's Profit in Central Java*. J. Indonesian Trop. Anim. Agric, 37(2):121-126.

Pratikno, et.al, *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah,* Yogyakarta: PLOD-Departemen Dalam Negeri, 2004.

Priyanto, D. 2011. *Strategi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong dalam Mendukung Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2014*. Jurnal Litbang Pertanian, 30(3):108-116.

Priyanti, A., I. Mahendri, U. Kusnadi. 2011. *Dinamika Produksi Daging Sapi di Wilayah Sentra Usaha Sapi Potong di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Balai Penelitian Ternak. Bogor.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2013b. Buletin Konsumsi Pangan, 4(1):1-15.

Pusat Data dan Sistem Infor*masi Pertanian. 2013a.* Statistik Harga Komoditas Pertanian Tahun 2013. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Jakarta.

Ramayanti, N. 2004. *Kajian Fermentasi dan Kecernaan In Vitro Kulit Buah Kakao (Theobroma cocoa L.) yang Difermentasi dengan Isolat Kapang Pestalotiopsis guepinii*. Skripsi. Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak, Departemen Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Saragih, B. 2000. Agribisnis Berbasis Peternakan: Kumpulan Pemikiran. USESE Foundation dan Pusat Studi Pembangunan IPB. Bogor.

Soekardono. 2009. *Ekonomi Agribisnis Peternakan, Teori dan Aplikasinya*. Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.

Sumanto. E dan Juarini, 2006. *Potensi Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Ternak Ruminansia di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner, Iptek Sebagai Motor Penggerak Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis Peternakan. Bogor 4-5 Agustus 2004. Puslitbangnak, Balitbangtan. Bogor.

Sunari, A., N. Avianto, M.N. Ritinov. 2010. Naskah Kebijakan: Strategi dan Kebijakan dalam Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2014. Direktorat Pangan dan Pertanian, BAPPENAS. Jakarta.

Sutardi, T. 1991. Pemanfaatan Limbah Tanaman Perkebunan sebagai Pakan Ternak Ruminansia. Pros. Pameran Produksi dan Teknologi Peternakan, Oktober 1991, Fakultas Peternakan IPB, Bogor

Suryana. 2009. Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong Berorientasi Agribisnis dengan Pola Kemitraan. Jurnal Litbang Pertanian, 28(1):29-37.

Suyatno. 2000. Teori Basis Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.

Syafrizal (2012). *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, 1999. *Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah.* Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.

Yudhoyono, S.B, Pentingnya Networking Antara Pilar Good Governance dan Antar Daerah Sebagai Wujud Integritas Nasional dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas ASEAN Tahun 2003, dalam Azhari, Idham Ibty et.al (ed.), Good Governance dan Otonomi Daerah Menyongsong AFTA Tahun 2003, Yogyakarta: Forkoma MAP, 2003.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363.